

# Jurnal

*Sosial Demokrasi*

RP

RP

# MELACAK JEJAK DAN PROSPEK SOSIAL DEMOKRASI DI INDONESIA

SOSIAL  
DEMO-  
KRASI

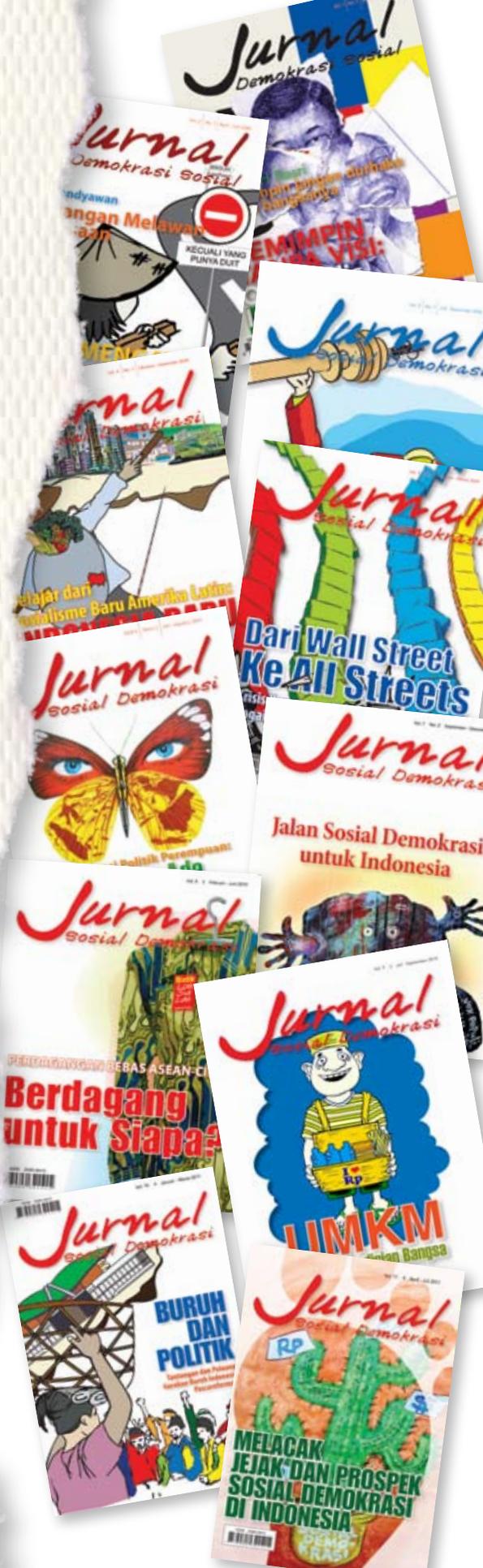
ISSN 2085-6415



9 772085 641515

Kesejahteraan sosial Indonesia berdasar pada paham ‘demokrasi ekonomi’, Indonesia yang berdasar pada ‘hak sosial rakyat’. Belum terpenuhinya hak sosial warga negara ini dikarenakan terjadinya pergeseran paham dari negara kesejahteraan ke paham liberal, dimana negara lebih mengutamakan pentingnya peran pasar.  
(Mohammad Hatta)

*Jurnal*  
Sosial Demokrasi



# Jurnal Sosial Demokrasi



## Daftar Isi

<b>Editorial</b>	
Salam Editorial	4
<b>Transkrip Diskusi</b>	
MELACAK JEJAK DAN PROSPEK SOSIAL DEMOKRASI DI INDONESIA	8
<b>Resume Diskusi</b>	
MENULIS BIBLE SOSIAL DEMOKRASI INDONESIA	29
<b>Artikel</b>	
Menata Indonesia Dalam Pusaran Globalisasi	32
<b>Artikel</b>	
Membuat Demokrasi Sosial Diterima	43
<b>Artikel</b>	
Neostrukturalisme di Amerika Latin: Jalan Keluar dari Pusaran Neoliberalisme?	48
<b>Profile</b>	
Jalan Sunyi Musik Franky	56
<b>Resensi</b>	
Apa Salahnya Pancasila?	58

### Dewan Redaksi

Pemimpin Redaksi :  
Amir Effendi Siregar  
Wakil Pemimpin Redaksi:  
Ivan Hadar  
Dewan Redaksi :  
Faisal Basri  
Mian Manurung  
Nur Iman Subono  
Arie Sujito  
Martin Manurung

### Pelaksana Redaksi

Azman Fajar  
Puji Riyanto  
Launa

### Alamat Redaksi

Jl. Kemang Selatan II No.2A  
Jakarta 12730  
Telp. 021 -719 3711 (hunting)  
Fax. 021 - 7179 1358

### Ilustrasi\*

Kuss Indarto  
Friedrich-Ebert-Stiftung

### Layout

Malhaf Budiharto

### Penerbit\*\*

Perkumpulan Sosdem Indonesia

**ISSN: 2085-6415**

\*) Dilarang mengkopi dan memperbanyak ilustrasi tanpa seijin Friedrich-Ebert-Stiftung

\*\*) Untuk mendapatkan edisi softcopy silakan lihat di [www.fes.or.id](http://www.fes.or.id)



# Salam Editorial

Sosial Demokrasi adalah sejatinya Indonesia. Berbagai dokumen sejarah menjelang Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 menunjukkan bahwa semangat mendirikan negara Republik Indonesia didasari oleh sedikitnya 3 hal, yaitu keadilan sosial, persamaan kedudukan warga negara dan, tentu saja, kebebasan warga negara. Seperti dikatakan oleh Soekarno pada Pidato Pancasila di depan Sidang BPUPKI 1 Juni 1945, "Apakah kita mau Indonesia merdeka yang kaum kapitalisnya merajalela, ataukah yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang pangan kepadanya?"

Periode menjelang dan selama revolusi kemerdekaan itulah ibarat musim seminya Sosial Demokrasi di Indonesia. Berbagai gagasan tumbuh dan berkembang dengan berbagai varian pemikiran tentang Sosial Demokrasi. Tercatat tokoh-tokoh bangsa ketika itu pada spektrum aliran pemikiran kiri, antara lain, Sjahrir, Hatta, Tan Malaka, Soekarno, Musso, Semaoen, dll. Begitu dominannya pilihan progresif ketika awal republik

*Social Democracy is rooted in Indonesia. Various historical documents before the Declaration of the Indonesian Independence on August 17, 1945 shows that the spirit of the establishment of the Republic of Indonesia is based at least on three virtues, namely social justice, equality and freedom of the citizens. Sukarno mentioned also in one of his speeches about Pancasila in the occasion of the BPUPKI Assembly, on June 1, 1945, "Do we want the independence of Indonesia to be rampant by the capitalist, or that all its people prosper, that everyone has enough to eat, enough clothing, live in prosperity, being happy living in country which provide enough food and clothing?"*

*We can say that the springtime of social democracy in Indonesia was before and during the independence period. Various ideas were grown and evolved along with the ideas of social democracy. Among others of the founding fathers of this country such as Sjahrir, Hatta, Tan Malaka, Sukarno, Musso, and Semaoen. They are recorded as persons who adopted the leftist spectrum of thought. At the time of the beginning of the*



saat itu, sehingga spektrum politik konservatif pun “terpaksa” meminjam banyak jargon progresif untuk menjual idenya di kalangan rakyat.

Sayangnya, musim semi itu segera disusul musim gugur pemikiran-pemikiran Sosial Demokrasi. Sejarah “politik gagasan” terinterupsi oleh eksperimentasi negara robotik a la Orde Baru. Rakyat menjadi robot-robot yang harus mematuhi “buku manual operasional” negara di bawah jargon pembangunan. Kaum intelektual tak lebih berperan hanya sebagai legitimator dari kebijakan-kebijakan rejim otoritarian. Dan penguasa ibarat mandor yang senantiasa memantau jalannya para robot dalam derap pembangunan ekonomi.

Pada periode itulah “politik gagasan” mati suri. Gagasan-gagasan progresif dihantui label “komunis” dan “kiri” yang dapat berakibat fatal bagi yang menyuarakannya: dipenjara, ditahan tanpa proses hukum, dibuang, dan bahkan dihilangkan. Itulah yang dimaknai sebagai babak “deideologi”, sebagai bagian paket floating mass dan depolitisasi. Suatu karakter khas rezim orde baru yang mencoba melakukan penyeragaman

*Republic, progressive leftist thoughts were dominant, even the conservative political spectrum used a lot of leftist jargons that sell progressive ideas among the people.*

*Unfortunately, the springtime was immediately followed by the autumn of the Social Democratic ideas. The history of the “political ideas” was disturbed by the experimental state of the New Order. People became robots who must comply with state’s “operations manual” in the development jargon. Intellectuals acted only to legitimate the policy made by the authoritarian regime. And authorities act as the foreman who constantly monitor the way the robots work to develop economics’ life.*

*Since that period “political ideas” were suspended and died before growing. Progressive ideas were haunted by the labels such as “communist” and “left” which can be fatal for those who speak about it. Immediately they were imprisoned, detained without due process of law, disposed of, and even eliminated. It was interpreted as the round of “de-ideologization”, as part of the package of the floating mass and depoliticization. That*

dalam skema besar korporatisme negara.

Korporatisme negara membawa Indonesia menjadi teknokratis semata. Berbagai kebijakan dijalankan semata-mata untuk pragmatism pembangunan. Kebijakan disusun bukan karena landasan sistem nilai secara kontekstual, melainkan melalui dirancang dengan pertimbangan efisiensi, efektifitas, terkendali dan pragmatis semata. Ideologi, dengan demikian menjadi seonggok barang haram.

Kini, pasca reformasi, keran liberalisasi dibuka. Berbagai gagasan muncul, bahkan hingga bentuknya yang ekstrim, yaitu liberalisasi politik, ekonomi, sosial dan budaya yang kerap kali mengabaikan sistem nilai yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat dan bangsa Indonesia. Serangkaian kebijakan dirancang dengan bahkan tanpa mereferensikan dan landasan ideal yang dicanangkan ketika mendirikan republik. Nafas dan semangat yang berkembang cenderung hanya berpijak pada pasar, dimana segala sesuatunya dinilai secara ekonomis, atau dengan kata lain "efisiensi-pragmatis" dari tiap kebijakan negara. Itulah nafas dan semangat yang sering dinamakan dengan "neo-liberalisme".

Akan tetapi, pada tataran jargon terlihat hasrat untuk menarik kembali bandul kebijakan pada sisi progresif. Pada tiap pemilihan, baik di level nasional maupun daerah, hampir setiap calon kepala daerah dan kepala negara, serta hampir setiap partai politik, mengusung nilai-nilai keadilan sosial, persamaan dan kebebasan. Misalnya pada Pemilu 2009 lalu, Megawati-Prabowo mengusung agenda kebijakan "ekonomi kerakyatan" sementara pesaingnya, SBY-Boediono mengusung slogan "bekerja untuk rakyat". Masalahnya, setelah interupsi sejarah atas segala hal yang progresif, tentu penggunaan kata "rakyat" tak lagi memiliki kandungan ideologis sebagaimana tiga dasa warsa lalu. Semua pihak merasa berhak menyanggah kata "pro-rakyat" kendatipun dalam program dan praktiknya rakyat justru hanya terlihat samar-samar.

Karena itu diperlukan kejelian dalam melakukan eksaminasi gagasan Sosial Demokrasi. Eksaminasi itu dimulai dengan mencari kembali jejak-jejak pemikiran Sosial Demokrasi di Indonesia, proses perubahan dan perkembangannya, serta bagaimana prospeknya ke depan. Langkah ini bukan semata-mata dilakukan pada aspek historisnya, melainkan mencakup pengalaman kontemporer dengan berbagai spektrum, sektor dan konteks.

Itulah yang menjadi gagasan Jurnal Sosial Demokrasi edisi bulan ini. Tentu satu edisi Jurnal tak mungkin melakukan

*was the character of the New Order regime that tries to create a "harmony" under the grand scheme of state corporatism.*

*State corporatism has made Indonesia to be a purely technocratic country. Various policies were implemented solely for the development of pragmatism. Policies are made not based on the systematic contextual values, but simply designed with considerations of efficiency, effectiveness, control and pragmatism. Ideology becomes a pile of forbidden goods.*

*During the post-reform era, the liberalization faucet is opened. Various ideas emerged, even in the most extreme forms, namely the liberalization of political systems, economic value, social and cultural rights and those actions that are often ignoring the basic adopted grown value in the Indonesian societies. Series of policies designed without reference to the basic rules and ideal fundament of the republic was proclaimed. Every state policies delivered and governed entirely by the market, where everything is judged through economic calculation, in other words "efficiency-pragmatic". Those sprits are often coined as "neo-liberalism".*

*However, at the jargon level there seems to be an effort to look back on the progressive side of the policy pendulum. Looking to the election time, both at the national and the regional level, almost every candidate of the local officials and heads of state, as well as most of political parties, bring up the values of social justice, equality and freedom. For example in the 2009 election, Candidate Megawati and Prabowo carried policy agendas of "economic populism" while its competitors, SBY-Boediono carried the slogan "working for the people". The problem is, after the interruption of history for all progressive ideas, by use of the word "people" no longer has the ideological content as three decades ago. All parties are entitled to use the word "pro-people" even though in the implementation of the programs, the people element was only faintly visible.*

*Therefore there is need for expertise in conducting/implementing the ideas of Social Democracy. Examination should begin by looking back to trace the Social Democratic thinking in Indonesia, for instance, the process of change and development, as well as prospects of its future. This step is not solely on the historical aspects, but also covers contemporary experiences of various spectrum, sectors and context.*

*That is the main topic of Social Democracy Journal this volume. Of course one issue of the Journal could not cover the heavy task. However, we want to start to ignite the light which makes all elements of social democracy collectively doing social*



tugas berat itu. Akan tetapi, kita ingin menjadi pemantik yang membuat seluruh elemen Sosial Demokrasi secara kolektif melakukan kerja akademik dan sosial itu. Diharapkan di masa mendatang kita dapat memiliki suatu “narasi besar” tentang gagasan Sosial Demokrasi di Indonesia. Narasi besar ini, selain menjadi referensi akademis, selanjutnya dapat dijadikan bahan bagi perumusan kembali agenda dan strategi Sosial Demokrasi.

Diskusi yang dilakukan dalam rangka tema tersebut, seperti ditunjukkan oleh transkrip dan resume diskusi pada Jurnal edisi ini, memang menunjukkan keinginan besar bagi terwujudnya “narasi besar” tersebut. Apabila kita sepakat dengan ide yang ditawarkan oleh Jurnal ini, maka kerja besar menanti di depan untuk seluruh elemen Sosial Demokrasi di Indonesia. Sebelum berpikir lebih jauh tentang institusionalisasi gerakan, marilah pertama-tama kita rumuskan: apa dan siapakah kita; gerakan Sosial Demokrasi di Indonesia?

Salam solidaritas,  
Martin Manurung  
Dewan Redaksi JurnalSosdem

*and academic work. We expected that in the future we can have like a “grand narrative” about the idea of Social Democracy in Indonesia. This grand narrative, can be used as an academic reference, but also used as material for the reformulation of the social democratic agenda and strategy.*

*In this Journal, it is shown that there is great desire for the realization of the “grand narrative”. The framework of the theme is clearly indicated in the transcripts and also in the resume of the discussion. For those who agreed with the ideas that are offered by this journal, then the big job lies ahead for all Social Democracy elements in Indonesia. Before thinking offurther about the institutionalizing the movement, let us first formulate: what and who we are the social democratic movement in Indonesia.*

*In Solidarity  
Martin Manurung  
Editorial Board of JurnalSosdem*



# MELACAK JEJAK DAN PROSPEK SOSIAL DEMOKRASI DI INDONESIA



## Pengantar

Perhatian dan perkembangan atas sosial demokrasi di Indonesia kian meningkat dalam beberapa waktu belakangan ini. Hal ini terwujud melalui diskusi, seminar, penerbitan jurnal dan majalah, gerakan sosial, bahkan kecenderungan kebijakan-kebijakan sosial meskipun masih dalam skala sporadis.

Di sisi lain, sosial demokrasi, baik sebagai ideologi ataupun praksis kebijakan memiliki sejarah panjang. Para founding fathers kita sangat akrab dengan ideologi ini, dan menjadi bahan perdebatan diantara mereka. Pada masa Orde Baru, karakter rezim yang otoritarian dan represif telah menghambat bahkan hampir mematikan ideologi sosial demokrasi. Namun, seiring jatuhnya liberalisasi politik pascajatuhnya Rezim Orde Baru, ideologi atau gagasan sosial demokrasi kembali berkembang meskipun masih berserakan. Dihadapkan pada tantangan semacam ini, menjadi penting untuk melacak sejarah, proses perubahan dan perkembangan sejauh ini, serta kira-kira bagaimana prospek sosial demokrasi ke depan. Pemetaan nilai, praktik sosial, kebijakan, dan gerakan sosial demokrasi ini bukan semata-mata hanya dibedah dan diperdalam pada sisi historis belaka, melainkan perlu menjangkau pengalaman kontemporer dengan berbagai spektrum dan sektor, kontes sosiologis dan politis menilai derajat relevansinya.

### Mian Manurung

Selamat malam kawan-kawan semua, selamat datang di kantor FES. Terimakasih atas kesediaannya memenuhi undangan Jurnal Sosdem untuk diskusi malam ini. Mohon maaf karena sedikit agak terlambat. Topik diskusi kita malam ini, yang akan menjadi bahan jurnal edisi 11 tahun 2011 adalah melacak jejak sosial Demokrasi di Indonesia. Bang Ivan (Ivan A. Hadat) yang akan menjadi moderator kita malam ini mungkin mau mengelaborasi dahulu sedikit dari TOR yang sudah dituliskan oleh Saudara Martin Manurung dan Arie Sudjito. Microfon ini akan segera saya berikan kepada Daniel Reichart, direktur FES yang baru, pengganti Pak Erwin (Direktur FES Indonesia sebelumnya red). Inidiskusi yang pertama sekali dia hadiri, barang kali dia akan menyampaikan salam perkenalan dan juga ingin mengenal rekan-rekan semua lebih dekat. Silahkan Daniel.

### Daniel Reichart

Terima kasih Mian. Selamat malam Pak Amir, dan teman-teman semua. Saya mau minta maaf karena akan meneruskan berbicara dalam bahasa Inggris karena saya mesti lebih banyak belajar Bahasa Indonesia.

*I hope you all understand the meaning. Otherwise, maybe Mian can help me to translate. Welcome on behalf FES, and I'm happy we can hold this meeting, the short term 'journal' on social democracy. Is it necessary to translate or is it ok?*

*Ok, I know that in the last few year we have done a lot of works on the concept of social democracy. I think it's very 'creative' what you have achieved until now. I think the next step, the next challenge, which is head of us, which is also proposed from Ivan, is about how we can bring social democracy close to the context in Indonesia. What does that mean for Indonesia, because Ivan, was trying to translate a lot of the proposed need to the reader on to democracy. I think it is very*

*helpful but it was written from German perspective. And you cannot transfer the German's perspective, also it might be helpful, but you have to adopted to say what does it mean for the context in Indonesia. The important challenge, in the head of us, we should note or speak about social democracy in general, which is also very important, but we should also think what does it mean for the policy. What does social democracy mean for economic policy, what does it mean for education policy, for equivalent policy. What does it mean in very complete and concrete way.*

*We in FES office also got some ideas which is so not finish. But I just come up with some ideas how we can meet the challenges. How to adopt the concept of social democracy much more to the context of Indonesia, and how to provide concept work that social democracy mean for the different policy area. I think I am very much looking forward to the ideas that you have that come over this meeting. And these, at all, are very quick preparation. Thank you Mian and Ivan for the preparation of the meeting and good luck.*

### **Mian Manurung**

Terima kasih Daniel. Senang malam ini saya melihat ada beberapa wajah-wajah baru yang mungkin untuk pertama mengikuti diskusi jurnal. Secara teknis, kami minta agar kawan-kawan bisa menyebutkan nama dan institusinya karena diskusi malam ini akan direkam secara penuh, dan sebagaimana tadi telah saya sampaikan akan menjadi bahan jurnal edisi 11. Terima kasih. Silahkan Bang Ivan.

### **Ivan A. Hadar**

Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih juga kepada Daniel atas kata sambutannya. FES sedang gencar-gencarnya menerjemahkan buku-buku bacaan terkait dengan sosial demokrasi. Seperti kata Daniel, isu-isu yang dikembangkan dalam bab itu yang menarik. Terutama kaitannya, misalnya, dengan pendidikan, kesehatan, arbitrase, dan lain sebagainya. Hal-hal yang sebenarnya sangat dibutuhkan dalam mengimplementasikan ide-ide sosial demokrasi. Kita tahu bahwa sekarang ini komunisme sudah tumbang, dan tinggal beberapa negara yang masih komunistis. Kapitalisme di seluruh dunia ini telah menjadi, katakanlah, pemenang terakhir. Hanya saja, dalam

kapitalisme itu sendiri, ada nuansa-nuansa yang mungkin, misalnya, paling kanan atau neoliberalisme dan kemudian paling kiri, misalnya, sosialisme atau sosial demokrasi.

Tadi, juga disebutkan bahwa buku bacaan sosdem kaitannya lebih banyak dengan Eropa, khususnya Jerman dan mungkin sebagian negara-negara Scandinavia. Pertanyaannya kemudian bagaimana ide-ide tersebut bisa diterapkan di Indonesia? Pertemuan kita hari ini merupakan salah satu *starting poin* untuk membuat penelitian mengenai sosdem dalam konteks Indonesia. Mas Arie dan Bung Martin telah membuat TOR-nya, dan TOR ini sebenarnya menjadi suatu awalan untuk melakukan pelacakan jejak dan proses sosial demokrasi di Indonesia. Suatu pekerjaan besar. Kita tahu Soekarno, Tan Malaka, Syahrir, dan sebagainya adalah orang-orang sosialis atau sosial demokrasi. Malam ini, sebenarnya, kita mengundang sebagian "tokoh-tokoh" sosial demokrasi, misalnya, Marsilam Simanjuntak, Rahman Toleng, Fajlur Rahman, dan lain sebagainya. Tadi, Mbak Mian mengatakan bahwa mereka dalam perjalanan. Namun, di Jakarta ini, bisa mengubah niat tulus ikhlas. Niat baik tersebut sering kali tidak terpenuhi karena alasan-alasan teknis, misalnya, hujan lebat sehingga membuat Jakarta macet total, dan lain sebagainya sehingga hal itu bisa kita pahami.

TOR yang dibuat oleh Arie dan Martin ini sangat baik, yang merupakan sejarah panjang sosdem di Indonesia. Anak-anak muda ini kiranya menjadi pelopor bagi usaha mempromosikan sosdem di Indonesia. Baik kita mulai saja dari persentasi. Silahkan Mas Arie. Setelah itu, Martin.

### **Arie Sujito**

Terima kasih Bang Ivan. Selamat malam kawan-kawan semua. Terima kasih. Kita menyedikan waktu yang cukup untuk mendiskusikan sosdem sebagai bagian dari komitmen kita untuk mengembangkan sosdem di Indonesia. Kita tahu bahwa jurnal sosdem ini kita rancang untuk menjadi bagian dari usaha kita menyumbangkan sosdem sebagai sebuah ideologi, sosdem sebagai sebuah perspektif maupun sosdem sebagai sebuah paradigma.

Seperti tadi telah disinggung Pak Daniel dan

juga telah ditegaskan oleh Bang Ivan, ada kebutuhan yang mendesak mengenai buku-buku sosdem karena perkembangan ideologi di Indonesia terutama masa setelah reformasi. Ruang-ruang untuk mengembangkan sosdem sebagai ideologi, perspektif gerakan, ataupun praktis kebijakan terbuka lebar. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah begitu banyak produk akademik, *policy* (baik di tingkat nasional dan daerah) begitu *fragmented* dan dari situ muncul pertanyaan-pertanyaan kunci bagaimana mengukur apakah itu sosdem ataukah bukan? Kemudian, dari kebingungan-kebingungan itu, sering kali, dikacaukan oleh konstruksi-konstruksi sesat yang direproduksi oleh alumni Orde Baru yang hidup di era reformasi. Konstruksi-konstruksi itu tampak merupakan usaha untuk memblokir sosdem dengan dianggap sebagai komunis sehingga secara historis mempunyai sejarah kelam dan tidak layak hidup di Indonesia. Nah, tugas teman-teman saya kira melacak apakah sosdem mempunyai akar historis? Kemudian, jika mempunyai akar historis, maka gagasan besar dan tokoh-tokohnya seperti apa? Selanjutnya, dalam konteks masa kini, perkembangan atau pergantian dari satu rezim satu ke rezim yang lain apakah memperlihatkan sosdem yang semakin eksis atau semakin tidak jelas? Inilah yang tadi dikemukakan Bang Ivan bahwa kita perlu melakukan kajian sosdem secara lebih akademis, dan mempunyai relevansi sosial untuk mensuplai teman-teman di gerakan sosial. Selain itu, kita berharap bahwa studi semacam itu bisa memberikan semacam diagnosis bagi *policy* sosial. Apakah ada kaitannya dengan prinsip-prinsip sosdem ataukah belum? Oleh karena itu, saya memberikan apresiasi terhadap usaha sosdem untuk menerjemahkan buku-buku yang

Dalam pandangan saya, sebagai sebuah ideologi, gagasan dan kebijakan sosial, sosdem di Indonesia sudah sebagai, saya menyebutnya, realitas jamak, dan berlangsung dalam fase yang panjang. Meskipun belum disebut sebagai *mainstream*. Ini terjadi tidak hanya di bidang politik, ekonomi, tapi juga sosial. Bahkan, banyak orang menyebut sosdem saja malu-malu. Meskipun ada juga yang mengaku sosdem, tapi mengambil jalan neoliberal. Saya kira realitas itu ada. Kekacauan-kekacauan itu menjadi persoalan yang perlu kita klarifikasi.

sedikit banyak akan membantu teman-teman yang akan merangkai secara lebih dalam gagasan sosdem. Dengan begitu, kita akan bisa memberikan penilaian secara lebih baik mengenai apa yang dimaksud sebagai sosial demokrasi itu?.

TOR ini saya tulis dengan Martin sebagai awal untuk melakukan riset yang lebih besar. Oleh karena itu, malam ini, kita harapkan akan ada pendalaman atas gagasan itu.

Dalam pandangan saya, sebagai sebuah ideologi, gagasan dan kebijakan sosial, sosdem di Indonesia sudah sebagai, saya menyebutnya, realitas jamak, dan berlangsung dalam fase yang panjang. Meskipun belum disebut sebagai *mainstream*. Ini terjadi tidak hanya di bidang politik, ekonomi, tapi juga sosial. Bahkan, banyak orang menyebut sosdem saja malu-malu. Meskipun ada juga yang mengaku sosdem, tapi mengambil jalan neoliberal. Saya kira realitas itu ada. Kekacauan-kekacauan itu menjadi persoalan yang perlu kita klarifikasi.

Nah, dalam rentang yang panjang itu, kita bisa melacak sejarahnya mulai dari pra-kemerdekaan, era

pascakemerdekaan, Orde Baru hingga era reformasi. Kita bisa mengatakan bahwa pasang surut perkembangan sosdem di Indonesia sangat dipengaruhi oleh bagaimana perlakuan rezim yang berkuasa. Dalam hal ini, pertumbuhan ideologi sangat dipengaruhi rezim terhadap masyarakatnya. Saya kira dalam masa Orde Lama, Orde Baru hingga reformasi proses-proses semacam itu penting kita lihat sebagai sebuah fase. Misalnya, kita menyebut era pra dan pasca-kemerdekaan pikiran-pikiran yang lebih populer adalah sosialisme, dan hal-hal yang berkaitan dengan sosdem berkembang dalam *setting* Indonesia sebagai negara



modern. Seperti kami -saya dan Martin-ungkap dalam TOR bahwa pemikir-pemikir dan tokoh-tokoh politik seperti Soekarno, Hatta, Syahrir dan Tan Malaka begitu banyak buku yang melandaskan pada nilai-nilai sosdem. Meskipun kita juga menyadari bahwa tokoh-tokoh ini mempunyai variasi dalam cara berfikir mengenai sosial demokrasi atau sosialisme. Hal ini karena sangat dipengaruhi oleh konteks perlawanan terhadap kolonialisme. Oleh karena itu, pemikiran Soekarno, Hatta, Syahrir ataupun Tan Malaka, mengenai sosialisme dan perdebatan diantara mereka juga berada di seputar bagaimana strategi melawan kolonialisme.

Kita juga melacak buku-buku yang sekarang ini ada, pertarungan ideologi dengan berbagai varian yang ada juga berkait dengan kekuasaan yang terbentuk. Misalnya, perdebatan Syahrir dengan Hatta dan Hatta dengan Soekarno. Soekarno mempunyai ide tentang Marhaenisme, sedangkan Hatta mengenai kekuatan ekonomi dan Tan Malaka mengenai isu-isu kedaulatan. Nah, perdebatan diantara mereka lebih banyak dipengaruhi oleh bagaimana menempatkan Indonesia sebagai entitas yang mempunyai relevansi dengan pengembangan nilai-nilai sosdem itu sendiri.

Saya kira perdebatan yang paling menarik menge-

nai sosdem ini adalah lahirnya Pancasila. Perdebatan mengenai Pancasila dengan berbagai variasi yang muncul pada waktu itu maka jika kita lacak melalui berbagai dokumen sejarah sejauh ini maka Pancasila dianggap sebagai sebuah sistesis. Banyak orang menilai bahwa nilai-nilai yang ada dalam Pancasila mengandung nilai-nilai sosial demokrasi yang cukup tinggi. Meskipun fakta yang bisa kita lihat kemudian bahwa perdebatan secara filosofis dan ungkapan yang terkandung dalam Pancasila mengalami distorsi luar biasa. Ini karena, sebagaimana tesis awal yang tadi saya kemukakan, interpretasi atas sebuah ideologi sangat tergantung pada kondisi yang diciptakan oleh rezim yang berkuasa.

Pada masa Orde Baru, fakta yang saya kira memprihatinkan jika berbicara mengenai ideologi bahwa sosdem mengalami penghancuran secara sistematis. Saya menyebutnya sebagai depolitisasi, deideologisasi, dan *floating mass* sebagai satu paket utama dimana ruang untuk tumbuhnya ideologi dipersempit melalui *state corporatism*. Salah satu contoh yang cukup penting adalah sosdem dimatikan bersamaan dengan orientasi politik pembangunan yang berpijak pada stabilitas dan pertumbuhan. Dengan cara itu, terjadi penafsiran sesat atas sosialisme dan sosdem yang dimasukkan dalam kotak komunisme, yang dalam konteks Orde baru dianggap sebagai musuh sejarah bangsa. Praktis nilai-nilai sosdem yang perkembangannya belum tuntas pada era Orde Lama tidak memperoleh ruang perdebatan. Saya kira banyak buku tentang perdebatan Syahrir, Hatta, dan Tan Malaka tidak pernah diungkap lagi karena negara tidak memberikan ruang yang adil. Meskipun demikian, yang menarik dan ini harus kita lacak dalam riset nanti bahwa meskipun direpresi, tapi praktik sosdem tidak mati total, bisa dikatakan "mati suri". Ini karena ia memanfaatkan ruang-ruang yang sifatnya terbatas dengan pendekatan yang sifatnya *soft subversive* yang dipelihara di bawah tanah.

Pada masa Orde Baru, sosdem tidak dikembangkan, tapi cukup dipelihara. Saya ingat sekali bahwa pada masa Orde Baru sosdem berkembang dalam lingkup yang sifatnya terbatas. Diskusi atau wacana berputar di seputar kelas menengah, dalam lingkaran-lingkaran perguruan tinggi ataupun LSM meskipun di *grass root* juga ada, tapi sangat terbatas. Waktu itu, lebih



disebut sebagai sosialisme dan bukannya sosialisme demokrasi. Tema-tema yang muncul dalam diskusi tidak eksplisit mengenai sosialisme, tapi berkuat pada otoritarianisme negara, isu-isu pembangunan alternatif, pemikiran-pemikiran struktural maupun post-struktural. Pada tahun 1980-an, banyak tokoh yang mengembangkan sosialisme di kelompok-kelompok studi yang juga ditransformasikan ke dalam gerakan-gerakan LSM. Era itu pula, saya ingat betul, minat bacaan banyak diinspirasi oleh *new left* tahun 1970-an dan tahun 1980an. Orang banyak gandrung, misalnya, Andre Gundle Frank, Samir Amin, dan lain sebagainya. Namun, tidak secara eksplisit menyebutkan sosial demokrasi. Meskipun begitu, pendekatan kiri baru cukup meningkat tajam yang kemudian mempengaruhi konfigurasi befikir di kalangan aktivis pada waktu itu.

Demikian pula jika kita kembali ke soal Pancasila sebagai sebuah ide, saya kira ada sebuah kajian yang

cukup menarik, misalnya, Pancasila di Era Negara Integralistik. Itu merupakan perdebatan Pancasila yang cukup bisa kita jadikan rujukan untuk melihat apa yang terjadi saat itu.

Pada masa Orde Baru juga, aktivis gerakan sosial menggunakan ideologi Pancasila sebagai siasat untuk mempengaruhi politik represif. Kita bisa mengulas sosdem di era Orde Baru ini karena ada ketegangan luar biasa. Pada satu sisi, negara cukup memberikan tekanan, tapi di sisi lain gerakan-gerakan *soft subversive* ini masih terpelihara dengan baik.

Nah, perkembangan sosdem yang begitu kelam pada masa Orde Baru kemudian terbuka kembali ketika reformasi. Kita beruntung karena liberalisasi politik membuka kesempatan untuk mengunduh ulang gagasan sebagai basis pengembangan ideologi. Di beberapa hal, teman-teman yang dulu senyap kemudian bangkit dengan memanfaatkan liberalisasi politik.

Mereka, dalam bahasanya Martin dan Willy, berusaha merestorasi atau mengungkap kembali ataupun membangun kembali teori-teori yang selama ini tidak mendapatkan tempat yang cukup layak.

Saya ingat bahwa setelah peristiwa Juli 1996, gerakan kiri, termasuk yang menggunakan pendekatan *soft* dibabat habis. Saya juga ingat karena banyak teman-teman yang *stress* karena buku-buku banyak dibakar. Mereka takut terhadap represi rezim.

Di sini, saya ingin mengatakan bahwa tahun 1996 merupakan masa yang cukup memprihatinkan karena gerakan kiri dibabat meskipun tidak sampai ke akarnya. Meskipun demikian, masa ini merupakan catatan kelam karena biaya sosialnya sangat besar. Peristiwa tersebut menimbulkan trauma yang cukup besar dibandingkan dengan era-era sebelumnya.

Di era reformasi ini, banyak orang merayakan liberalisasi politik untuk menumbuhkan ideologi. Gerakan sosial politik dan organisasi politik yang berafiliasi sosdem dalam berbagai bentuknya mulai diskusi, seminar, ataupun penerbitan tumbuh subur. Waktu itu, ada semacam kegairahan yang tumbuh meskipun belum begitu jelas antara klaim-klaim kerakyatan itu dengan sosdem, klaim-klaim populisme itu dengan sosdem, dan lain sebagainya.

Jadi, tekanan politik Orde Baru menjadi alasan tumbuhnya ideologi alternatif, tapi fragmentasi ideologi yang tumbuh pasca Orde Baru tersebut tidak bisa diidentifikasi dengan jelas apakah berhaluan sosialisme demokrasi ataukah bukan? Sebaliknya, hal itu lebih mencerminkan ekspresi kritis atau antitesis terhadap neoliberalisme. Oleh karena itu, kita perlu memperdalam bahwa gerakan kiri itu dalam praktiknya justru memperlemah negara karena sejarah Orde Baru yang kelam. Ini terjadi karena kekacauan itu tadi sehingga analisisnya bisa sangat sosialis, tapi solusinya sangat neolib. Jebakan itu terjadi karena masih dipengaruhi oleh, bahasa saya, anomik. Transisi untuk keluar dari racun Orde Baru belum keluar, tapi transformasi yang baru belum muncul. Tantangan ini akhirnya yang membuat sosialisme atau sosialisme demokrasi belum terlihat batang tubuhnya. Namun, pada saat itulah, liberalisme makin menguat seiring pembenahan tata politik dan ekonomi sebagai usaha

untuk keluar dari krisis.

Di daerah, gerakan sosial demokrasi cukup banyak, dan gerakan sosial demokrasi di partai mulai muncul. Baik di pusat ataupun di daerah kebijakan sosial yang mengandung nilai sosial demokrasi, misalnya, jaminan hak-hak dasar, dan seterusnya mulai banyak bermunculan. Contoh-contoh yang sifatnya sporadis, misalnya, di tengah membanjirnya pasar-pasar modern yang mematikan sektor ekonomi lokal, ada seorang bupati yang tidak mengijinkan pembangunan pasar modern (mall-mall besar) di daerahnya. Selain itu, penggunaan APBD untuk membantu memenuhi hak-hak dasar warga negara. Ini berarti bahwa gairah untuk melahirkan *policy* beraliran sosdem relatif cukup banyak. Namun, catatan yang menarik bahwa substansi yang terkandung dalam *policy* memenuhi nilai sosdem, tapi, dalam beberapa kasus, kebijakan tersebut dicapai dengan cara-cara nondemokratis. Misalnya, di Jembrana, ada pendidikan dan kesehatan yang disediakan oleh daerah, tapi berproses dengan cara-cara teknokratis. Kebijakan hanya dirumuskan di kalangan teknokratik, dan tidak melalui cara-cara partisipasi demokratis ataupun deliberatif. Dengan demikian, isinya sosdem, tapi prosesnya tidak melalui cara-cara yang demokratis.

Saya menganggap bahwa isu jaminan sosial begitu banyak. Jika hal ini tidak kita diskusikan dan dokumentasikan, maka akan hilang begitu saja. Oleh karena itu, jebakan yang mungkin kita hadapi kemudian adalah sosdem tidak pernah berkembang meskipun fakta-faktanya tidak demikian.

Persoalan yang kita hadapi sekarang adalah krisis demokrasi formal prosedural yang mengalami puncaknya. Mereka gagal dalam menciptakan kesejahteraan. Nah, dalam pandangan saya, ini merupakan peluang apakah sosial demokrasi mampu menjawab kelemahan-kelemahan yang timbul selama praktik demokrasi liberal ataukah tidak? Jika sosdem bisa hadir dan memberikan makna atas demokrasi tu, maka tingkat penerimaan sosdem akan semakin besar.

Berikutnya, neoliberalisme telah mengalami delegitimasi karena krisis berkepanjangan. Sekali lagi, ini merupakan tantangan yang menarik. Empat tahun yang lalu, perdebatan tentang krisis demokrasi liberal ini berlangsung dengan sengit. Namun, sosdem tidak

mengalami penguatan untuk melakukan konsolidasi ide dan gerakan untuk memberikan jawaban atas kritik yang muncul terhadap krisis demokrasi liberal tadi. Selain itu, sosdem juga tidak masuk secara eksekutif ke dalam lembaga-lembaga representatif. Saya kira kita mempunyai banyak momentum, tapi tidak bisa dimanfaatkan dengan baik.

Saya melihat bahwa ketersediaan dan daya dukung pengetahuan serta informasi untuk mengembangkan sosdem relatif cukup banyak. Dalam hal ini, buku sudah banyak ada meskipun relatif cukup *fragmented*. Kekurangan kita barangkali karena tidak mempunyai buku babon yang menjelaskan sosdem di Indonesia seperti apa? Dalam diskusi ataupun perkuliahan, selalu mengambil contoh pengalaman di negara-negara Eropa, Scandinavia, dan lain sebagainya yang lebih banyak berbicara mengenai teoritisasi sosdem yang sering kali tidak dikaitkan dengan jejak dan konteks di Indonesia. Akibatnya, lebih mudah dipatahkan oleh tafsir rezim yang memojokkan sosdem ke dalam komunisme tadi.

Menurut saya, jika kita bisa memanfaatkan peluang-peluang itu, maka sosdem bisa mengambil manfaat yang sangat besar untuk berkembang. Organisasi-organisasi sosial di masyarakat juga semakin giat mengembangkan terobosan-terobosan praktis dalam rangka memperkuat ataupun mengembangkan sosdem. Namun, catatan saya dan itu perlu dipikirkan ke depan, organisasi sosial, agenda politik ataupun kebijakan-kebijakan sosial yang dianggap sosdem masih sangat *fragmented*. Saya kira kita mempunyai cukup bukti mengenai gerakan-gerakan atau agenda-agenda kebijakan berhaluan sosdem, ada nilai-nilai dan proses pengetahuan yang bersifat mendasar. Namun sayangnya, hal itu tidak cukup padu dan sistematis. Akibatnya, muncul pertanyaan sosdem

yang akan kita promosikan itu bentuknya seperti apa? Selanjutnya, sosdem-jika ada debat Megawati dan Prabowo dengan SBY yang juga berbicara kerakyatan-maka jika tidak ada klarifikasi secara substansial maka ia bisa saja mengatakan bahwa "Saya juga Sosdem". Akhirnya, semua tergantung pada *audiensnya*. Jika *audiensnya* berbau-bau kiri, maka mereka mengatakan sosdem. Namun, jika yang dihadapi pengusaha yang haluannya neolib, maka probisnis. Hal ini tentu saja akan menciptakan kebingungan di kalangan anak muda. Oleh karena itu, dalam pandangan saya, ini tantangan bagi kita sehingga kita memerlukan "peta jalan" pembangunan sosdem dengan memanfaatkan jejak-

jejak sejarah. Buku tidak terlalu sulit kita dapatkan, dan tokoh-tokoh lama masih bisa kita rujuk. Setidaknya, melalui tokoh-tokoh itu, kita bisa melacak perkembangan sosdem di era tahun 1980-an.

Pengembangan ideologi sosdem memerlukan strategi dengan mengkontekstualisasikan ideologi sosdem yang bertumpu pada struktur dan kultur ke Indonesiaan. Bukan hal yang bersifat pragmatis. Bagaimanapun sosial demokrasi yang berkembang

di Eropa mempunyai konteks yang perlu disesuaikan dengan struktur dan kultur di Indonesia.

Berbagai riset di tingkat akar rumput, misalnya, di Aceh mengenai sosdem terkait masalah-masalah pengelolaan lingkungan dimana mereka memperlakukan kelompok bisnis juga pernah dilakukan, tapi tidak pernah menjadi bagian dari perdebatan yang muncul. Nah, tentu, hal ini akan berharga jika kita bisa mengangkatnya ke dalam studi kita nanti.

Usaha-usaha semacam itu akan menjadi semakin penting meskipun tetap merupakan tantangan yang besar. Ini karena usaha-usaha untuk memajukan sosdem dalam beberapa waktu belakangan mulai tampak.

Persoalan yang kita hadapi sekarang adalah krisis demokrasi formal prosedural yang mengalami puncaknya. Mereka gagal dalam menciptakan kesejahteraan. Nah, dalam pandangan saya, ini merupakan peluang apakah sosial demokrasi mampu menjawab kelemahan-kelemahan yang timbul selama praktik demokrasi liberal ataukah tidak? Jika sosdem bisa hadir dan memberikan makna atas demokrasi tu, maka tingkat penerimaan sosdem akan semakin besar.

Nah, saya pernah cerita kepada Mbak Mian, dalam suatu diskusi buku tentang Negara Pancasila yang ditulis oleh Wakil Ketua BIN, bekerja sama dengan Pusat Studi Pancasila dan mengundang dosen-dosen di UGM. Di situ digambarkan, peta pertarungan ideologi di Indonesia sudah berubah pasca Perang Dingin. Ancaman komunisme sudah tidak ada lagi, dan digambarkan bahwa gerakan itu telah bermutasi ke dalam sosial demokrasi. Salah satunya ditopang oleh lembaga, yang disebutkan waktu itu, FES. Saya kira ini merupakan kesesatan konstruksi berfikir. Padahal, banyak sekali daerah-daerah yang menggunakan paham sosial demokrasi untuk melandasi kebijakan sosial, dan banyak juga orang-orang yang berada di sekitar SBY sebenarnya dulunya Sosial Demokrasi. Oleh karena itu, jika hal ini tidak diantisipasi dengan membuat kursus yang lebih jernih, maka tidak ada peluang untuk mengembangkan ideologi sosial demokrasi. Meskipun demikian, saya lebih melihat ini sebagai sebuah tantangan dibandingkan sebagai sebuah hambatan.

Saya kira ini pengantar saya. Kita bisa melakukan eksplorasi secara lebih mendalam dalam diskusi. Barangkali, Martin nanti bisa mengembangkan lebih jauh.

#### Ivan A. Hadar

Sangat menarik, dan saya kira ini juga sangat segar. Jadi, kita tinggal menggunakan alur pemikiran ini untuk membuat peta jalan ke depan. Saya juga bertanya-tanya tadi mengenai apa yang tadi disampaikan oleh Arie bahwa kita harus bertumpu pada struktur dan kultur Indonesia. Dalam kaitannya dengan kultur, apakah ada kultur politik di Indonesia yang katakanlah sekarang ini masih *patron-client* menjadi penyebab ideologi sosdem belum berkembang. Dulu, ada Soekarno, Tan Malaka, dan lain sebagainya yang bisa menarik gerbong partai politik yang bukan untuk tujuan jangka pendek pemilihan umum, tapi menjadi semacam bibit awal dimana diskusi dan kader-kadernya mempunyai pemikiran *solid* dan cerdas yang kemudian menjadi semacam “dapur” pemikiran sehingga ideologi itu bisa menyebar kemana-mana.

Saya kira kita sepakat bahwa pengantar diskusi yang disampaikan Arie sangat brilian. Sekarang ting-

gal menggolkan pemikiran semacam itu, dan barangkali Martin yang tadi disebut-sebut menjadi pemukul gongnya. Silahkan, Martin.

#### Martin Manurung

Tadi, Bung Arie Sujito telah menjelaskan panjang lebar dan menyebutkan contoh-contoh kebijakan di tingkat lokal. Banyak juga, sebenarnya, dari diskusi-diskusi baik yang diselenggarakan FES maupun dunia maya sering kali terjadi kebingungan ketika, katakanlah, kebijakan di tingkat nasional ini didiskusikan. Memang, kami tidak berpretensi untuk membuat semua dari kita sepakat karena Syahrir, Tan Malaka, Soekarno, dan lainnya juga tidak pernah sepakat. Namun, paling tidak, mereka mempunyai *guide line*, dan ketika itu memang belum terjadi kealpaan atau interupsi sejarah yang membuat segala sesuatu yang berkaitan dengan progresivitas itu menjadi abstain. Bukan hanya dalam konteks sosial demokrasi, tapi juga pemikiran progresif. Nah, kebijakan di tingkat nasional, misalnya, katakanlah yang relatif fenomenal, misalnya, BLT. Apakah *cash transfer* ini merupakan kebijakan progresif ataukah tidak? Saya tidak berani mengatakan sosial demokrasi ataukah tidak. Namun, mestinya, ada prasyarat yang bisa didiskusikan sehingga kita bisa melihat fenomena secara lebih tajam. Mungkin juga *bailout* yang sebenarnya cukup dilematis. *Bailout Century* barangkali masih sangat kasuistik, tapi *bailout* itu sendiri seperti apa ketika negara dengan menggunakan uang publik melakukan intervensi pasar dimana hal ini tidak ditolak oleh sosial demokrasi atau sosialis? Ini dalam bidang ekonomi. Dalam bidang politik, misalnya, pemilihan langsung yang partisipatoris. persoalannya adalah apakah hal ini memenuhi kriteria sosial demokrasi? Di sini, kita memerlukan definisi. Oleh karena itu, ketika kita diskusi di sini dan di Yogyakarta beberapa waktu lalu maka sepertinya kita perlu merumuskan kembali. Ini agar gagasan sosial demokrasi di Jerman ataupun di Swedia atau di negara-negara Scandinavia ketika diterapkan di sini dengan akar budaya yang berbeda maka *outcome*-nya tetap sosial demokrasi. Oleh karena itu, kita perlu membedah atau membongkar hal ini bersama-sama meskipun tidak berpretensi membuat kesepakatan, tapi setidaknya kita bisa belajar ber-



sama-sama. Dengan demikian, ketika kita berkiprah di bidang kita masing-masing maka akan mempunyai gambaran yang kurang lebih sama apa yang dimaksud dengan sosdem di Indonesia itu? Saya kira itu saja tambahan dari saya. Terima kasih

#### Ivan A. Hadar

Sangat menarik. Terima kasih Martin. Saya kira sangat penting sekali apa yang disampaikan oleh Martin tadi. Jadi, sepertinya memang tidak ada kesinergian antara *content* dan cara. Namun, dimanapun akan senantiasa ada semacam pendulum. Jika kita dihadapkan antara pasar dan negara, maka mungkin negara kaitannya dengan intervensi sedangkan pasar bisa liberal. Di Eropa atau negara-negara Scandinavia, pendulum juga bisa seperti itu. Jadi, apa yang dilakukan oleh Bupati Jembrana mungkin tidak berangkat dari ideologi yang kita bayangkan, tapi sekedar niat baik saja. Barangkali, bayangannya adalah, “Dengan cara seperti ini aku bisa memberikan pendidikan gratis kepada rakyat, dan karena itu semoga aku terpilih kembali”. Barangkali, seperti itu.

Tadi, apa yang disampaikan Arie mengenai bertumpu pada struktur dan kultur di Indonesia apakah dari serpihan-serpihan tadi bisa dijahit sehingga menjadi sosdem khas Indonesia. Atau, bisa juga itu dijadikan dapur ideologi sehingga orang bisa belajar di situ.

#### Arie Sujito

Dalam perkembangan Islam di Indonesia, rata-rata kritik keras dari kelompok moderat terhadap golongan fundamentalis adalah apa yang diimpor ke Indonesia berkenaan dengan Islam adalah kultur Timur Tengah. Namun, substansi Islam tentang damai, demokrasi tidak pernah menjadi praktik kebudayaan. Islam sebagai praktik kebudayaan tidak pernah diambil. Saya kira sosdem tidak bisa menggunakan cara itu dengan sekedar mengimpor *culture*-nya, tapi lepas dari konteks. Hanya saja, yang perlu diingat adalah ada karakter di kita yang proses transformasi dari feodalisme ke modernnya belum tuntas. Artinya, kita tidak bisa sekedar “memaafkan” *culture* itu, menyesuaikan *culture* bukan berarti memaafkan *culture* secara antropologis, tapi bagaimana kita bisa memberikan sosdem sesuai dengan konteksnya. Ini merupakan tantangan mengingat kita menghadapi sistem yang sangat fasistik, warisan Orde Baru. Di luar itu, alumni-alumni Orde Baru yang tidak menginginkan kemunculan sosdem. Terima kasih

#### Saiful Haq

Menyambung Bung Arie dan juga Bung Ivan tadi, produk kebijakan-kebijakan yang ada sebenarnya sekedar populis saja. Ini karena mereka tidak dibimbing oleh organisasi dan ideologi yang baik sehingga ia tidak bisa disebut sebagai produk ideologi karena ketiadaan prasyarat tadi. Oleh karena itu, dalam pemahaman saya, ini seperti yang dijelaskan oleh Wolfgang Merkel mengenai perbedaan formal demokrat dan substantif demokrat. Jika prosedurnya berjalan, maka kita bisa melihat apakah substansinya memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan atau struktur-struktur sosial yang marginal sehingga mampu meningkatkan kehidupan mereka. Namun, menurut saya, jika kita melihat hal itu, maka kita akan gagal dalam membaca konteks pertarungan gagasan. Dalam pandangan saya, pertanyaan inti sebenarnya adalah mengapa harus sosdem? Dengan kata lain, penelitian ini harus menjawab mengapa harus sosdem? Oleh karena itu, saya melihat spektrum ideologi teman-teman 1998 maka bisa kita lihat bahwa mereka sebenarnya anti semuanya, tapi tidak pro apa-apa. Sampai sekarang saya kira hal itu masih terjadi. Mereka anti semuanya, tapi tidak pernah

kemudian secara tegas mengatakan pro apa? Meskipun demikian, saya melihat ada *progress* karena politik anti semuanya ini menolak politik antara. Selain itu, politik anti ini juga gagal karena tidak kompetitif terhadap sistem politik yang lebih liberal. Ia juga gagal dalam *positioning* karena selalu berada dalam politik marginal. Ini terjadi karena politik oposan akan berada di luar *mainstream* sehingga akan selalu berada dalam kelompok marginal. Model seperti ini, pada satu sisi, akan cenderung berorientasi pada militansi politik, sedangkan di sisi lain pengorganisasiannya sangat radikal dan eksklusif.

Beberapa memang sudah ada kemajuan karena beberapa organisasi sudah mulai pro sesuatu. Oleh karena itu, dalam pandangan saya, di sinilah, letak pertarungan jika penelitian ini ingin dilakukan. Sebagai contoh, teman-teman yang bergerak di isu tanah, substansinya bisa jadi sosial demokrat, tapi dalam realitasnya liberal karena melemahkan negara. Nah, dalam situasi semacam ini, kita pro pada negara, tapi negara yang semacam apa kira-kira, dan juga pasar seperti apa? Dengan demikian, kita tidak akan terjebak pada isu-isu populis sebagaimana yang sudah dalam banyak kebijakan publik.

#### Ivan A. Hadar

Jika kita ingin menggunakan buku teks, maka sosdem sebenarnya adalah demokrasi, keadilan, dan solidaritas. Tadi, Arie telah mengemukakan bahwa karena pengalaman-pengalaman Orde Baru maka negara dianggap menjadi momok. Oleh karena itu, antinegara. Meskipun demikian, di tempat-tempat lain juga ada. Dalam konteks sosial demokrasi, intervensi negara harus diletakkan dalam kerangka menjaga tiga hal tadi, yakni demokrasi, keadilan, dan solidaritas.

Kita mempunyai dua organisasi, yakni perkumpulan sosdem dan satu lagi yang sekarang menjadi mayoritas dan mungkin suatu saat "mengkooptasi" perkumpulan sosdem, yaitu Populis Institute.

Silahkan.

#### Willy Aditya

Terima kasih Bang Ivan. Apa yang tadi disampaikan Mas Arie sebenarnya ada yang perlu kita pertajam,

yakni masalah periodisasi. Mas Arie barangkali masih ingat perdebatan ideologi di kalangan teman-teman tahun 1980-an akhir, **nasdemka** dan lainnya mengatakan **sosdemka**. Menurut saya, itu puncak perdebatan yang mungkin bisa kita lacak nantinya jika kita membuat penelitian. Yang pertama terjadi perdebatan di ujung-ujung kelompok diskusi guna menjawab dimana kita akan melandaskan ideologi. Ekspresi membakar buku tidak hanya ekspresi dari represivitas, tapi juga ekspresi atas, "Sudahlah, kita sudah selesai dengan perdebatan buku, teori, dan lain sebagainya. Sekarang, saatnya turun ke jalan". Jadi, tinggalkan teori-teori ini, tinggalkan kampus, tinggalkan buku, kita harus masuk ke advokasi. Di situlah, terjadi diskusi dimana teman-teman akhirnya ada yang terjun ke buruh, petani, dan lain sebagainya. Di sisi lain, ada juga yang masih bertahan di kampus. Oleh karena itu, dalam pemahaman saya, ini merupakan *milestone* yang harus kita dokumentasikan.

Berikutnya, tadi, Bang Ivan mengatakan bahwa demokrasi, keadilan, dan solidaritas yang menjadi kunci sosial demokrasi. Namun, sebenarnya, kita bisa melihat dari perspektif lain bahwa bisakah kita melihat fragmentasi atau ketidakjelasan kita dalam mengklasifikasi spektrum dari apa yang tadi Mas Arie bilang sebagai "kiri" dan Martin bilang "progresif". *Pertama*, kita berbicara mengenai strateginya bagaimana? Kedua, ketika kita berbicara mengenai sosial demokrasi maka kita tidak bisa lepas dari yang namanya agensi. *Terakhir*, pandangannya tentang negara dari sosialisme, komunisme, dan sosial demokrasi. Tentunya, perdebatan itu tidak bisa lepas dari cara kita memaknai negara.

Dalam spektrum ideologi, saya kira bahwa kontekstualisasi ini dilakukan banyak sekali. Revolusi Bolshevik, misalnya, dicoba atau diadopsi oleh Mao yang ternyata 1 juta buruh dibantai di Shanghai. Mao *stress* karena apa yang dia bawa ke China bukan suatu *avant garde*-isme buruh. Namun, agensinya adalah petani. Saya kira kontekstualisasi ini juga dilakukan oleh *founding fathers* kita bahwasannya Soekarno berbicara tentang Marhaenisme, dan Tan Malaka berbicara mengenai Murba. Namun, ada yang menarik sebagaimana tadi dikemukakan oleh Martin bahwa kita tidak berpretensi mencari kesepakatan bersama, tapi



basis yang mereka gunakan adalah agensinya.

Jika kita lacak kelahiran ideologi sosial demokrasi di Indonesia adalah *Indische Sociaal-Democratische Vereeniging* (ISDV). Di situ, basisnya jelas. Ada organisasi buruh kereta api. Mereka selalu memulainya dari buruh yang progresif. Nah, mungkin ini yang, pertanyaan saya, kemudian apakah karena ketidakjelasan basis struktur kita karena sebenarnya proses industrialisasi kita belum pernah selesai. Jika kita menilik pandangan orthodox sosial demokrasi, maka agensinya buruh. Oleh karena itu, dalam pandangan saya, mengapa sosdem tidak hidup-hidup di Indonesia karena sosdem hidup di kalangan pelajar bukan di kalangan buruh. Dengan demikian, jika saya boleh bertanya kepada Mas Arie, maka apakah agensi ini bisa mengambil *prototype* pelajar atau mahasiswa? Ini karena bagaimanapun ideologi memerlukan agensi.

Kedua, secara politik. Tawaran Bang Ivan tadi menarik. Apakah kita membutuhkan Partai Sosial Demokrasi? Nah, saya mempunyai pengalaman mengi-

niasi banyak *front* dan yang terakhir blok kiri. Di situ, saya kumpulkan teman-teman dari Partai Rakyat Demokratik (PRD), Partai Perserikatan Rakyat (PPR), dan saya juga kebetulan Sekjen PRP waktu itu. Bersama dengan Martin, Mas Arie, dan juga Bang Faisal membangun Pergerakan Indonesia (PI) sehingga saya pikir ini khas karena fragmentasinya di dalam pikiran.

Terakhir, bicara dalam konteks organisasi, bagaimanapun realitas gerakan sosial demokrasi dengan gerakan buruh belum ada proses ideologisasi yang jelas. Pengalaman saya dua tahun di Tangerang memberikan refleksi bahwa basis buruhnya tidak mendukung. Di tempat itu, buruh-buruhnya adalah buruh tekstil dan bukannya buruh dari industri manufaktur yang *educated* yang membuat proses ideologisasinya lebih mudah. Di Tangerang, berdasarkan pengalaman saya, hal ini sama sekali tidak terjadi. Saya kira ketika kita berbicara mengenai format organisasi sosial demokrasi akan seperti apa? Nah, saya kira itu catatan dari saya. Terima kasih.



### Ivan A. Hadar

Mungkin sebagai gambaran dari yang saya sampaikan tadi bahwa partai politik yang saya maksudkan bukan untuk kebutuhan jangka pendek. Namun, semacam “dapur” penggodokan ideologis. Kita belum sampai pada tahap mengerahkan massa untuk merebut kekuasaan. Namun, intinya seperti yang tadi disampaikan Arie ada *ndak* ideologi sosdem yang kontekstual Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa menjadi semacam “bible” bagi perjuangan sosial demokrasi di Indonesia karena selama ini belum ada. Yang ada adalah hal-hal yang lebih sporadis. Oleh karena itu, mungkin kita akan membuat semacam “trademark” sosial demokrasi di Indonesia yang bisa berasal dari berbagai pikiran. Pikiran-pikiran yang *fragmented* itu kita godok bersama-sama, dan saya pikir itu lebih mungkin dibandingkan dengan membentuk ormas atau partai politik yang ditujukan untuk merebut kekuasaan. Oleh karena itu, jika tidak ada penelitian yang sifatnya mendalam, maka barangkali persoalannya akan sama 10 tahun kemudian. Bagaimana mencari sesuatu yang menjadi rujukan? Nah, kita akan membuat sejarah besar dalam dekade ke depan, sesuatu yang mungkin bersifat akademik, tapi bersifat populer. Mungkin ada yang sifatnya intelektualistis, misalnya, ideologi global dan kaitannya dengan Indonesia. Namun, ada

juga rujukan-rujukan yang intinya bagaimana ideologi sosdem diimplementasikan ke dalam jaminan-jaminan Jamsostek, kaitannya dengan kesehatan, UMKM, pendidikan, dan lain sebagainya.

Jika ada gambaran besar ini, dan kemudian kita masuk ke dalam isu-isu yang sifatnya, katakanlah, *urgent* dilakukan di Indonesia maka akan menjadi yang tadi saya katakan, “membuat sejarah besar”.

### Anton

Saya harus mengakui lemah di teori. Namun, berdasarkan pengalaman saya tampaknya sulit untuk memperjuangkan keadilan jika ia hanya di kepala, dan tidak menjadi bagian dari emosi kita. Dalam pandangan saya, rasanya akan lebih mudah untuk memperjuangkan keadilan jika ia telah menjadi bagian dari emosi kita. Jika tidak, maka akan sulit. Jadi, penting untuk memahaminya dan kemudian memperjuangkannya secara positif karena mendefinisikan keadilan itu sendiri relatif sulit.

Selanjutnya, saya merasa bahwa kita mesti lebih menghormati yang lokal, yang lebih nyata sifatnya. Lokal bersifat material dan empiris. Sebagai contoh, kita melakukan riset sosial ekonomi di enam distrik, dan kita menemukan bahwa visi mereka sangat maya. Padahal, di Manokwari, misalnya, ada busung lapar.

Jadi, apapun menurut saya hormat pada lokalitas menjadi penting karena apa gunanya, misalnya, kita membicarakan tata kelola pemerintahan lokal, tapi tidak berangkat dari sesuatu yang empiris. Oleh karena itu, kita harus mendorong dari yang bersifat empiris atau lokal tadi.

### Ivan A. Hadar

Baik, jika kita hendak berbicara mengenai *road map*, jika ingin banyak, maka banyak sekali. Artinya, memang ada skala prioritas. Jika berbicara mengenai busung lapar, maka prioritasnya sangat *urgent*. Dalam kaitan ini, kita bisa mempengaruhi pemerintah lokal untuk melakukan intervensi langsung, dan lain sebagainya. Namun, yang lebih realistis seperti dikemukakan tadi bahwa seperti kawah candradimuka sehingga harapannya orang-orang yang pernah belajar di sini mempunyai pemahaman yang komprehensif mengenai “ruh” atau dasar sosial demokrasi. Oleh karena itu, misalnya, Nasdem menang pemilu dan Martin menjadi menteri di sana maka ekonomi kerakyatan akan mempunyai gambaran yang jelas. Pun dengan, misalnya, jika Bang Amir menjadi Menteri Komunikasi maka *concern*-nya bukan memblokir situs porno, tapi lebih ke sesuatu yang lebih *urgent*. Nah, dapur ini bisa berwujud partai politik karena partai politik penting meskipun menyalahi ruhnya karena sebenarnya tidak berpretensi merebut kekuasaan secepat mungkin. Namun, ia menggodok ideologi ataupun orang-orang dan kemudian menyebarluaskan gagasan atau ideologi tadi kemana saja. Barangkali, akan menjadi lebih gampang karena jika sudah masuk ke dalam perebutan kekuasaan, maka orientasinya bisa menjadi sangat lain. Riset ini bisa menjadi cikal-bakal yang sifatnya acuan yang lebih general. Namun, kita akan mencoba untuk secara detil membahas hal-hal yang berkembang. Jika hal ini terjadi, maka akan memberikan kontribusi besar yang bahkan akan mampu membangun sejarah baru karena seiring berjalannya waktu banyak tokoh dan serpihan pikiran, tapi tetap belum menemukan ideologi sosdem yang kontekstual Indonesia belum ada.

### Rifqi Hasibuan

Saya akan menambahkan sedikit saja. Jika ada yang

salah, maka Mas Arie atau Pak Willy bisa meluruskan. Sosdem itu sendiri jika kita lacak historisnya maka kita akan menemukan bahwa akarnya sebagai satu bentuk “jalan tengah” ketika berbicara mengenai pertentangan dua ideologi, yakni komunisme yang menuhankan persamaan, dan liberalisme yang menuhankan kebebasan. Sosial demokrat muncul sebagai antitesis atas dua-duanya yang menyatakan bahwa kebebasan tanpa batas adalah tidak manusiawi, sedangkan kebersamaan secara mutlak akan melanggar hak-hak asasi yang sifatnya individual. Oleh karena itu, dalam kaitan ini, kita perlu mencari sebuah persamaan pandangan tentang kebebasan yang haram itu seperti apa dan persamaan yang haram itu seperti apa? Artinya, ada batas toleransi tertentu terhadap kebebasan dan ada batas toleransi tertentu terhadap persamaan. Itu sejarah landasan nilainya. Dalam praktiknya, bagaimana kita sampai pada konklusi tersebut maka kita perlu melihat juga keberadaan ideologi sosdem ini berkembang karena waktu itu ia berkembang dalam dua kutub ideologi yang saling bersaing, maka ia muncul sebagai “ideologi alternatif”. Namun, jika kita melihat kondisi sekarang dimana terjadi deideologisasi besar-besaran, maka kita harus mencari cara lain untuk mengukuhkan identitas sosdem bukan dari sebuah alternatif-alternatif kontekstual, tapi dari bagaimana kita mempraktikkan nilai-nilai yang kita anggap bebas dan persamaan terbatas dalam konteks Indonesia. Pertanyaan selanjutnya adalah praktik apa yang sudah kita lakukan di sini sementara kita masih berkuat pada wilayah-wilayah diskursus.

Dalam sejarahnya, sosial demokrasi dibangun oleh dua kelompok, yakni aktivis dan teknokrat. Jadi, ada dua kelompok besar itu yang mempengaruhi keberadaan ideologi sosdem. Di Indonesia, saya kira kelompok teknokratnya agak minim karena perdebatan mengenai sosdem banyak terjadi di kalangan aktivis. Nah, bagaimana agar ia lebih hidup. Oleh karena itu, ketika kita berbicara teknokrat maka kita seharusnya tidak hanya berbicara pada kelompok-kelompok profesional untuk mengajak mereka menjadi seorang sosdem. Namun, bagaimana sosdem mulai masuk ke dalam kontestasi politik, misalnya, kita terlibat dalam pemilihan dan bagaimana kita mengontrol kebijakan-

kebijakan politik orang yang kita dukung. Dari situ, akan terjadi sebuah dinamika yang lebih riil dibandingkan dengan kita mencari batasan-batasan yang bersifat normatif tadi. Saya kira itu, terima kasih.

### Saiful Haq

Menambahkan saja. Sebenarnya, menarik jika kita melihat, misalnya, SPD di Jerman ketika direpresi oleh Nazi mereka muncul kembali tidak dalam bentuk partai dan segala macamnya. Mereka muncul dengan tawaran-tawaran mengenai Jerman baru, misalnya, sehingga bukan konsolidasi organisasi, tapi gagasan dalam bentuk tawaran Jerman Baru. Oleh karena itu, jika kita akan melakukan riset ini sekaligus melihat historisnya, tapi juga menawarkan Indonesia Baru dalam konteks gagasan sosial demokrasi. Ini juga terjadi ketika, misalnya, pasca-Mao maka tawaran Cina Baru dan di beberapa tempat juga muncul tawaran-tawaran semacam itu. Dengan demikian, menurut saya, selain memikirkan agensinya, maka perlu juga untuk dipikirkan proposal apa yang bisa ditawarkan oleh sosial demokrasi. Sama ketika Aidit menutup Partai Komunis Indonesia (PKI) lama dan menawarkan PKI baru. Aidit hampir tidak pernah menyebutkan kaitannya dengan PKI lama, tapi ia hadir dengan tawaran baru sehingga mampu mengkonsolidasikan organisasi karena proposalnya memang sangat dibutuhkan sebagai platform bersama. Saya kira hal ini juga perlu dipikirkan dalam riset ini. Terima kasih.

### Ivan A. Hadar

Secara global, setelah komunisme runtuh, isu sekarang adalah pemilahan dan pemilihan istilah kapitalisme. Dulu, misalnya, kita mengenal Reaganisme dan Thatcherisme, tapi sekarang mungkin dalam bentuk neoliberalisme. Kemudian, ada kapitalisme yang, katakanlah, di Jerman, misalnya, ada *social welfare* atau ekonomi pasar sosial. Di negara-negara Scandinavia sangat jelas. Jepang mempunyai apa yang disebut sebagai identitas sebagai *corporate capitalism*. Di Jepang, orang yang bekerja mayoritas sepanjang umurnya hingga pensiun loyal terhadap perusahaan dengan jaringan luas hingga perusahaan-perusahaan pendukungnya.

Kita mengetahui perkembangan terakhir dimana Cina yang komunis, tapi berkembang dimana ada intervensi negara yang cukup kuat, tapi juga ada kebebasan di beberapa daerah. Di Brazil dimana Bang Amir pernah ke sana, ada beberapa sejarahnya yang menarik. Porto Alegre barangkali menjadi salah satu tombak ketika awalnya berangkat dari perencanaan anggaran yang bersifat partisipatif. Sebenarnya, kita ingin mencari Indonesia seperti apa? Indonesia dari segi geografis, jumlah penduduk, sumber daya alam, dan sebagainya mestinya menimbulkan kapitalisme yang kontekstual Indonesia. Ini karena tanpa itu saya kira akan sangat sulit. Katakanlah, membangun spirit yang membangun ciri khas Indonesia hingga ke kebudayaan maka jika kita memunculkan hal tersebut melalui riset ini, minimal memunculkan sesuatu gagasan besar tentang kapitalisme Indonesia yang berkait

Sebenarnya, menarik jika kita melihat, misalnya, SPD di Jerman ketika direpresi oleh Nazi mereka muncul kembali tidak dalam bentuk partai dan segala macamnya. Mereka muncul dengan tawaran-tawaran mengenai Jerman baru, misalnya, sehingga bukan konsolidasi organisasi, tapi gagasan dalam bentuk tawaran Jerman Baru. Oleh karena itu, jika kita akan melakukan riset ini sekaligus melihat historisnya, tapi juga menawarkan Indonesia Baru dalam konteks gagasan sosial demokrasi. Ini juga terjadi ketika, misalnya, pasca-Mao maka tawaran Cina Baru dan di beberapa tempat juga muncul tawaran-tawaran semacam itu. Dengan demikian, menurut saya, selain memikirkan agensinya, maka perlu juga untuk dipikirkan proposal apa yang bisa ditawarkan oleh sosial demokrasi.

dengan sosialisme maka akan menjadi *big bang*. Nah, nantinya riset ini kita harapkan akan menjadi bahan diskusi ramai atau pemicu di diskusi yang lebih luas sehingga akan menimbulkan kejutan. Jika tidak, maka hanya akan berkutut diantara kita saja. Termasuk di dalamnya, tentu saja, memperbaiki persepsi yang sesat sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Arie.

### Arie Sujito

Pengalaman perubahan sosial di Indonesia baik ideologi kapitalisme, liberalisme, dan sebagainya tidak akan cukup secara langsung memiliki kecocokan tanpa melalui proses sosiologis. Contoh paling menarik adalah Indonesia pasca-otoritarianisme dimana format politik liberal yang diimpor habis-habisan mulai dari undang-undang no. 32 1999 banyak sekali terjadi resistensi. Ini terjadi bukan hanya pada praktik demokrasi prosedural, tapi undang-undang disusun tidak berdasarkan pada fakta-fakta sosiologis. Dengan kata lain, proses kita untuk menghasilkan konsensus dalam bentuk hukum, format politik tidak melalui cara-cara yang partisipatif. Sama halnya, misalnya, di Indonesia mayoritas muslim, tapi usaha untuk melakukan proses transformasi dengan sekedar mengadopsi kultur Timur Tengah tidak diterima. Kekalahan partai-partai Islam terjadi karena alasan itu. Jika Sosdem menggunakan cara yang kurang lebih sama, maka saya yakin akan muncul banyak resistensi di masyarakat. Apalagi kita menghadapi sesat pikir yang direproduksi oleh Orde Baru beserta alumnya, bahwa sosial demokrasi sama dengan komunisme. Dengan demikian, hambatan berada dalam dua level, yakni para alumni Orde Baru dan *civil society* yang tidak *compatible* karena transformasi tidak berlangsung. Oleh karena itu, menurut saya, yang sekarang perlu dipikirkan dengan konteks ke-Indonesiaan adalah bagaimana mencermati dan menjelajahi praktik-praktik sosial demokrasi di Indonesia yang kemudian dikomparasikan dengan di Eropa. Dalam pandangan saya, ini akan jauh lebih berharga sehingga bayangan saya adalah pelajaran sejarah, perkembangan sosiologis dan peluang-peluang politik bisa kita manfaatkan dengan baik. Saya membayangkan secara sederhana bahwa energi kita untuk melakukan transformasi politik di Indonesia mengalami kegagalan

karena terlalu banyak mengalokasikan sumber daya pada pembangunan negara. Berapa jumlah APBN untuk pemilu dan pemilukada yang membenahi politik representasi. Namun, usaha-usaha yang kita lakukan untuk menggali praktik demokrasi di level *society* tidak banyak. Akibatnya, yang terjadi adalah demokrasi formal yang begitu mewah, tapi tidak mempunyai legitimasi karena proses yang sejak awal terlalu dialokasikan pada pembangunan-pembangunan di atas tadi. Jika riset ini bisa menggali praktik-praktik yang bisa menjadi rujukan masyarakat sipil, maka peluang sosial demokrasi akan semakin besar. Saya ingin menegaskan hal ini karena jika kita berjalan-jalan dari Sabang sampai Merauke maka kita bisa mengatakan ada yang sama, tapi ada yang bertentangan. Nilai-nilai yang akan kita transformasikan dalam bentuk nilai-nilai sosial demokrasi dalam struktur yang beragam harus dimulai dari struktur yang beragam itu seperti apa?

Kemudian, mengenai lokalitas. Memang ada temuan-temuan yang secara empiris bisa kita pelajari di tingkat lokal meskipun ada juga yang negatif. Namun, praktik-praktik positif itu akan jauh lebih berharga jika kita bisa memanfaatkan untuk membangun struktur di aras lokal. Terima kasih. Saya kira ini hanya respon saja.

### David Krisna

Kegelisahan ini mungkin tidak akan terutarakan secara sistematis. Barangkali, wacana atau khutbah-khutbah sosdem yang terserak di sana-sini tidak terhimpun dengan baik. Bagi saya, penting adanya sebuah kitab atau *bible* seperti tadi disampaikan oleh Mas Ivan sebagai rujukan untuk panduan gerakan sosdem ke depan. Namun, jika ini tidak didukung oleh media yang masif dan menurut saya itu yang paling penting- maka akan kurang gaungnya. Oleh karena itu, kita memerlukan orang yang mampu menyuarakan sosdem di media, dan jika itu terjadi maka akan menjadi *big bang* sebagaimana tadi disebutkan. Saya kira di Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama ada tokoh-tokoh sosdemnya, tapi masih berserak. Jika mereka mau mengatakan dirinya sosdem, maka saya kira akan menjadi luar biasa. Barangkali, akan sulit, tapi gagasan Mas Ivan menurut menarik untuk digerakkan.

### Mian Manurung

Kita sering diskusi mengenai sosial demokrasi Indonesia yang mana? Dari *founding fathers* kita, kita bisa menyebutkan bahwa mereka sosdem karena mempunyai pemikiran sosdem. Saya kira merekalah yang pertama kali mendiskusikan mengenai dasar hukum negara ini, Undang-Undang Dasar 1945.

Di negara-negara Jerman atau negara-negara di Scandinavia yang ada sosial demokrasi, mereka tidak lari dari undang-undang dasar. Menurut saya, mengapa tidak ada lagi orang-orang seperti Soekarno, Tan Malaka, Hatta, dan Syahrir karena tidak pernah membahasnya dari dasar negara. Jadi, saya kira penting sekali jika memang penelitian ke depan ini tentang sosdem Indonesia maka kita tidak boleh lari dari UUD 1945. Itulah yang harus kita jabarkan secara lebih luas karena di semua pasal dan ayat serta paragraf dalam UUD 1945 itu ada di setiap pasalnya yang akan kita perjuangkan bersama-sama.

Saya kira kita tidak boleh lari lagi dari situ, Undang-Undang Dasar dan Pancasila yang tadi juga telah disinggung Mas Arie. Jika, misalnya, kita mencari gagasan sosdem Indonesia dari tokoh-tokoh itu, maka akan berkembang di seputar gagasan itu saja. Namun, tidak berbicara dari dasar negara ini-nilai-nilai luhur yang menjadi dasar negara ini terbentuk. Itu saran saya karena di manapun baik di Jerman maupun di negara Scandinavia tidak akan lari dari undang-undang dasarnya.

### Sukma Widiyanti

Menyambung dari Kak Mian, kita ini gerakan intelektual, kultural dan juga politik. Namun, pertanyaannya adalah gerakan politik yang secara konkret seperti apa? Kita saja masih ragu mengenai pembentukan Partai Sosial Demokrat, padahal mestinya tidak begitu. Kita bisa saja merencanakan pembentukan partai politik untuk sepuluh atau lima tahun ke depan, tapi kerjanya sudah dimulai sejak sekarang. Nah, kemudian mengenai akar sejarah sosdem di Indonesia, selain apa yang disampaikan atau gagasan-gagasan dari tokoh-tokoh yang tadi sudah disebutkan, kita juga mempunyai nilai-nilai sosial demokrasi yang mengakar dari budaya Indonesia. Saya rasa hal ini kurang terek-

splorasi dalam pembahasan para intelektual sosdem ini bahwa, misalnya, dalam masyarakat Minang ataupun Jawa mempunyai bibit-bibit nilai sosdem yang akan menjadi orisinalitasnya Indonesia. Ini usulan saya. Terima kasih

### Martin Manurung

Saya ingin mengomentari dari apa yang tadi disampaikan sosdem sebagai jalan tengah. Entah mengapa jika saya mendengar “jalan tengah” sepertinya agak terganggu. Ini karena, dalam pandangan saya, ide, pemikiran, dan eksperimen mengenai sosial demokrasi sudah ada sebelum adanya *middle way* atau *third way* ini ada. Oleh karena itu, penelitian ini harus agak hati-hati untuk tidak “menaruh orang keluar”, tapi justru bagaimana hasil karya ini semua pemikiran sosialisme dan sosialisme demokrasi mempunyai ruang tersendiri dengan segala pemikirannya dan gradasinya. Saya lebih cenderung mengemukakan bahwa sosialisme demokrasi lebih sebagai sebuah nama generik dibandingkan sebagai sebuah nama spesies karena memang sejarahnya seperti itu. Jadi, sosdem bukan, katakanlah, sempalan pemikiran. Ketika ada Revolusi Bolshevik maka yang lahir adalah buruh sosial demokrasi. Saya ingin melihat dari perspektif itu sehingga kita mempunyai kekayaan pemikiran, gagasan, dan eksperimen baik yang gagal maupun berhasil dari apa yang dinamakan dari sosialisme dan sosialisme demokrasi. Jadi, bukan jalan tengah karena, dalam pemahaman saya, jalan tengah itu bersifat kompromistis. Padahal, mestinya tidak demikian.

Ada seorang teman yang membuat disertasi gerakan buruh mengatakan bahwa buruh harus mengerti kepentingan majikan, dan majikan harus mengerti kepentingan buruh. Nah, menurut saya, ini kompromistis atau harmoni. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam menggunakan istilah jalan ketiga atau jalan tengah. Itu pendapat saya. Terima kasih

### Ivan A. Hadar

Tadi, Mas Arie mengatakan bahwa partai Islam kalah karena menggunakan budaya Timur Tengah. Apakah hal ini merupakan fenomena baru? Apakah hal ini ada kaitannya dengan globalisasi ataupun



media massa dimana segelintir orang bisa populer? Saya tidak tahu, dan mungkin ini bisa menjadi suatu hipotesis bahwa Indonesia dalam beberapa tahun lalu lebih memberikan identitas dari aspek kultural atau bagaimana?

### Arie Sujito

Saya memandang bahwa beberapa gerakan sosial atau politik itu kalah atau tidak berhasil justru karena tidak membaca realitas itu. Ini penting buat kita agar tidak menilai prospek sosdem di Indonesia hanya pada konteks Orde Baru dimana orang menginginkan pembaruan ideologi. Selain itu, kita juga harus berfikir bahwa bagaimana arus perubahan sepuluh tahun ke depan itu dimana letak dan relevansinya sosdem sehingga dalam rentang sejarah tadi kita bisa melacak jejak sejarah dimana popularitas sosdem sebagai ideologi yang ditawarkan oleh *founding fathers* dan gerakan *soft subversive* yang terjadi pada era Orde Baru serta sekarang krisis demokrasi yang berkepanjangan itu.

Nah, dari perjalanan yang ada, sosdem selalu menganalisis dalam patahan-patahan satu dengan lainnya

sehingga ketika ada momentum gagal dimanfaatkan dengan baik. Oleh karena itu, dalam bayangan saya, perubahan dalam sepuluh tahun ke depan itu seperti apa, dan sosdem dalam spektrum yang sudah berubah itu akan hadir seperti apa? Saya ingin menghadirkan salah satu contoh bahwa secara kuantitatif masyarakat di Indonesia adalah Islam, tapi tingkat pemahaman Islam sebagai basis politik tidak diikuti oleh analisis sosiologis bahwa Islam beragam. Jika Gertz membuat tiga tipologi itu (Santri, Priyayi, dan Abangan, red) yang dimaksud santri itu juga beragam. Oleh karena itu, PKB tidak menang meskipun menggunakan basis pesantren karena pesantren itu sendiri telah mengalami perubahan. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan strategi sekarang ini yang terjadi faksionalisasi, Keadilan dan Sejahtera, saya kira apa yang dilakukan faksi Sejahtera merupakan usaha pragmatisme guna menyesuaikan struktur yang ada karena jika tidak pragmatis tidak akan mendapatkan suara. Namun, kelompok keadilan tidak mau karena dianggap sudah melenceng. Menurut saya, sosdem harus belajar semacam itu.

Kita juga bisa melihat bagaimana Partai De-

mokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan kelompok abangan bisa menang. Namun, kemenangan PDIP tidak disebabkan oleh kehebatan dia dalam memenangkan struktur, tapi struktur sosial masyarakat itu sebagian besar abangan dalam orientasi politik. Jika PDIP mampu memanfaatkan struktur seperti ini, maka ia akan bisa menjadi juara satu.

Nah, bayangan saya, cara kita membaca struktur masyarakat menjadi faktor penting yang mempengaruhi perkembangan sosial demokrasi. Soekarno populer waktu itu karena mampu memanfaatkan sentimen anti kolonialisme, dan struktur kemiskinan dan ketidakadilan memungkinkan hal itu berproses. Nah, persaingan politik juga terjadi, tapi sebagian besar melawan kolonialisme. Bayangan kita juga strategi sosdem ke depan harus mempunyai konteks seperti itu. Analisis atau cara kita membaca masyarakat akan mempengaruhi pilihan-pilihan strategi untuk mengembangkan sosial demokrasi pada masa yang akan datang.

#### Amir Effendi Siregar

Apa yang kita diskusikan malam ini sebenarnya adalah usaha untuk melakukan sebuah studi untuk melacak jejak sosial demokrasi? Tadi, Martin, Arie dan juga Mian bisa banyak cerita mengenai para *founding fathers* kita. Ini sebenarnya sebuah proses. Namun, ketika kita berbicara mengenai sebuah prospek, maka tidak bisa kita lakukan jika hanya bersandar pada apa yang telah terjadi. Kita rasanya perlu memberikan suatu studi kasus yang konkret, nyata. Ini, yang menurut pemikiran saya, pragmatisnya suatu ideologi itu, yakni bagaimana studi ini juga dilengkapi dengan kasus-kasus yang konkret. Jika tidak, maka kita bisa juga pada sektor yang konkret, bidang ekonomi. Misalnya, jika bidang saya maka komunikasi dan media. Bagaimana kita melihat persoalan komunikasi dan media dan kemudian bagaimana sosdem memberikan jawaban atas persoalan di itu? Jika kita mempunyai kasus-kasus seperti ini yang nanti bisa kita pilih sebagai bagian dari studi, maka secara konkret kita bisa melihat bagaimana sosdem menjawab persoalan di Indonesia dalam, katakanlah, 5-10 tahun ke depan. Saya pikir itu, terima kasih.

#### Willy Aditya

Sebenarnya, sudah hampir ketemu. *Pertama*, strukturnya itu mulai dari prinsip-prinsip yang sifatnya universal. Selanjutnya, *kedua*, yang disampaikan Bang Amir, praktik-praktik baiknya. Banyak *best practice* di Indonesia, tapi seperti tadi disampaikan Martin seperti Jembrana sifatnya elitis. Saya kira kita tetap harus berpijak pada parameter sosial demokrasi yang sifatnya universal, yakni demokrasi, keadilan, dan solidaritas. Di sisi lain, kita tidak boleh berbasis pada kebijakan saja, tapi praktik pengorganisasiannya seperti apa. Apakah ada unsur pengorganisasian?

Saya kira spirit sosdem memang ada dimana-mana. Tadi, yang disampaikan Mbak Mian mengenai spirit, maka apa yang telah saya kerjakan mulai dari 1 Juni 2010 hingga 30 Januari 2011 adalah menjaring dari kampus demi kampus untuk membuat sebuah babon apa yang perlu kita restorasi jika kita anggap Pancasila sebagai idealisasi nilai-nilai sosial demokrasi. Saya keliling kampus-kampus di Indonesia untuk merumuskan hal tersebut.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, saya ingin mengatakan bahwa selain kekuatan ide, kita juga harus melihat tokoh-tokoh sosial demokrasi yang bisa dianggap sebagai, katakanlah, representasi dari sosial demokrasi. Dengan demikian, kita tidak lagi mengutip Tan Malaka, Sutan Syahrir yang dalam pandangan saya terlalu jauh. Jika kita berhasil menghadirkan tokoh-tokoh Indonesia kontemporer di bidang sosdem, maka anak-anak muda saat ini tidak lagi perlu mengutip tokoh-tokoh seperti Syahrir dan sebagainya.

#### Puji Rianto

Terima kasih. Saya ingin berangkat dari satu pertanyaan apakah sosdem bisa kita anggap sebagai sesuatu yang lebih bersifat substantif? Artinya, kita bisa saja merujuk kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau dia harus berada dalam terminologi sosdem? Jika ia bisa dilihat pada tataran yang lebih substantif, maka usulan Mbak Mian tadi menjadi relevan untuk mengkaji, katakahlah, dengan membuat sebuah ukuran, seberapa jauh Undang-Undang Dasar 1945 itu telah merefleksikan nilai-nilai sosial demokrasi. Ini penting karena sebagaimana tadi telah disinggung



bahwa kita berhadapan dengan civil society yang menganggap sosial demokrasi itu sama dengan komunis. Dalam konteks yang lebih spesifik, hal ini sebenarnya menyangkut dirkurus atau wacana. Wacana atau dirkurus ini bisa digunakan untuk mendisiplinkan orang. Dengan wacana, kita bisa mengendalikan pikiran dan juga tindakan, dan Orde Baru saya kira dengan sangat lihai menggunakan hal ini. Mas Arie tadi telah menyinggung bagaimana alumni-alumni Orde Baru terus mendesak hal itu. Saya kira itu merupakan bagian dari strategi wacana yang dilakukan oleh Orde Baru dan alumni-alumninya yang memang tidak menghendaki munculnya, katakanlah, yang tadi disebutkan sebagai ideologi alternatif. Wacana Pancasila pada masa Orde Baru pun saya kira tidak bisa dilepaskan dari strategi Orde Baru untuk mendisiplinkan warga negara karena interpretasi tunggal mereka atas Pancasila. Padahal, dalam ruangan inipun, kita bisa menerjemahkan Pancasila dalam pengertian yang mungkin justru bertolak belakang dari interpretasi Orde Baru.

Nah, ketika kita menyaksikan konstruksi sosial demokrasi sebagai komunis, maka pembahasan sosial demokrasi yang berpijak dari Undang-Undang dasar 1945 akan memudahkan kita dalam melawan diskursus Orde Baru yang mengkonstruksikan sosial demokrasi sebagai komunis. Bagaimanapun diskursus yang dibangun Orde Baru sedemikian kuat dan represif sehingga menghegemoni sebagian besar masyarakat

Indonesia. Oleh karena itu, ketika struktur politiknya sudah dibongkar, tapi mindset yang berkembang dalam masyarakat tidak berubah sebagai akibat diskursus yang dibangun selama bertahun-tahun oleh Rezim Orde Baru. Oleh karena itu, saya sepakat dengan Mbak Mian, penelitian ini harus pula melihat sejauh mana undang-undang dasar merefleksikan nilai-nilai sosial demokrasi. Kemudian, oleh karena kita tidak bisa dilepaskan dari pengaruh rezim Orde Baru maka tetap menjadi penting bagaimana diskursus Orde Baru tentang sosial demokrasi itu dibangun. Dari sini, lantas kita bisa memberikan rekomendasi atas strategi wacana atau diskursus apa yang bisa kita lakukan guna membongkar pikiran-pikiran sosdem yang dikonstruksikan sebagai komunis oleh Rezim Orde Baru beserta alumninya. Sebaliknya, kita bisa membangun suatu wacana baru bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam undang-undang dasar, misalnya, adalah sosial demokrasi. Bahkan, jika kita lihat pembukaannya sekalipun karena di alenia keempat, saya kira merefleksikan dengan sangat baik gagasan sosdem, yakni demokrasi, keadilan, dan solidaritas tidak hanya dalam konteks kewarganegaraan nasional, tapi juga internasional atau global.

#### **Ivan A. Hadar**

Saat ini, saya sedang menerjemahkan tadi yang disebut Daniel sebagai buku bacaan sosdem. Jilid per-

tama buku itu adalah landasan sosdem. Itu berkaitan dengan memperbandingkan kebijakan sosial demokrasi dalam berbagai hal dibandingkan dengan konservatisme, dibandingkan dengan liberalisme. Dibandingkan dengan kebijakan-kebijakan *green party* dan juga *ex-communism* dari partai di Jerman Timur jaman itu. Jika kita bisa membandingkan hal ini dengan konteks Indonesia yang tadi disampaikan Mian mengenai Undang-Undang Dasar, maka hal itu bisa saja. Intinya, sosdem ber-Tuhan untuk Indonesia seperti dalam Pancasila. Jilid kedua berkait dengan ekonomi. Ekonom I berkait dengan pasar, berkait dengan negara, isu-isu UMKM, kebijakan-kebijakan ekonomi yang berciri khas sosdem. Jilid ketiga lebih menukik ke bawah, isu-isu yang di Indonesia sangat *urgent* seperti pendidikan, jaminan sosial, dan lain sebagainya. Kemudian, karena lingkungan hidup juga sekarang sangat penting, maka ada yang membahas tentang lingkungan hidup. Ada satu jilid yang berkait dengan lingkungan hidup. Ada juga tentang globalisasi, respon sosial demokrasi berkaitan dengan perkembangan mutakhir. Jika kita mampu mensistematisasikan, katakanlah, bible untuk sosdem Indonesia dengan mengacu berbagai hal dalam buku itu. Sudah jam 9.30, barangkali, sosial demokrasi perwakilan Caracas mau menyampaikan sesuatu atau yang belum ada di dunia, sosial Yoga atau Daniel, silakan!

### Daniel Reichart

*Bang Amir, even we don't know each other for the long time but it did already seem that we could reach each other mind. Because some of the ideas you mentioned, also the others, how we can put things to practice. I'm very close with some ideas that we have discussed after workshop which we have together in Jogjakarta. I'm glad that we will know at sometime when we are in Kuala Lumpur next week take discusses in more detail. Just the outline of the idea that we had.*

*Two years ago we had one project in Germany about 'Choam Paul' Policy. We could use the theories of articles on different aspects of Choam Paul policy. And all follow the same structure, all have the same design, and all used scenarios as method to describe how these aspects of the spirit of Choam Policy could look like in the year 2020. ... But I*

*think the idea, the method behind this can be very interesting for the ideas that you have mentioned, you called the bible for social democracy. If we identify several field of policy that are relevant for us and then produce series of articles. Each article covers one field of policy, following the same term of reference, to same structure, same (question) how does education policy, economic policy look like from the social democracy perspective. And then, this will very interesting for the readers using scenarios, describe how do we want to have the economic policy in Indonesia, how do we want this to be in 2019. And how could be the scenario we don't like. But also realistic scenario. From these scenarios we can rewrite very concrete policy of 'choam', that are relevant right now. I'm 'fortunated' If you want to come to either one scenario or the other. So i think the method of this project that we did in germany on social Policy is different topic. But i think the method behind can be interesting to make the idea, which i like very much, that was written by you in this meeting and concrete in Indonesia. This big project will take a long time but 'just' think into the blue if we start this year and then publish series of articles over the year of 2013. At the end we have series of articles that covers the whole range of politics at the end of 2013. And if i'm not wrong, you 'worth in 2014'.*

*So i think it would not bad to have collection of articles like this in the end of 2013. I think we have time to discuss this, to meet a lot of thoughts, but i think the outline is very interesting. Thank you very much.*

### Ivan A. Hadar

*Baik Daniel, thanks Daniel to agree in this point. I think, I name it, we have a big bang in 3-4 years to have some kind of comprehensive social democracy study on policies, on issues what Indonesian need. I think it's a big, let say, activities and we have a lot of people will be interesting in this project. Thank you so much.*

Saya kira cukup, dan mari kita berdoa dalam pertemuan ini bahwa dalam tempo tiga tahun apa yang dikemukakan Daniel tadi dan yang kita inginkan bersama akan terjadi. *Thank you very much for interesting and productive discussion.* Kita berharap nanti Mas Puji akan membuat transkrip yang baik, dan mudah-mudahan ini akan menjadi *entry point* yang baik untuk melakukan riset dengan tahap-tahap yang nanti akan kita buat. Terima kasih, dan selamat malam.\*\*\*\*\*



# MENULIS BIBLE SOSIAL DEMOKRASI INDONESIA

Di Indonesia, wacana atau ideologi sosial demokrasi mengalami pasang surut. Pada masa awal-awal kemerdekaan, ideologi sosial demokrasi relatif berkembang dengan baik, menjadi bahan perdebatan di kalangan *founding fathers*, dan bahkan berdiri pula Partai Politik sosdem yang ikut dalam kontestasi pemilu. Pada masa Orde Baru, dalam bahasa Arie Sujito, ideologi sosial demokrasi mengalami “mati suri”. Ia tumbuh dalam gerakan-gerakan bawah tanah dalam bentuk *soft subversif*. Di era reformasi, ideologi ini mulai kembali berkembang meskipun ada usaha-usaha alumni Orde Baru untuk katakanlah menghalangi perkembangan sosial demokrasi. Berbagai *policy* sosial mengandung spirit sosial demokrasi, tetapi sayangnya hal itu belum bisa ikodifikasikan dengan baik.

Atas latar belakang itulah, sebuah studi yang mengupas tidak hanya secara historis, tapi juga praktik-praktik kontemporer dan proyeksi ke depan mengenai sosial demokrasi di Indonesia termasuk alternatif solusi menjadi penting. Dalam kaitan ini, menurut Arie Sujito, tugas kita adalah melacak apakah sosdem mempunyai akar historis di Indonesia? Kemudian, jika mempunyai

akar historis, maka gagasan besar dan tokoh-tokohnya seperti apa? Selanjutnya, dalam konteks masa kini, perkembangan atau pergantian dari satu rezim satu ke rezim yang lain apakah memperlihatkan sosdem yang semakin eksis atau semakin tidak jelas? Secara lebih umum, studi itu sebenarnya ingin melihat bagaimana perkembangan sosial demokrasi di Indonesia, dan prospeknya ke depan?

## “Bible” Sosial Demokrasi Indonesia

Tidak bisa dipungkiri, dengan melihat realitas yang ada sekarang ini, kebutuhan untuk melakukan suatu studi atau riset mengenai sosial demokrasi di Indonesia menjadi penting. Menurut Arie Sujito, studi semacam itu bisa memberikan semacam diagnosis bagi *policy* sosial apakah kaitannya dengan prinsip-prinsip sosdem ataukah belum. Riset ini bisa menjadi cikal-bakal yang sifatnya acuan yang kurang lebih general. Jika hal ini terjadi, maka akan memberikan kontribusi besar yang bahkan akan mampu membangun sejarah baru karena seiring berjalannya waktu banyak tokoh dan serpihan pikiran, tapi belum menemukan ideologi sosdem yang



kontekstual Indonesia belum ada. Lebih lanjut, menurut Ivan A. Hadar, jika studi ini bisa dilakukan, maka akan menjadi semacam bible bagi perjuangan sosial-demokrasi di Indonesia. Pikiran-pikiran atau kebijakan sosial demokrasi yang berserakan itu disistematisir sehingga akan menjadi buku panduan yang luar biasa bagi gerakan sosial demokrasi di Indonesia, sebuah big bang, menurut bahasa Ivan A. Hadar, yang mungkin akan menjadi bahan diskusi banyak pihak.

### Arah dan Area Studi

Dalam usaha menghasilkan sebuah bible, studi sosial demokrasi ini akan memerlukan waktu yang panjang, yang menurut Daniel, mungkin tiga atau empat tahun dengan membuat suatu artikel berseri. Wilayah studi mencakup berbagai topik, yang diantaranya sebagai berikut.

*Pertama*, studi mestinya juga menjawab mengapa sosdem yang harus dipilih sebagai ideologi. Ini berarti mencakup kritik terhadap neoliberalisme dan komunisme.

*Kedua*, studi harus melacak jejak historis perkem-

bangsan ideologi sosdem di Indonesia. Pelacakan ini bisa dimulai dari masa awal kemerdekaan atau orang lebih sering menyebutnya sebagai era Orde Lama, Orde Baru yang otoritarian dan represif, kemudian era reformasi. Arie Sujito menyebutnya sebagai fase-fase historis perkembangan sosial demokrasi di Indonesia. Dalam konteks Orde Baru, era tahun 1980-an menjadi penting karena pada masa itu pula terjadi perdebatan serius yang menurut Willy Aditya sebagai *milestone* yang layak dikaji- meskipun, menurut Arie Sujito tidak secara langsung menukik ke sosial demokrasi. Meskipun begitu, banyak ilmuwan muda gandrung dengan bacaan-bacaan kiri yang diinspirasi oleh gerakan *new left* di Amerika Latin. Pada masa ini pula, terjadi perdebatan mengenai strategi gerakan di tingkat *grass root* atau di kalangan akademisi. Pada satu sisi, ada yang masih menginginkan perdebatan menyangkut landasan ideologi, tapi ada yang menganggap bahwa sudah saatnya terjun ke lapangan untuk melakukan advokasi.

*Ketiga*, studi seyogianya juga harus pula menggali praktik-praktik *policy* sosial yang bernafaskan sosdem.

Di daerah-daerah, telah banyak dilakukan *policy* sosial yang mengandung nilai-nilai sosdem meskipun, barangkali, caranya elitis dan cenderung teknokratis. Sebagaimana dikemukakan Arie Sujito, sebagai sebuah ideologi, gagasan dan kebijakan sosial, sosdem di Indonesia sudah sebagai realitas jamak, dan berlangsung dalam fase yang panjang. Meskipun belum disebut sebagai *mainstream*. Oleh karena itu, jika riset ini bisa menggali praktik-praktik yang bisa menjadi rujukan masyarakat sipil, maka peluang sosial demokrasi akan semakin besar. Praktik-praktik sosial ini bisa dielaborasi sebagai sebuah *best practices* di Indonesia. Seperti ditegaskan oleh Amir Effendi Siregar, ketika kita berbicara mengenai sebuah prospek, maka tidak bisa kita lakukan jika hanya bersandar pada apa yang telah terjadi. Kita rasanya perlu memberikan suatu studi kasus yang konkret, yang, menurut Amir Effendi Siregar, merupakan sisi pragmatisnya ideologi.

*Keempat*, berangkat dari konstitusi atau undang-undang dasar. Dalam kaitan ini, Mian Manurung mengemukakan bahwa di negara-negara Jerman atau negara-negara di Scandinavia yang ada sosial demokrasinya, mereka tidak lari dari undang-undang dasar. Oleh karena itu, riset mengenai sosial demokrasi ini harus berpijak pada undang-undang dasar, sejauh mana sebenarnya konstitusi negara ini mengandung nilai-nilai sosial demokrasi. Sementara itu, menurut Puji Riando, studi sosial demokrasi dengan berpijak pada konstitusi akan memudahkan untuk melakukan perlawanan atas *discourse* yang didesakkan oleh Orde Baru. Oleh karenanya, studi juga harus melihat bagaimana *discourse* yang dikembangkan oleh Orde Baru mengenai sosial demokrasi di Indonesia.

*Kelima*, studi harus kontekstual. Arie Sujito mengemukakan bahwa pengembangan ideologi sosdem memerlukan strategi dengan mengkontekstualisasikan ideologi sosdem yang bertumpu pada struktur dan kultur ke-Indonesia-an, dan bukan hal yang bersifat pragmatis. Ini karena sosial demokrasi yang berkembang di Eropa mempunyai konteks yang perlu disesuaikan dengan struktur dan kultur di Indonesia. Seperti juga dikemukakan Sukma, kita juga mempunyai nilai-nilai sosial demokrasi yang mengakar dari budaya Indonesia, tapi belum tereksplorasi dengan baik. Sementara

menurut Martin Manurung, kita perlu membedah atau membongkar praktik sosial demokrasi di Indonesia bersama-sama meskipun tidak berpretensi membuat kesepakatan, tapi setidaknya kita bisa belajar bersama-sama. Dengan demikian, ketika berkiprah di bidang kita masing-masing maka akan mempunyai gambaran yang kurang lebih sama apa yang dimaksud dengan sosdem di Indonesia itu. "Kita harus hormat yang lokal," menurut Anton dari Populis Institute.

*Keenam*, studi harus mampu memberikan alternatif solusi. Dalam kaitan ini, jika kita akan melakukan riset ini sekaligus melihat historisnya, tapi juga menawarkan Indonesia Baru dalam konteks gagasan sosial demokrasi. Ini juga terjadi ketika, misalnya, pasca-Mao maka tawaran Cina Baru dan di beberapa tempat juga muncul tawaran-tawaran semacam itu. Dengan demikian, menurut saya, selain memikirkan agensinya, maka perlu juga untuk dipikirkan proposal apa yang bisa ditawarkan oleh sosial demokrasi.

## Penutup

Ada banyak alasan mengapa studi mengenai gagasan, praktik ideologi, dan juga kebijakan sosial harus dilakukan di Indonesia. Beberapa alasan telah disampaikan sebelumnya, termasuk arah dan wilayah studi. Namun, yang paling penting, studi itu penting dalam konteks menulis atau merumuskan sebuah, katakanlah, *bible* tentang sosial demokrasi di Indonesia. Dengan begitu, kita akan mempunyai buku petunjuk mengenai perjuangan sosial demokrasi di Indonesia. Usaha untuk menulis *bible* sosial demokrasi di Indonesia juga penting agar persoalan-persoalan yang sama, dalam pengertian di masa yang akan datang tidak lagi muncul pertanyaan apakah ada praktik-praktik sosial demokrasi di Indonesia.\*\*\*\*\*



# Menata Indonesia DALAM PUSARAN GLOBALISASI

IVAN HADAR

Koordinator Nasional MDGs 2007-2010;  
Wakil Pemred Jurnal SosDem



Setidaknya terdapat tiga kecenderungan global yang sedang dan akan saling berbenturan dalam waktu dekat ini. Dampaknya juga dirasakan di Indonesia.

Pertama, krisis ekonomi dunia akibat ambruknya (atau setidaknya goncangan dahsyat) kapitalisme finansial di bawah kepemimpinan AS, yang kemelutnya terus berlangsung dan meluas sampai saat ini, termasuk di Eropa. Kedua, perubahan geopolitik yang membawa pergeseran pusat kekuatan ekonomi-politik dunia – misalnya China dan Amerika Latin yang terus mencoba keluar dari hegemoni global pimpinan AS. Ketiga krisis lingkungan karena kerusakan alam – yang salah satu akibatnya adalah perubahan iklim global – serta pada saat bersamaan juga terjadi transformasi bumi untuk mencari keseimbangan baru.

Sementara itu kondisi domestik Indonesia, juga ditandai oleh tiga persoalan mendasar. Pertama, meski otoritarianisme militer otokratik di bawah kepemimpinan Soeharto telah lenyap, tetapi tradisi kekuasaan yang berpusat pada elit dan patron masih tetap bekerja dalam sistem politik Indonesia. Kedua, fenomena radikalisme-fundamentalis (agama) yang mendikte neg-

ara dan bisa menjadi sumber bencana yang tak kalah destruktifnya, yang akan menghancurkan Indonesia dari bawah. Ketiga, privatisasi ekonomi dan fundamentalisme pasar akibat globalisasi neoliberalisme yang telah menjadikan negara - yang seharusnya berperan sebagai penyedia kesejahteraan dan pusat pelayanan publik - dipreteli.

Globalisasi adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena. Revolusi dalam bidang komunikasi, misalnya, telah dengan cepat mengatasi (masalah) jarak dan memungkinkan berbagai interaksi, integrasi hingga ke penyeragaman dan benturan. Di sisi lain, teknologi baru juga telah ikut memunculkan sebuah sistem ekonomi yang didominasi oleh uang. Tak heran bahwa yang paling berperan dalam era globalisasi saat ini adalah *finance capital*, posisi yang sebelumnya dipegang oleh *industry capital*.

Bagi para pendukungnya, globalisasi (yang didominasi paradigma neolib) ini, diyakini sebagai “mesin kemakmuran”. Sementara bagi kelompok penentangannya, globalisasi identik dengan “ledakan profit, yang semakin menyengsarakan orang miskin.” Paling lambat sejak

demo spektakuler anti WTO (*World Trade Organization*) di Seattle, akhir 1999, menjadi jelas bahwa oposisi terhadap globalisasi neolib telah pula menglobal.

Sejak beberapa tahun terakhir, berlangsung *World Social Forum* (WSF) yang dimaksudkan sebagai pertemuan puncak anti-globalisasi neolib yang berlangsung setiap tahun. Tujuannya, menawarkan alternatif atau tantangan terhadap *World Economy Forum* (WEF) yang, setiap tahun, dilakukan di Davos, Swiss.

## PENATAAN GLOBALISASI

Para pendukung globalisasi (neolib), misalnya Bank Dunia dan IMF, menyuarakan kabar gembira, bahwa liberalisasi pasar otomatis memicu pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya meningkatkan kemakmuran. Namun, serta merta, pertanyaan yang muncul adalah, kemakmuran bagi siapa? Mereka yang kritis mengatakan bahwa 'berkah' globalisasi hanya bagi negara-negara industri kaya. Sementara itu, hanya sedikit negara berkembang - itu pun, hanya segelintir penduduknya - yang memperoleh berkah globalisasi. Hal ini, berkaitan erat dengan pertanyaan, bagaimana globalisasi ditata agar memungkinkan tercapainya pemerataan pembangunan secara global?

Pertanyaan tersebut, sekaligus mengandung tiga pertanyaan yang harus segera dicarikan jawabannya. *Pertama*, pertanyaan strategis, yaitu bagaimana globalisasi ditata secara politis. *Kedua*, berkaitan dengan bagaimana globalisasi ditata dalam *power constellation* dunia saat ini. Dan, *ketiga*, pertanyaan normatif tentang bagaimana pembangunan yang adil dalam masyarakat dunia bisa dicapai.

Jawaban atas pertanyaan tersebut, antara lain coba ditawarkan oleh Lembaga Penelitian Pembangunan dan Perdamaian (SEF, 2003) dalam studinya berkaitan dengan konsep "Global Governance". *Pertama*, tatanan politis globalisasi berarti pemerataan kerjasama internasional, karena tugas bersama seperti *Millennium development Goals* (MDG), "Protocol Kyoto" dan kesepakatan global lainnya, hanya bisa dicapai lewat upaya bersama. Sebenarnya, dua dekade lalu, "Laporan Brandt" (Brandt's Report) dan sebelumnya, *Club of Rome* tahun 70an, telah berbicara tentang hal yang mirip yaitu "kebijakan masyarakat global".

*Kedua*, untuk memungkinkan hal tersebut, tidak cukup sekedar lewat bantuan atau kredit murah (*soft loan*), tetapi sejak awal harus diberlakukan aturan bersama yang berorientasi pada (ekonomi) pasar sosial-ekologis. Landasan normatifnya bisa ditemukan pada kodifikasi HAM sosial dan Konvensi Rio tentang pembangunan global berkelanjutan, terkait ekosob dan lingkungan.

*Ketiga*, keharusan terjadinya perubahan struktur politik, baik struktur dalam negeri maupun internasional. Dalam negeri, diperlukan reformasi struktur politik, sosial dan ekonomi dengan tujuan memperkuat dinamika ekonomi pasar, memperkuat kemampuan bersaing dan kemandirian, penegakan hukum, keadilan sosial dan demokrasi. Sementara itu, di tataran internasional, harus ada reformasi struktur di negara-negara industri kaya anggota OECD, yang selama ini berkat penguasaan pasar memperoleh keuntungan berlimpah dari pasar global. Perubahan struktur internasional yang berorientasi pada *global sustainability*, mengharuskan penghapusan proteksi perdagangan, terutama dalam sektor agraria. Untuk memperoteksi pasarnya, per tahun, negara-negara anggota OECD, misalnya, memberikan subsidi sebesar 250 miliar US Dollar. Atau, tujuh kali lipat bantuannya kepada negara berkembang.

Berkaitan dengan kesenjangan kekuasaan (*power disparity*) dalam politik global, menurut laporan PBB tentang *Human Development* (2003), terdapat kecenderungan meningkatnya frustrasi masyarakat dan mereka yang mewakili negara-negara berkembang. Dan, ini, mempunyai dampak psikologis yang lebih buruk dibandingkan ketimpangan dalam perdagangan.

Sementara beberapa aspek globalisasi seperti perdagangan dunia dan utang luar negeri negara berkembang sejak lama menarik perhatian LSM dan aktivis masyarakat sipil, peran pasar uang (*finance market*) internasional cukup lama terbelengkalai. Padahal, pasar uang telah merambah cepat sejak beberapa tahun terakhir ini menjadi bagian utama proses globalisasi. Maknanya bagi politik pembangunan, kini telah beranjak jauh dari sekedar hubungan antara kreditur dan debitur. Fluktuasi (pasar) uang, menjadi risiko destabilisasi bagi ekonomi negara berkembang yang rapuh,

dan dalam krisis, dampaknya menjadi sangat merusak. Meski demikian, pasar uang semakin mempengaruhi kebijakan moneter, ekonomi dan sosial negara-negara industri serta mengancam menjadi semacam “kekuatan kelima” - disamping tiga kekuatan klasik, eksekutif-legislatif-yudikatif dan media massa sebagai “kekuatan keempat” - dalam negara. (Breuer, Fuenfte Gewalt, 18/5/2000)

## PERLAWANAN INTERNASIONAL

Sejak krisis moneter kawasan - yang pernah dijuluki “*emerging market*” - Asia Tenggara 1997/1998, semakin banyak aktivis masyarakat sipil yang mencermati dan menuntut reformasi sistem moneter internasional. Tapi juga dalam kebijakan moneter mainstream telah ada kesepakatan bahwa risiko stabilitas pasar uang harus dikontrol lewat regulasi. Wolfenson, mantan bos Bank Dunia, misalnya menganjurkan agar “arsitektur keuangan internasional harus mencerminkan ketergantungan, di satu sisi, antara makro ekonomi dan keuangan, serta masalah struktural dan sosial di sisi lain.” (*World Bank Paper* 2000) Beberapa waktu setelah Krisis Asia, sebuah komisi internasional sebagai “Forum bagi Stabilitas Moneter” dibentuk untuk menggodok usulan tersebut. Usulan yang kemudian memperoleh dukungan negara-negara industri. Namun, setelah beberapa tahun berlalu, selain beberapa perbaikan kecil usulan tersebut tidak mampu merubah bangunan lama sistem moneter internasional.

Pada titik inilah, terasa diperlukan tekanan untuk reformasi dari masyarakat sipil. Reformasi yang menghadapi tembok (*blockade*) struktural di tingkat pemerintahan, mengancam semua upaya regulasi mengalami kegagalan.

Tetapi saat ini, tekanan dari masyarakat untuk reformasi dalam banyak hal, tidak cukup hanya diartikulasikan sekadar dalam (kerangka) nasional. Aksi dan reaksi terhadap berbagai permasalahan, harus diorganisir secara trans-nasional, meski tetap seperti sedikala dengan tidak pula melupakan akar permasalahan di tingkat lokal dan nasional.

Satu contoh di antara berbagai proyek masyarakat sipil untuk regulasi kebijakan pasar uang yang paling berhasil saat ini, adalah ATTAC International.

Bermula di Perancis lewat inisiatif harian *Le Monde Diplomatique*, ATTAC (*Association pour la taxation de transaction financiers a l'aide aux citoyens* = Perhimpunan untuk Pemajakan Transaksi Keuangan demi Kepentingan Warga) didirikan pada 1998, gerakan ini sudah meluas ke lebih dari 30 negara Eropa serta negara berkembang, seperti Filipina, Meksiko, Senegal dan Brasilia.

Filsafat dasarnya adalah sebagai berikut. *Pertama*, pluralisme. ATTAC tidak terikat pada basis teori, pandangan dunia atau keagamaan tertentu. Lebih dari itu, gerakan ini memang tidak membutuhkan hal tersebut. Alasan keterlibatan para aktivisnya pun sangat beragam, mulai dari alasan religius untuk mencintai sesama manusia, humanis, marxis hingga penegakan hak asasi manusia. Meski, tidak berarti bisa apa saja. Terdapat sebuah kesepatan dasar yang berangkat dari kriteria demokrasi, keadilan sosial dan keterbatasan alam, untuk menolak konsep neo-liberal tentang globalisasi. Berangkat dari kesepakatan ini, tuntutan yang diajukan sesuai spektrum sudut pandang mereka yang terlibat juga beragam, bisa berupa aspek tertentu seperti penghapusan utang luar negeri negara berkembang, regulasi demokratis (proses) globalisasi, serta reformasi radikal hingga ketidakpercayaan pada kapitalisme sebagai sistem dan tuntutan penghapusannya. Penghargaan terhadap pluralisme inilah yang menjadi modal dasar, di samping perdebatan pendapat secara solider.

*Kedua*, berorientasi sebagai gerakan dan pada basis (masyarakat). Artinya, dasar kegiatan ATTAC adalah keterlibatan masyarakat luas di daerahnya masing-masing. Oposisi terhadap globalisasi neo-liberal, yang pada dekade lalu lebih didominasi aktivis LSM, kini peran tersebut mulai digantikan oleh (masyarakat) basis. Hal ini mulai terlihat semenjak Seattle. Ketiga, struktur organisasi yang desentral, partisipatif dan fleksibel dengan otonomi luas bagi inisiatif lokal, dikursif, berorientasi kesepakatan serta proses keputusan yang transparan. Keempat, bentuk aksi dan pendekatan yang beragam, yaitu publikasi, lokakarya, konferensi, lobi politik, demo dan mogok. Semuanya dalam kerangka anti kekerasan. *Terakhir*, ATTAC terbuka bagi kerjasama dan persekutuan dengan berbagai kelompok sebagai bagian dari kekuatan oposisi terhadap kekuatan pasar global

dan berbagai organ politiknya. Salah satu partner terpenting adalah serikat buruh, serta aktivis masyarakat sipil dari negara berkembang. Misalnya, ditunjukkan dalam bentuk kerjasama dengan Gerakan Tuna Lahan (MST) di Barsilia, gerakan petani, *indigenous people*, lingkungan, serta perempuan dari berbagai kawasan.

Sebagai *genre* baru dalam gerakan untuk dunia yang adil, ATTAC, tidak melihat dirinya sebagai gerakan anti globalisasi per se, seperti yang banyak dituduh oleh media massa dan politisi konservatif. Titik awal program ATTAC adalah kritik terhadap hasil proses globalisasi selama ini : "Janji-janji, globalisasi akan membawa kesejahteraan bagi semua, tidak terpenuhi. Sebaliknya, jurang antara yang kaya dan miskin semakin dalam." (lihat : [www.attac-netzwerk.de](http://www.attac-netzwerk.de)). Meski demikian, kritik tidak sepenuhnya pada internasionalisasi hubungan ekonomi, politik dan kebudayaan, melainkan menolak globalisasi yang semata berorientasi pada kepentingan raksasa ekonomi. Sebuah globalisasi yang dicanangkan adalah: globalisasi solidaritas, keadilan, hak asasi manusia dan demokrasi. Internasionalisme baru ini, tidak sekedar dalam upaya karitatif, tetapi bertujuan membentuk struktur-struktur demokratis dalam sistem internasional serta dalam suatu masyarakat, di utara maupun selatan.

Dengan kata lain: Upaya perwujudan globalisasi menurut rasionalitas yang berbeda dari apa yang berlaku saat ini berupa *Gewinmaximierung* (Maksimalisasi Keuntungan) dari *international finance capitals*. Yang diinginkan adalah rasionalitas emansipasi. Pernyataan, bahwa tiada alternatif dan menjadi sebuah keharusan globalisasi didominasi oleh (bentuk) neo-liberalisme, menurut ATTAC, adalah sepenuhnya pernyataan ideologis. Karena itu, slogan yang selalu diajukan adalah "Dimungkinkan, sebuah Dunia Yang Lain."

Bahwa pencarian alternatif ini serius, terlihat dalam Alternative Summit para kritikus globalisasi neo-liberal di Porto Alegre, Brasilia, Januari 2001 yang disponsori oleh Partai Buruh (PT), Gerakan Para Tuna Lahan (MST) dan LSM Brasilia serta ATTAC. Pada waktu itu, sekitar 10.000 peserta dari berbagai penjuru dunia berdiskusi selama hampir satu minggu tentang pembangunan alternatif. Dimensi perdebatan mencakup visi maupun usulan operational untuk re-

formasi.

Meski beberapa tahun terakhir melemah, berbagai usulan terkait pasar uang dari ATTAC masih relevan, yaitu pemberlakuan pajak transaksi devisa (*Tobin Tax*); netralisasi pusat-pusat *offshore banks* dan *tax paradises*; larangan bagi *derivate speculative* dan *Hedge Funds*; penghapusan utang luar negeri negara berkembang; pengawasan ketat perbankan dan bursa effect; reformasi lembaga keuangan internasional IMF, Bank Dunia dan bank-ban regional seperti ADB; dan seterusnya; stabilisasi kurs tukar mata uang utama Dollar AS, Yen, Euro dan Yuan.

## INDONESIA DALAM PUSARAN GLOBALISASI

Idealnya, Indonesia ke depan berkembang berdasarkan jiwa, semangat, nilai dan konsensus dasar berdirinya republik ini seperti yang tersurat dalam Mukaddimah dan Pasal 33 UUD '45. Pembangunan berkeadilan, ditorehkan sebagai arah besarnya dengan agenda dan program pembangunan yang dicanangkan untuk mencapai keadaan masyarakat yang sejahtera melalui peningkatan kinerja perekonomian, penciptaan kesempatan kerja, penghapusan kemiskinan, dan pengurangan berbagai bentuk ketimpangan.

Penataan kembali Indonesia, dalam arus globalisasi yang tengah terjadi dan konteks nasional yang melingkupinya, sebagaimana disebut di atas terutama harus dilakukan pada dua sektor pokok, yaitu sektor sosial politik dan sektor ekonomi. Gagasan kesejahteraan, yang berarti penguatan kembali peran negara, perlu dimunculkan - bukan semata sebagai wacana, tetapi juga diwujudkan sebagai bagian dari kebijakan publik.

Neoliberalisme yang telah merambah (hampir) seluruh kehidupan ekonomi negeri ini pantas untuk ditinjau ulang. Langkah deprivatisasi dan nasionalisasi berbagai aset nasional perlu dikaji kelayakannya. Ekonomi kerakyatan perlu dimaknai kembali dan diterjemahkan dalam konteks Indonesia pasca Orde Baru - secara khusus perlu dikaji revitalisasi ekonomi gilda dan koperasi dalam pengertiannya yang lebih orisinal. Secara umum "Pembangunan Ekonomi" butuh reorientasi agar lebih berbasis kepada Ketahanan Sumber Daya Nasional dan Keberlanjutan agar bisa bertahan

dalam arus globalisasi.

Selain sektor keuangan, beberapa sektor penting dan pokok berikut ini perlu menjadi perhatian khusus dalam proses globalisasi neoliberal:

1. Pangan dan Pertanian
2. Perdagangan dan ACFTA
3. Energi - Pertambangan
4. Ketenagakerjaan

### **Pangan dan Pertanian**

Pangan dan pertanian merupakan sektor pokok bagi pemenuhan kebutuhan dasar hidup warganegara dan karenanya sektor ini sangat berwatak politis. Isu ketahanan (lebih ideologis: kedaulatan) pangan, yakni kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga dengan mutu dan jumlah yang aman, merata dan terjangkau, yang tercantum dalam UU No. 7/1996 tentang Pangan, adalah bagian dari isu Kedaulatan Pangan. Upaya mencapainya tidak saja menuntut kontinuitas dan sinergi dari aspek produksi, distribusi dan konsumsi, tetapi juga ketepatan kebijakan publik yang mendukungnya, yang tiada lain merupakan pilihan politik berbangsa.

Permasalahan di sektor pertanian khususnya pangan tidak sederhana. Paling tidak ada tiga sub sistem yang harus ditangani, yaitu (1) Produksi, (2) Distribusi, dan (3) Konsumsi. Selama rezim Orde Baru, pendekatan pengembangan sektor pertanian mengikuti "Revolusi Hijau" yang berbasiskan kepada pupuk dan pestisida kimia, bibit hibrida, serta teknik budidaya monokultur, telah menimbulkan banyak masalah. Dalam era pasca-reformasi persoalan ketergantungan input produksi dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya bukan saja belum teratasi, kebijakan sektor pertanian kita semakin jauh melayani kepentingan industri besar dan pemilik modal.

Produktifitas komoditi strategis, seperti padi, jagung, dan kedelai belum mampu memenuhi kebutuhan rakyat. Ketergantungan pada impor masih sangat tinggi. Sementara usaha penganekaragaman pangan untuk mengurangi ketergantungan pada beras justru menggiring masyarakat untuk mengkonsumsi produk pangan berbahan impor, khususnya terigu. Data Suse-

nas 2008 menunjukkan konsumsi terigu masyarakat Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga mencapai 8,4 kg/kapita. Impor gandum jelas semakin tinggi. Di tahun 2000, Indonesia mengimpor gandum sebanyak 6,037 juta ton, lima tahun kemudian naik hampir 10 persen menjadi 6,589 juta ton. Tahun 2025 proyeksi impor gandum diperkirakan naik tiga kali lipat menjadi 18,679 juta ton.

Demikian juga dengan produk pangan lain. Sekitar 70 persen kebutuhan susu setiap tahunnya diimpor dalam bentuk skim, benih jagung hibrida yang diimpor mencapai 43 persen di tahun 2008. Sedang benih jagung lokal yang digunakan pun tidak banyak yang berasal dari perusahaan benih nasional atau petani penangkar, tapi diproduksi oleh perusahaan multinasional seperti Bayer dan Dupont.

Pada sub sektor distribusi, pendekatan neoliberal mengharamkan adanya sebuah lembaga nasional yang berperan sebagai penyangga seperti yang dulu diperankan oleh Bulog, sejak berdirinya 1967, sampai diperumisasi penuh, pada 2003. Sejak awal pendirian di tahun 1967, BULOG diproyeksikan untuk menjaga ketahanan pangan melalui pengendalian harga, pengumpulan dan pendistribusian bahan pangan. Kini dengan status sebagai perusahaan umum, BULOG tidak memiliki kewenangan setingkat menteri seperti di era 1990an. Ketiadaan fungsi Bulog sebagai buffer stock pengendali pangan mengakibatkan kurang meratanya distribusi antar daerah. Distribusi produk pertanian dan pangan sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar, yang sudah barang tentu tidak ada pemihakan kepada rakyat kecil.

Salah satu pendekatan dalam mengatasi persoalan kedaulatan pangan adalah menganekaragaman pola konsumsi pangan masyarakat. Pencarian bahan-bahan pangan substitusi untuk menggantikan bahan pangan impor, khususnya gandum, perlu terus dilakukan. Ini sembari membangkitkan pertanian rakyat berbasis komoditi pangan lokal, seperti sagu, singkong, umbi-umbian lain, jagung dan kedele, buah sukun, dan sebagainya.

Saat ini, Indonesia masuk food trap negara maju dan kapitalisme global. Tujuh komoditas utama non-beras yang dikonsumsi masyarakat sangat bergantung

pada impor. Padahal, sejak dua tahun terakhir, terjadi lonjakan harga pangan dan komoditas pertanian lainnya. Akibatnya, terjadi penurunan ketahanan pangan dengan indikasi yang mengesankan seperti meningkatnya kasus gizi buruk, kematian balita dan ibu melahirkan. Ironisnya, nyaris separuh dari mereka yang mengalami rawan pangan berasal dari keluarga petani gurem.

Duapertiga petani gurem, tergolong “*marginalized*” karena memiliki lahan tandus, terisolasi letaknya serta tanpa pengamanan hak atas tanah dan tanpa akses pada kredit. Penyebab lainnya adalah buruknya infrastruktur dan ketergantungan pada pedagang antara. Sementara itu, sekitar 30 persen bernasib lebih buruk karena tidak memiliki lahan pertanian dan bekerja sebagai buruh tani, nelayan musiman dan menggantungkan hidup pada hasil hutan.

Kedaulatan pangan, atau lebih konkret hak atas pangan, harus dimulai dari berbagai kelompok ini. Pengalaman dari mancanegara mengajarkan bahwa aksesibilitas atas tanah merupakan persyaratan terpenting bagi pembangunan pertanian dan pedesaan. (Brandt/Otzen, 2002) Karena itu, reformasi agraria menjadi sebuah keharusan. Aksesibilitas atas tanah (land reform), adalah “bahasa” ekonomi-politik baru, di mana salah satu kata kuncinya adalah property rights. Penggunaan istilah aksesibilitas mengingatkan kita pada Amartya Sen dan asumsinya tentang “*entitlement*”, yaitu tak seorang pun harus lapar, karena di dunia ini tersedia makanan berkecukupan. Mereka yang lapar hanya karena tidak memiliki akses (untuk memproduksi) makanan.

### Perdagangan dan ACFTA

Perdagangan adalah jantung perekonomian, proses berlangsungnya pergerakan dan pemerataan kekayaan, beserta pertumbuhan kesejahteraan yang dihasilkannya. Kewirausahaan menjadi salah satu pilar pokok pengembangan produksi dan perdagangan. Upaya pengembangan kewirausahaan di Indonesia sangat terkait dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yang pada umumnya merupakan pengisi sektor informal, dan bagian dari gerakan koperasi. Koperasi dan UMKM merupakan representasi rakyat

Indonesia dalam kehidupan ekonomi, karenanya perlu diberikan prioritas yang tinggi dalam pembangunan nasional. Porsi sektor informal dalam kegiatan perdagangan di Indonesia mencapai di atas 95%, yang terdiri atas UMKM dari berbagai sektor.

UMK (Unit Mikro dan Kecil) memiliki keunggulan-keunggulan kompetitif dan komparatif terutama dalam pemanfaatan sumber daya alam. Sektor tersier UMK yaitu perdagangan, pariwisata dan industri boga, dengan investasi yang sama, mampu menyerap tenaga kerja yang jauh lebih besar dibandingkan dengan usaha menengah dan besar. Oleh karena itu, secara prospektif, UMK dapat tumbuh lebih cepat asal ada kebijakan yang efektif dan tepat guna dari pemerintah. Termasuk dalam menjaganya dari serbuan produk asing yang berdampak kontraproduktif seperti yang terjadi sejak 2010 lewat ACFTA (*ASEAN-CHINA Free Trade Agreement*).

Perdagangan Bebas China-ASEAN (ACFTA), telah dimulai sejak 1 Januari tahun lalu. Akibatnya kini, kondisi pasar domestik kita terdesak oleh produk impor yang berharga murah dan berkualitas rendah dari China. Penyebabnya boleh jadi, seperti diakui Menteri Perindustrian Mohammad S Hidayat, karena pemerintah Indonesia tidak mempunyai desain besar menghadapi ACFTA. (Kompas, 15/4/2011)

Padaحال, negosiasi ACFTA telah dimulai sejak lebih dari satu dekade lalu. Melalui perundingan di berbagai tingkat pemerintahan hingga antar kepala negara, dokumen resmi ACFTA akhirnya ditandatangani di Phnom Penh, Kamboja, 14 November 2002. Dokumen tersebut, kemudian diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 48/2004.

Baru setelah diberlakukan, muncul desakan dari kebanyakan pihak di Indonesia untuk melakukan negosiasi ulang. Presiden SBY pun sepakat ketika mengatakan “Kita bisa minta moratorium, minta untuk menghentikan ini, itu, dan dalam WTO sebagai salah satu safeguard, ada solusi dan jalan keluar.” (VivaNews, 12/2/2010)

Sayangnya, menurut Hidayat, usulan renegotiasi untuk 228 sektor yang berpotensi injuries atau babak belur meski sudah diajukan, tetapi tak jalan. Sehingga Indonesia terpaksa terus bergerak dalam koridor

ACFTA.

Selain renegotiasi untuk sektor-sektor tersebut, para produsen dalam negeri juga ngotot meminta pemerintah memaksa China meningkatkan impornya dari RI hingga 17 persen sebagai kompensasi depresiasi mata uang Yuan terhadap Rupiah. Depresiasi Yuan menyebabkan harga barang ekspor dari Indonesia ke China lebih tinggi 17-18 persen, sementara barang China yang masuk harganya lebih rendah. Hal serupa, misalnya, berhasil dinegosiasikan oleh India.

Nampaknya, dalam bernegosiasasi perlu dipertimbangkan berbagai hal berikut, termasuk posisi China dan kita dalam perdagangan global.

Kebangkitan China, memaksa kawasan dunia lainnya untuk menyesuaikan diri. Industri China saat ini, mempekerjakan 83 juta orang, hampir sama dengan jumlah pekerja industri di 14 negara OECD terbesar. Sementara itu, sekitar 100 juta pekerja China lainnya, memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk pasar dunia dan siap memasuki lapangan kerja industri. Karena itu, bisa dipastikan bahwa dalam waktu dekat, kemungkinan besar tidak akan ada kenaikan pesat tingkat gaji di China. Dinamika pasar kerja di China ini dipastikan mempunyai dampak global, terlihat dari melejitnya ekspor China yang semakin menekan perusahaan AS, Eropa dan Asia.

Bagi negara-negara berkembang, kebangkitan raksasa Asia ini bisa berpotensi positif maupun negatif. Sektor industri Amerika Selatan, misalnya, selain mengalami persaingan yang semakin ketat, sekaligus booming dalam ekspor produk pertanian dan bahan bakunya ke China. Bagaimana dengan kita?

Bagi kita, China berpotensi menjadi lokomotif pertumbuhan. Meski, sekaligus berpotensi sebaliknya ketika menjadi pesaing utama bagi produk industri, seperti yang dirasakan oleh sektor industri kecil-menengah. Pada saat yang sama, dengan penawaran harga sangat bersaing, perusahaan China mendominasi pemenang tender pembangunan tenaga listrik di negeri ini.

Berkat cadangan devisa yang melimpah, China juga mampu memberikan pinjaman berbunga rendah (*soft loan*), tanpa memandang Indonesia yang oleh para kreditor lainnya, dianggap telah menjadi *middle income country*.

Selain itu, kredit dari China juga tanpa keharusan keterlibatan ekspat bergaji tinggi serta persyaratan memberatkan terkait keharusan membeli produk dari negeri Tirai Bambu ini. Hal ini, bisa menjadi alternatif pembiayaan pembangunan. Ada yang menyebut, "Washington Consensus" setidaknya telah tersaingi oleh "Beijing Consensus" (Ramo, 2005).

Bagi China, dan juga ASEAN, Indonesia adalah pasar sekaligus produsen bahan baku energi yang relatif besar. Hal ini, bisa menjadi berkah ataupun kutukan. Namun, apa yang bakal terjadi, seharusnya tergantung arahan kita.

Terkait ACFTA, walaupun pemerintah akhirnya berhasil melakukan renegotiasi dengan China, pertanyaan yang mendesak adalah apakah para pelaku usaha kita akan mampu bersaing dengan produk sejenis dari negara ASEAN lainnya? Nampaknya, perlu disadari bahwa masalah utama daya saing kita yang lemah terletak pada kelangkaan listrik, tersendatnya suplai energi primer untuk proses produksi, parahnya infrastruktur untuk distribusi serta lemahnya pelaksanaan hukum. Tanpa pembenahan berbagai masalah tersebut dalam sebuah desain besar, "desakan" pasar global akan semakin menghimpit perekonomian kita.

### Energi - Pertambangan

Saat ini, meskipun mulai mengalami pergeseran dari sumber energi yang berasal dari bahan bakar minyak ke gas alam dan batu bara, pola konsumsi energi masih menunjukkan ketergantungan pada sumber energi tak terbarukan. Potensi energi dan sumber daya mineral yang sampai saat ini telah diketahui dan terbukti adalah: minyak 86,9 miliar barel, gas 384,7 TCF, batubara 50 miliar ton, dan panas bumi sekitar 27 GWatt. Cadangan terbukti minyak bumi Indonesia berjumlah 5,8 miliar barel dengan tingkat produksi 500 juta barel per tahun. Sementara itu cadangan terbukti gas bumi sekitar 90 TCF dengan tingkat produksi sekitar 3 TCF. Sedangkan cadangan terbukti batubara sekitar 5 miliar ton dengan produksi mencapai 100 juta ton setiap tahunnya.

Dengan demikian, perlu upaya untuk mengembangkan sumber energi terbarukan (mikro hidro, biomassa, biogas, gambut, energi matahari, arus laut,

dan tenaga angin) sehingga di masa mendatang bangsa Indonesia tidak akan mengalami kekurangan pasokan energi. Menurut catatan Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala BPPT, negara ini setidaknya memiliki 62 jenis tumbuhan penghasil minyak. Energi dari panas bumi dan tenaga air memiliki potensi yang besar tapi belum dimanfaatkan dengan baik. Energi listrik mikrohidro, pada khususnya, sangat potensial dikembangkan sampai ke desa-desa, sebagai satu teknologi tepat guna yang murah, sederhana, dan ramah lingkungan. Begitu pula dengan energi surya yang berlimpah di seluruh Indonesia. Kesemuanya menjadi modal bagi Indonesia untuk mencari dan menemukan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan tersebut.

Bagi para penentangannya, globalisasi neolib dianggap kurang (atau bahkan tidak) menaruh perhatian terhadap pembangunan sosial, isu lingkungan, demokrasi dan aspek militerisasi. Kelemahan yang tampaknya, terkait erat dengan pattern of thinking. Terkesan bahwa globalisasi neolib sengaja melupakan keterkaitan antara korporasi global (MNC) dengan pemerintah dan kelembagaan militer. Anggaran militer AS, misalnya, jauh lebih besar ketimbang kumpulan anggaran semua negara lain. Korporasi besar pun dianggap, dianggap membawa kemaslahatan bagi masyarakat, termasuk mereka yang hidup di negara berkembang.

Bagi kita di Indonesia, mencermati sektor pertambangan di mana biasanya terjadi kolaborasi korporasi besar dan pemerintah, optimisme tersebut sulit dipahami. Empat dekade lebih industri pertambangan mineral, misalnya, telah gagal membuktikan "mitosnya" sebagai penopang perekonomian, apalagi berperan mensejahterakan penduduk lokal. Dalam 5 tahun terakhir, kontribusi sektor ini hanya sekitar 2,5 trilyun terhadap APBN, lebih kecil dari sektor kehutanan. Nilai tambahnya juga rendah karena bahan tambang diekspor dalam bentuk bahan mentah, ditambah rendahnya penyerapan tenaga kerja masal di tingkat lokal. Sektor ini pun, gagal menunjukkan tanggung jawabnya terhadap kerusakan lingkungan, pelanggaran HAM dan penyelesaian konflik dengan penduduk lokal di lokasi-lokasi pertambangan (JATAM, 2009).

Contoh paling kasat mata adalah PT Freeport, kor-

porasi tambang skala besar pertama di Indonesia yang telah beroperasi selama 35 tahun di Papua. Hingga kini, setidaknya 1.400an ton emas, belum lagi tembaga dan perak telah dikeruk. (JATAM, 2009) Namun, kondisi Papua jauh dari "kemilau emas" nya. Ironisnya, meskipun *Product Domestic Bruto* (PDB) Papua menduduki peringkat 3, tetapi nilai Index Pembangunan Manusia (IPM), yang mengekspresikan tingginya angka kematian ibu hamil dan balita, menempati urutan 29 dari 30 propinsi Indonesia. Papua juga memiliki persentase penduduk miskin terbesar dengan akumulasi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di atas 35% berada di kawasan konsesi PT Freeport. Yang meningkat, seiring kenaikan produksi PT Freeport adalah bisnis prostitusi. Tak heran, Timika menjelma menjadi kota dengan angka penderita HIV AIDS tertinggi di Indonesia.

Selain itu, korporasi tambang skala besar juga telah gagal menangani daya rusak ekstraksi tambang PT Freeport telah gagal menunjukkan tanggung jawabnya terhadap pengelolaan lingkungan dan resolusi konflik dengan penduduk lokal. Sekitar 1,3 milyar ton limbah tailing dan 3,6 milyar ton limbah batuan dibuang begitu saja ke lingkungan. Limbah tersebut telah mencemari Sungai Ajkwa dan menjadi penyebab jebolnya Danau Wanagon hingga terkontaminasinya ratusan ribu hektar daratan dan lautan Arafura. PT Freeport juga terbukti tidak memiliki akuntabilitas, karena melanggar berbagai aturan hukum lingkungan. Belum lagi catatan terjadinya pelanggaran HAM di sekitar kawasan pertambangan yang didokumentasikan Komnas HAM dan kelompok gereja di Papua pada tahun 1995, yang juga belum tuntas hingga saat ini.

Menurut JATAM, potret-potret yang tak jauh berbeda, dengan mudah bisa ditemukan di lokasi-lokasi pertambangan skala besar lainnya. Mulai dari tambang emas PT Barisan Tropikal Mining di Sumatera; PT Indo Muro Kencana, PT Kelian Equatorial Mining, PT Indominco Mandiri, PT Adaro, PT Arutmin, PT Bahari Cakrawala Sebuku di Kalimantan; PT Inco, PT Newmont, PT Antam di Sulawesi; PT Newmont, PT Arumbai di Nusa Tenggara; PT Nusa Halmahera Mineral dan Pulau Wetar di kepulauan Maluku, hingga PT Freeport di Papua.

Yang lebih parah adalah lokasi-lokasi tambang yang telah selesai dan ditinggalkan begitu saja, diantaranya PT Barisan Tropikal Mining di Kabupaten Muara Tiku, Sumatera Selatan dan tambang PT Indo Muro Kencana di Kalimantan Tengah. Penduduk lokal tak hanya menderita saat pertambangan beroperasi, tetapi juga mendapat warisan kerusakan lingkungan permanen paska penambangan.

Ironisnya dengan “prestasi” di atas, pelaku pertambangan melalui IMA (*Indonesian Mining Association*) terus menuntut bahkan mengintimidasi agar mendapat perlakuan istimewa dari negara. Mulai menuntut pemangkasan pajak, menurunkan standar-standar peraturan lingkungan hidup hingga menuntut pembukaan 11,4 juta ha kawasan lindung menjadi pertambangan terbuka. Jika tidak mereka mengancam akan memindahkan atau membatalkan investasinya. Anehnya, pemerintah (biasanya) setuju, dengan berbagai alasan: menarik investasi, bersaing dalam era globalisasi, aturan main WTO. Atau, tak berdaya karena ditekan MNC dan perusahaan raksasa berikut lembaga pendukungnya seperti Bank Dunia, IMF, ADB dan lainnya. Tentu saja, ada aroma KKN yang menyengat di balik semua itu.

### Ketenagakerjaan

Masalah utama ketenagakerjaan Indonesia saat ini, adalah:

1. tingginya jumlah pengangguran;
2. rendahnya tingkat pendidikan (keterampilan) buruh;
3. minimnya perlindungan hukum, dan
4. upah yang kurang layak

Bila ditelusuri lebih jauh keempat masalah di atas dapatlah disimpulkan bahwa akar dari semua masalah itu adalah karena ketidakjelasan politik ketenagakerjaan nasional. Sekalipun dasar-dasar konstitusi UUD 45 khususnya pasal 27 dan pasal 34 telah memberikan amanat yang cukup jelas bagaimana seharusnya negara memberikan perlindungan terhadap buruh/pekerja.

Data menunjukkan secara jelas, bahwa lebih dari 75% pekerja Indonesia berpendidikan SLTP ke bawah, tanpa keterampilan khusus. Bagi kalangan investor

yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia, sajian data ini akan menghadirkan suatu pengertian bahwa jenis industri yang potensial dikembangkan di Indonesia adalah jenis industri manufaktur padat karya (garment, tekstil, sepatu, elektronik). Sebab dalam situasi pasokan tenaga kerja yang melimpah (*over supply*), pendidikan yang minim, dan upah murah, hanya jenis industri manufaktur ringan saja yang cocok dibisniskan. Sekalipun para investor ini tetap harus mengeluarkan biaya pelatihan kerja, tetapi biayanya tidak sebesar jenis industri padat modal.

Selama hampir 25 tahun, pemerintah Indonesia percaya dengan jenis investor ini, sampai kemudian disadarkan oleh kenyataan pahit bahwa jenis industri seperti itu adalah jenis industri yang paling gemar melakukan relokasi (*footloose industries*). Pemindahan lokasi industri ke negara yang menawarkan upah buruh yang lebih kecil, peraturan yang longgar, dan buruh yang melimpah. Indonesia di era reformasi telah meratifikasi konvenan berserikat dan berunding, larangan kerja paksa, penghapusan diskriminasi kerja, batas minimum usia kerja anak, larangan bekerja di tempat terburuk.

Ditambah dengan kebijakan demokratisasi baru dibidang politik, telah membuat investor tanpa kaki ini kuatir bahwa demokratisasi baru selalu diikuti dengan diperkenalkannya Undang-undang baru yang melindungi dan menambah kesejahteraan buruh. Bila ini yang terjadi maka konsekuensinya akan ada peningkatan biaya tambahan (*labor cost* maupun *overhead cost*). Bagi perusahaan yang masih bisa mentolerir kenaikan biaya operasional ini, mereka akan mencoba terus bertahan, tetapi akan lain halnya kepada perusahaan yang keunggulan komparatifnya hanya mengandalkan upah murah dan longgarnya peraturan, mereka akan segera angkat kaki ke negara yang menawarkan fasilitas bisnis yang lebih buruk.

Itulah sebabnya sejak tahun 1999-2002 diperkirakan jutaan buruh telah kehilangan pekerjaan karena perusahaannya bangkrut atau re-lokasi ke Cina, Kamboja atau Vietnam. Pemerintah tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama dengan tetap memberikan kepercayaan kepada jenis industri manufaktur sebagai sektor andalan Indonesia untuk menyerap tenaga

kerja. Indonesia sebaiknya mengembangkan jenis industri yang memiliki keunggulan absolute (*absolute advantage*) seperti industri, perikanan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, pertanian, kelautan. Inilah jenis industri yang sebenarnya kita unggulkan, karena dianugerahkan Tuhan kepada bumi Indonesia. Investor yang datang ke sektor ini adalah investor yang berbisnis dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam kita, bukan karena sumber daya manusia yang melimpah. Industri ini juga tidak mengenal relokasi (kecuali kalau sudah habis masa eksplorasi). Karena tidak di semua tempat ada tersedia sumber daya alam yang melimpah.

Dalam kamus modern serikat buruh, hanya ada dua cara melindungi buruh. Pertama, melalui undang-undang perburuhan. Buruh akan terlindungi secara hukum, mulai dari jaminan negara memberikan pekerjaan yang layak, melindunginya di tempat kerja (ke-sehatan dan keselamatan kerja dan upah layak) hingga pemberian jaminan sosial setelah pensiun. Kedua, melalui serikat buruh. Sekalipun undang-undang perburuhan bagus, tetapi buruh tetap memerlukan kehadiran serikat buruh untuk pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). PKB adalah sebuah dokumen perjanjian bersama antara majikan dan buruh yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hanya melalui serikat buruhlah – bukan melalui LSM ataupun partai politik – bisa berunding untuk mendapatkan hak-hak tambahan (di luar ketentuan UU) untuk menambah kesejahteraan mereka.

Sistem peradilan perburuhan kita nyaris tidak memberikan kemungkinan buruh menang dalam proses peradilan yang panjang (mulai dari bipartit, perantaraan, P4D, P4P, PTUN, Mahkamah Agung, Peninjauan Kembali, dan masalah eksekusi).

Program Jamsostek pun tidak memberikan manfaat banyak terhadap buruh, karena di samping status usahanya yang profit oriented, pemerintah ikut-ikutan mengambil dana deviden dari keuntungan Jamsostek. Sehingga buruh hanya menerima rata-rata Rp 2,5 juta setelah pensiun. Tentu saja jumlah ini tidak mencukupi kebutuhan buruh pasca kerja. Itulah sebabnya banyak pensiunan buruh jatuh dalam kemiskinan tragis.

Otonomi daerah telah menghadirkan skenario lebih buruk terhadap buruh, sebab tidak ada lagi pen-

gawasan Depnaker pusat. Semua daerah berlomba memperluas retribusi baik legal maupun ilegal untuk menambah APBD, tidak peduli apa dampaknya terhadap semakin berkurangnya minat investor beroperasi di daerah itu. Ada retribusi perpanjangan ijin IKTA, pungutan mendapatkan kartu kuning, ijin penyimpanan waktu kerja, biaya pendaftaran PKB, dan sebagainya, yang kesemuanya menggambarkan kaburnya visi pemerintah daerah terhadap pengembangan perekonomian.

## TANTANGAN UMUM GLOBALISASI

Pertama, pelaksanaan pembangunan di Indonesia terjebak ke dalam perangkat penerapan ide-ide pembangunan neo-liberal. Konsekuensinya, pelaksanaan pembangunan di Indonesia tidak hanya bias terhadap pembangunan ekonomi, tetapi juga sangat berambisi untuk mengejar pertumbuhan setinggi-tingginya. Dengan orientasi seperti itu, pelaksanaan pembangunan di Indonesia tidak hanya cenderung mengabaikan berbagai dimensi pembangunan sosial dan kebudayaan, tetapi juga cenderung mengabaikan urgensi penegakan keadilan sebagai pijakan normatif dan kelembagaan dalam merumuskan kebijakan pembangunan.

Kedua, pelaksanaan pembangunan di Indonesia juga terjebak ke dalam arus ketergantungan terhadap utang (luar negeri maupun domestik) dalam jumlah yang membludak dan mencekik. Sejak pertengahan 1980-an, Indonesia tidak lagi sekedar membuat utang baru sembari mengangsur utang lama, tetapi terpaksa membuat utang baru untuk melunasi utang lama. Lebih celaka lagi, walaupun selalu menjadi “good boy”, jumlah beban utang luar negeri yang dibayar negeri ini merambat melebihi utang baru yang dibuatnya. Sementara itu, kemampuan untuk mengelola utang terbilang sangat lemah. Indonesia adalah satu-satunya Negara tanpa *debt management office*. Utang luar negeri “dikelola” lewat dan dari tiga pintu (BI, Bappenas, Depkeu) yang seringkali tidak sinkron. Meskipun terkahir, Indonesia sudah melunaskan utangnya kepada IMF, namun banyak yang meragukan negeri ini mampu menelorkan kebijakan sosial-ekonomi yang menjadikan bangsa Indonesia tuan di rumah sendiri dengan mengapresiasi kebutuhan dasar mayoritas

rakyatnya.

Ketiga, akibat himpitan utang, penegakan hak-hak asasi manusia, termasuk hak-hak ekososial (ekonomi-sosial-budaya) rakyat cenderung dikorbankan atas nama pembangunan. Praktik kekerasan demi pembangunan, meski dengan cara yang “demokratis” (dibandingkan 32 tahun Orde Baru) masih terjadi: pedagang kaki lima tergusur atas nama pembangunan; tanah rakyat dibeli dengan harga murah atas nama pembangunan; para pekerja harus hidup paspasan tanpa perlindungan yang cukup atas nama pembangunan; sementara itu, “orang miskin dilarang sakit” serta “dilarang mengecap pendidikan memadai” dan seterusnya.

Bertolak dari beberapa kenyataan di atas, dan untuk mencegah semakin terpuruknya pembangunan untuk pencapaian hak-hak ekososial mayoritas di masa depan, beberapa agenda kerja (dalam memantapkan visi ke depan) berikut ini perlu mendapat perhatian serius.

## USULAN AGENDA KERJA SOSDEM INDONESIA

*Pertama*, kembangkan jaringan sosial-demokrasi untuk mengkaji, merumuskan, dan menyebarluaskan teori-teori pembangunan sosdem sebagai pengimbang terhadap hegemoni teori-teori pembangunan neo-liberal dalam wacana pembangunan di Indonesia.

*Kedua*, pengkajian teori pembangunan ekonomi Sosdem. Perekonomian dikembangkan berlandaskan:

- Prinsip demokrasi ekonomi dan persaingan sehat dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan serta kepentingan nasional sehingga terjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat. Pengelolaan kebijakan perekonomian perlu memperhatikan secara cermat dinamika globalisasi, komitmen nasional di berbagai fora perjanjian ekonomi internasional, dan kepentingan strategis nasional di dalam menjaga kemandirian dan kedaulatan ekonomi bangsa.
- Upaya terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh dimana pertanian (dalam arti luas, termasuk kelautan) dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang menghasilkan produk-produk secara efisien dan modern, in-

dustri manufaktur yang berdaya saing global menjadi motor penggerak perekonomian, dan jasa menjadi perekat ketahanan ekonomi.

- Penguatan daya-saing global perekonomian ditingkatkan dengan mengembangkan pola jaringan rumpun industri (industrial cluster) sebagai fondasinya, berdasarkan 3 (tiga) prinsip dasar, yaitu penguatan (perluasan dan pendalaman) struktur rumpun industri dengan membangun keterkaitan antarindustri dan antara industri dengan setiap aktivitas ekonomi terkait (sektor primer dan tersier, UKM maupun perusahaan penanaman modal asing); hal ini menjadi hal yang urgen ketika mencermati terjadinya proses de-industrialisasi belakangan ini.
- Pembangunan fondasi ekonomi mikro (lokal) agar terwujud lingkungan usaha yang kondusif melalui penyediaan berbagai infrastruktur peningkatan kapasitas kolektif (teknologi, mutu, peningkatan kemampuan tenaga kerja dan infrastruktur fisik) serta penguatan kelembagaan ekonomi yang dapat menjamin bahwa peningkatan interaksi, produktivitas, dan inovasi yang terjadi, melalui persaingan sehat, dapat secara nyata meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan.

*Ketiga*, kajian pemenuhan hak-hak ekososial berdasarkan Mukaddimah UUD 1945, dan berbagai konvensi internasional.

# Pameran Sejarah Sosial Demokrasi di Indonesia dan Jerman :

# Membuat Demokrasi Sosial Diterima

Paskal Kleden\*) dan Mian Manurung \*\*)

Sejak tahun 2009 Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Kantor Perwakilan Indonesia, telah melaksanakan beberapa pameran mengenai sejarah sosial demokrasi di Indonesia dan Jerman di berbagai kota. Pada masa Orde Baru, pemerintah Indonesia memiliki kecenderungan menyamakan segala pemikiran yang berbau sosialisme dengan komunisme. Pameran yang dilaksanakan FES tersebut bertujuan selain untuk mengoreksi persepsi ini, tetapi juga untuk menghidupkan kembali diskusi-diskusi dan membuat ideologi pemikiran sosial demokrasi lebih dapat diterima kalangan muda di tanah air.

Pameran ini terdiri dari dua bagian, pertama dan yang utama adalah acara pameran itu sendiri dan kedua adalah kegiatan tambahan berupa serial diskusi tentang tema-tema terkini dengan cara yang lebih santai dan pertunjukan music dan budaya. Pameran sejarah pemikiran '*founding fathers*'-nya Indonesia, yang isinya menjelaskan kepada khalayak luas bahwa pemikiran para bapak bangsa Indonesia seperti mantan Wakil Presiden Mohammad Hatta, mantan Perdana Menteri Sjahrir, dan aktivis anti – kolonial, Tan Malaka merupakan pemikiran yang berhaluan sosial Demokrasi. Pemikiran para tokoh tersebut secara umum

memprioritaskan kebebasan/kemerdekaan, keadilan sosial, dan solidaritas. Selanjutnya prinsip-prinsip tersebut sebenarnya terefleksikan dalam UUD 1945 yang menetapkan antara lain bahwa seluruh warga negara memiliki hak untuk pendidikan, bahwa kekayaan alam digunakan untuk menunjang kesejahteraan warga negara, dan bahwa fakir miskin dan anak – anak terlantar diurus oleh negara. Bahan Pameran sejarah pemikiran sosial demokrasi di Indonesia tersebut terlaksana berkat kerjasama FES dengan Tempo Institute, sebuah lembaga riset di bawah majalah Tempo. Rangkuman yang sangat baik dari Tempo Institute, mampu menampilkan sejarah dan pemikiran dari Hatta, Sjahrir, dan Tan Malaka di dalam 25 banner. Pameran sejarah perkembangan pemikiran dan penerapan sosial demokrasi di Jerman, yaitu paparan sejarah perkembangan Partai Sosial Demokrat Jerman (SPD). Di sini dijelaskan bagaimana SPD dibangun, kemudian juga mengalami banyak konflik dan perbedaan dengan Partai Komunis Jerman (KPD) di awal abad ke-20. Kedua partai tersebut pada dasarnya memang mengusung dua ideologi yang berbeda. Sejarah pergerakan buruh sampai terbentuknya partai SPD selama kurun waktu lebih dari seratus tahun dirangkum di dalam 29

# Bicara tentang Akar Demokrasi Indonesia

Gedung Pusat Kegiatan Penelitian (PKP)  
Kampus Tamalanrea - Universitas Hasanuddin Makassar  
Senin - Kamis, 30 Agustus - 2 September 2010

**Pameran - Diskusi Panel - Kuis - Talkshow - Peluncuran Buku - Pemutaran Film - Musik**

**Pembicara:**  
Dr. H.M. Jusuf Kalla (\*), Budiman Sudjatmiko MSc. Mphil., Dr. Laode Ida, Dr. Ignas Kleden, Prof. Dr. Rasyid Asba, Drs. Alwy Rachman, Prof. Franz-Magnis Suseno, Nezar Patria, Bonnie Triyana, Nugroho Dewanto, Hilmar Farid, Dr. Edward L. Poelinggomang, Dr. Suriadi Mappangara, Dr. Makmur Keliat, Boni Hargens, Prof. Dr. Sangkala, Dr. Alwi, Arie Sujito, Joni Suryawan, Ridwan Monoarfa, Erwin Schweisselhelm, Rieke Diah Pitaloka (\*), Dr. Bambang Sulistyio, Andi Arfan Sabran, Theresia E.E. Pardede, Prof. Dr. Siti Musdah Mulia. \*) tbc.

**Cultural Night:**  
Similik (Musik Tradisional Makassar)  
Kelompok Penyanyi Jalanan (KPJ) Makassar  
Music Performance by Tere and Thinkerbelle

**100% gratis!**  
Indonesia

**GRATIS**  
• PLANDIR • BUKU • CD • T-SHIRT • BAG

**FRIEDRICH EBERT STIFTUNG**  
Committed to Social Democracy

**TIMO INSTITUTE**

**Universitas Hasanuddin**  
Hino Soejarno • A. Tino Adin Nugroho

baner yang dirancang oleh departemen sejarah kantor pusat FES di Jerman.

Dalam melaksanakan pameran tersebut, FES bekerjasama dengan universitas, kelompok pelajar, dan berbagai LSM di daerah. Biasanya mahasiswa dari universitas yang bersangkutan dilibatkan sebagai pemandu pameran untuk menjelaskan sejarah perkembangan sosial demokrasi di Indonesia maupun di Jerman.

Pameran pertama dilaksanakan di Bandung, bekerjasama dengan FISIP Universitas Parahyangan, pada tanggal 11 – 13 November 2009. Pameran selama 3 hari tersebut dihadiri 531 peserta. Salah satu sesi diskusi menjelaskan mengenai perbandingan antara perspektif sosial demokrasi di beberapa negara. Mantan Direktur FES Singapura, Norbert von Hofmann menjelaskan sosial demokrasi di Jerman, sementara anggota parlemen Malaysia dari Partai Keadilan Rakyat, Tian Chua menjelaskan mengenai perkembangan sos-

ial demokrasi di Malaysia. Tian Chua mengingatkan kelompok sosial demokrat di Indonesia yang sangat terfragmentasi untuk berhenti berdebat mengenai siapa yang paling benar secara ideologi, tetapi harus memulai bekerjasama untuk mempengaruhi kebijakan.

Pada tanggal 26-29 April 2010, FES melaksanakan pameran kedua di Universitas Indonesia (UI) di Depok dengan judul "Bicara Mengenai Akar Demokrasi Indonesia". Judul tersebut mengundang kritik dari beberapa narasumber seperti sosiolog Ignas Kleden dan Robertus Robert yang menyatakan bahwa tidak ada demokrasi yang berakar dari Indonesia. Ide mengenai demokrasi pertama sekali dikemukakan di Yunani dan berbagai prinsip dasarnya dikembangkan sebagian besar oleh para pemikir dari dunia barat. Menyatakan bahwa ada sebuah demokrasi versi Indonesia yang berbeda, dapat membahayakan demokrasi itu sendiri karena para pemimpin otoriter dapat menyimpang dari



praktik – praktik demokrasi yang sebenarnya dengan mengatasmakan prinsip – prinsip lokal. Pernyataan kedua pakar tersebut memicu diskusi mengenai kapan nilai – nilai lokal harus dihormati dan kapan mereka harus ditinggalkan untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi nilai – nilai universal seperti misalnya demokrasi. Selain itu, sebuah topik baru yang didiskusikan adalah “Politik Ala Gue” yang menjelaskan beberapa cara alternatif yang dilakukan beberapa orang untuk mengekspresikan kepedulian mereka terhadap perkembangan sosial dan politik Indonesia melalui cara-cara non-tradisional, seperti melalui karya lagu-lagu, puisi, atau film dokumenter. Sekitar 1500 peserta menghadiri pameran dan seminar selama 4 hari di UI.

Pameran ketiga dilaksanakan beberapa bulan kemudian di Makassar, Sulawesi, tepatnya dari 30 Agustus - 2 September 2010 dan merupakan pameran pertama yang dilakukan di luar Jawa. Partner lokal FES saat itu adalah Departemen Sejarah dan Departemen Administrasi Publik dari Universitas Hasanudin. Kali ini panitia berhasil mengundang Walikota Makassar, Irwan Arief Sirajuddin untuk membuka acara. Saat itu FES juga bekerjasama dengan Asosiasi Jurnalis Independen (AJI) Makassar. Organisasi Jurnalis ini telah banyak bekerjasama dengan FES pada tingkat nasional, dan FES sangat beruntung bahwa

AJI Makassar juga tertarik bekerjasama di Makassar. Kerjasama dengan AJI sangat meningkatkan liputan media yang sebelumnya tidak begitu gencar. Setiap hari sejak persiapan, dan sampai pameran berlangsung, selalu ada liputan yang membahas acara tersebut di media lokal baik cetak maupun elektronik.

Makassar secara umum seringkali diidentikkan sebagai kota yang gemar dengan kerusuhan. Direktur FES Indonesia, Erwin Schweishhelm mengakui kecemasannya, yang dia utarakan pada saat pidato pembukaan. Namun kekhawatiran tersebut tidak terjadi, seluruh acara berjalan dengan baik. Meskipun dilakukan pada bulan puasa, antusiasme pengunjung tetap tinggi, hal itu terlihat dari banyaknya mahasiswa yang bertanya saat acara diskusi, sehingga moderator perlu kerja keras untuk memimpin acara. Dari daftar hadir peserta/pengunjung pameran selama empat hari di Makassar diperkirakan dihadiri lebih dari 2000 peserta.

Pameran berikutnya dilaksanakan di Medan, tanggal 24-27 Mei 2011 melalui kerjasama dengan FISIP Universitas Sumatera Utara (USU) dan Kelompok Kerja Sosial Perkotaan (KKSP) yang juga merupakan mitra FES dalam melakukan program pendidikan kewarganegaraan dan demokrasi lokal untuk pelajar dan guru PKN Sekolah Menengah



Umum di tiga kabupaten kota di Sumatera Utara. Judul pameran saat itu adalah “Ini Medan Demokrasi Bung”. Strategi media di Medan agak berbeda dengan di Makassar. Kerjasama dengan media dilakukan oleh sejumlah alumni FISIP USU diantaranya dengan Radio Trijaya-FM yang menyiarkan langsung acara pembukaan serta acara diskusi. Untuk pertama kalinya juga seorang menteri sempat hadir untuk memberikan kuliah umum pada acara pembukaan pameran sosial demokrasi. Fadel Muhammad, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, menyempatkan diri untuk hadir dan menjelaskan pemikirannya mengenai “Mandat Konstitusi untuk Ekonomi Kerakyatan”. Ia juga menjelaskan kepada para peserta mengenai visinya untuk mereformasi kementeriannya agar dapat lebih memenuhi kesejahteraan para nelayan, khususnya di daerah pesisir. Di masa lalu, Kementerian Kelautan dan Perikanan hanya mengalokasikan 10-15 persen dari budget bagi kesejahteraan para nelayan, budget tersebut telah ditingkatkan sampai dengan 35 persen saat ini, dan rencananya akan ditingkatkan lagi sampai mencapai angka 50 persen tahun depan. Kehadiran Fadel Muhammad mengundang banyak pengunjung, namun saat itu merupakan tantangan sendiri bagi

panitia yang harus memenuhi standar protokoler kenegaraan. Beberapa hari sebelum acara dilakukan beberapa staf protokoler telah hadir ke tempat acara dan memastikan bahwa segala sesuatu telah disiapkan dengan baik.

Salah satu tema acara diskusi mengenai politik identitas, yang diusulkan secara khusus, karena perpecahan antar etnis dan agama yang terjadi dalam masyarakat Sumatera Utara. Prof.Dr.Franz Magnis Suseno, guru besar Universitas Driyarkara Jakarta, memberikan sebuah komentar yang sangat diapresiasi oleh para peserta. Ia mengajak para hadirin untuk beragama dengan lebih rendah hati. “Kita semua menerima agama kita dari manusia. Tidak ada yang menerima agamanya langsung dari Tuhan”, katanya.

Selanjutnya, dalam sebuah diskusi dan peluncuran buku mengenai sejarah Pancasila karangan Dr. Yudi Latif, para narasumber ditantang oleh seorang peserta dari Hizbut Tahrir Indonesia. Menurutnya, semua nilai yang terkandung dalam Pancasila telah diterapkan dalam Al Quran. Oleh karena itu, menurutnya Islam sebenarnya dapat menyediakan solusi universal bagi Indonesia. Peserta tersebut juga menyatakan bahwa Pancasila sebenarnya bukan merupakan sebuah ideologi,

karena menurutnya, hanya ada tiga ideologi di dunia yaitu kapitalisme, komunisme, dan Islam. Yudi Latief menanggapi dengan menyatakan bahwa apabila Islam disamakan dengan ideologi buatan manusia, maka hal itu hanya akan merendahkan Islam sendiri.

Acara baru yang tidak kalah menarik di Medan adalah kompetisi orasi demokrasi bagi mahasiswa. Peserta orasi terbuka untuk mahasiswa dari Universitas/Akademi yang ada di kota Medan dan sekitarnya. Dari proses seleksi terpilih 10 orang finalis yang akan bertanding dengan berbagai gaya dan cara, mulai dari gaya biasa orasi mahasiswa di jalanan sampai gaya pidato ala Soekarno lengkap dengan pecinya.

Dari 3 pameran sebelumnya, pameran di Medan merupakan yang paling diminati banyak pengunjung. Diperkirakan selama empat hari acara tersebut dikunjungi lebih dari 3000 orang.

Pameran sosial demokrasi merupakan terobosan baru bagi FES untuk mendekati anak muda yang selama ini kurang tersentuh. Untuk mendapatkan masukan bagi panitia selalu pada akhir acara, secara khusus

beberapa mahasiswa yang dipilih secara acak diundang ke podium untuk memberi komentar mereka tentang acara pameran tersebut. Seringkali mereka terkesima dengan metode yang digunakan panitia dalam melaksanakan pameran dan diskusi, yang membahas hal-hal serius tetapi dapat dibungkus dengan secara populer. Dengan antusiasme yang ditunjukkan para peserta, bukannya tidak mungkin bahwa prinsip-prinsip sosial demokrasi seperti yang ditertera di dalam UUD 1945 dapat benar-benar diterapkan di Indonesia.

Rencana pameran berikutnya di tahun 2011 ini adalah di Padang. FES ingin membawa Bung Hatta, Sjahrir dan Tan Malaka, pulang ke kampungnya. Ada peribahasa yang mengatakan "tak kenal maka tak sayang". Semoga FES dapat berkontribusi terhadap perkembangan sosial demokrasi dengan membuatnya semakin dapat diterima oleh publik.

\* **Asisten Resident Director, FES Indonesia**

\*\* **Program Officer Demokrasi, FES Indonesia**



# Neostrukturalisme di Amerika Latin: Jalan Keluar dari Pusaran Neoliberalisme?



---

Nur Iman Subono<sup>1</sup>

---

Sudah terlalu banyak kajian akademis dan bukti empiris yang memperlihatkan bagaimana neoliberalisme yang merupakan proyek *Washington Consensus* di wilayah Amerika Latin dengan soku gurunya antara lain privatisasi, fundamentalisme pasar bebas, dan peran negara yang minimal, melahirkan berbagai persoalan sosial-politik dan ekonomi bagi masyarakat, khususnya kalangan kelas bawah. Bahkan konon Chile dan Bolivia adalah dua negara di wilayah Amerika Latin yang terlebih dahulu menjalani eksperimen neoliberalisme sebelum kemudian dilaksanakan di AS dan Inggris yang menjadi pusat kapitalisme dunia.<sup>2</sup>

Dari sudut makro ekonomi, khususnya yang dikeluarkan oleh laporan Bank Dunia dan IMF, terlihat jelas bagaimana angka-angka dan presentase yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan stabilitas serta ukuran-ukuran ekonomi makro lainnya, memperlihatkan kinerja yang positif, dan bahkan sangat menjanjikan di masa-masa mendatang. Bahkan proyek ini menjadi satu-satunya, karena “*there is no alternative*”, menurut para pendukungnya, jalan bagi negara-negara Amerika Latin, dan negara-negara berkembang pada umumnya, untuk bisa keluar dari krisis finansial khususnya, maupun krisis ekonomi dalam arti luas, kecuali mengadopsi neoliberalisme sebagai ideologi, strategi dan kebijakan pembangunan. Tapi cerita “sukses” tersebut tampaknya harus dibayar mahal dengan biaya-biaya sosial (*social costs*) yang tidak kecil bagi masyarakat. Hasil dari beroperasinya pasar bebas dalam perkembangannya sangat mengecewakan, dan bahkan telah banyak membuat kerusakan di bagian selatan Dunia (*Global South*).



### Ilusi Neoliberalisme!

Ambruknya sosialisme negara pada tahun 1980an sering dijadikan patokan sebagai kemenangan neoliberalisme yang akan menjadikan dunia menjadi lebih damai dan lebih makmur, dan ini bagaikan "the end of history" seperti yang diucapkan Fukuyama. Sejak saat itu banyak negara di dunia yang mengadopsi ekonomi terbuka dan berorientasi pasar. Pasar global yang bebas, diyakini oleh pendukung neoliberalisme, akan mendorong pergerakan ide-ide dan produk-produk yang bebas, dan karenanya akan membuka negara-negara yang selama ini tertutup menjadi bagian dari dunia yang mengglobal. Perdagangan bebas dan investasi akan mempercepat kemakmuran yang diperlukan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan meredakan konflik-konflik horizontal dalam masyarakat. Proses demokratisasi dan pengembangan masyarakat sipil pada saatnya akan sejalan dengan liberalisme ekonomi. Harapan neoliberalisme tersebut memang tidak lebih dari hanya sebuah ilusi tanpa pernah terwujud secara

benar dalam kenyataan empiris. Ada banyak hasil penelitian maupun pandangan *common sense* saja yang bisa menunjukkan bagaimana proyek neoliberalisme ini menimbulkan krisis dan bahkan bencana kemanusiaan.

Di sini ada beberapa catatan yang bisa ditampilkan untuk sekedar memperlihatkan skenario optimistik neoliberalisme tidak berjalan dalam kenyataannya.<sup>3</sup> *Pertama*, kalangan ekonom, dan bahkan yang termasuk dari Bank Dunia, pada akhirnya mengakui bahwa pelaksanaan pasar bebas ternyata tidak berjalan seperti yang dijanjikan dalam argumen-argumen ekonominya. William Easterly misalnya, dalam artikelnya, "The Lost Decade", memperlihatkan bagaimana banyak negara berkembang mengalami stagnasi dalam pembangunannya meski mereka sudah mengadopsi mekanisme pasar. Ia pun memunjukkan dengan data-data statistik bahwa perumbuhan pendapatan perkapita di negara-negara berkembang pada era berperannya negara (*state interventionism*) di tahun 1960-1979 justru lebih

baik dibandingkan pada saat berjalannya mekanisme pasar bebas di tahun 1980-1999. China dan India yang mengalami kinerja ekonomi yang baik dalam periode kedua tersebut ternyata tidak mengikuti kebijakan arus utama pasar bebas (*mainstream free-market policies*). Bahkan mantan Kepala Ekonomi Bank Dunia, Josep Stiglitz, di tahun 1990an, menentang habis berperannya “fundamentalisme pasar” (*market fundamentalism*).<sup>4</sup>

Duncan Green dari Biro Latin American, London, membagi 3 periode krisis yang dialami negara-negara Amerika Latin yakni,<sup>5</sup> (1) 1982-83: resesi ekonomi yang parah akibat respon kebijakan pemerintah yang tidak hati-hati terhadap krisis utang, dan ini merupakan program stabilisasi rekomendasi IMF. Dari tahun 1979-1981, arus modal yang masuk ke wilayah Amerika Latin rata-rata pertahunnya sekitar US \$ 13 milyar. Tapi sejak 1983, Amerika Latin berubah menjadi wilayah yang mengeskport modal untuk pertama kalinya. Arus net dari transfer kekayaan Amerika Latin ke pusat-pusat kapitalisme di AS dan Eropa sekitar US \$ 218,6 milyar atau US \$ 534 per orang di wilayah tersebut. Ini tentu berkaitan dengan utang eksternal total Amerika Latin yang meningkat dari US \$ 243 milyar di tahun 1980 menjadi US \$ 361 milyar di tahun 1983; (2) 1984-87: ada upaya mencari alternatif kebijakan untuk mengatasi inflasi tanpa menyebabkan lahirnya resesi yang menakutkan. Ini yang kemudian dikenal dengan program stabilisasi heterodoks pada pertengahan 1980an. Program ini dirancang untuk “mendinginkan” untuk sesaat gerak ekonomi Amerika Latin dan sementara itu pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mengoreksi penyebab yang mendasari terjadinya inflasi. Hasil dari program ini memang tidak merata di beberapa negara Amerika Latin. Ada kisah “sukses”nya seperti yang selalu dirujuk pada kasus Mesksiko misalnya pada tahun 1988. Tapi dalam banyak kasus, program stabilisasi heterodoks seperti di Argentina (Juni 1985) dengan nama Rencana *Austral*, Rencana *Cruzado* di Brazil (Februari 1986), atau Rencana *Inti* di Peru (Juli 1985), pemerintah masing-masing negara tersebut ternyata telah gagal dalam mengatasi defisit pengeluaran pemerintah, dan hanya “sukses” sementara dalam menekan inflasi melalui kontrol harga. Namun pada saat kontrol harga

tersebut dihapuskan, inflasi justru meroket tajam, dan bahkan lebih tinggi dibandingkan pada saat program stabilisasi heterodoks tersebut belum dijalankan. Di Brazil misalnya, inflasi sempat turun dari 228% (1985) menjadi hanya 58% (1986), tapi kembali meningkat lebih parah sekitar 1000% (1988). Argentina dan Peru tampaknya juga mengikuti pola tersebut; (c) 1988-95: penanaman modal asing kembali menguat di wilayah Amerika Latin, dan ini sebagian karena dorongan dari pengumuman (Maret 1989) sekretaris perdagangan AS, Nicholas Brady, kemudian dikenal dengan sebutan Brady Plan, yang berisi berbagai rencana pengurangan utang Amerika Latin. Tapi tidak berbeda dengan program-program sebelumnya, penyehatan ekonomi Amerika Latin sangat bertumpu pada kebijakan “pintu terbuka” untuk investasi asing sebagai soku gurunya. Namun akibat jangka panjangnya sebetulnya sudah bisa diduga, investasi yang masuk tersebut pada gilirannya hanya akan semakin memperparah utang Amerika Latin secara umum. Harga yang harus dibayar dari model strategi pembangunan ekonomi seperti ini adalah salah satunya hilangnya kemampuan ekspor dalam negeri dan mengakibatkan defisit perdagangan, dan ini hanya bisa bertahan sejauh arus modal masuk masih berjalan. Cerita akhirnya kita tahu pada saat Michel Candessus, managing director IMF, menggambarkan apa yang terjadi di Amerika Latin khususnya, sebagai “*the first major crisis of our new world of globalised financial markets*”.<sup>6</sup>

*Kedua*, ternyata tinggi dan berkembangnya ketimpangan sosial berjalan bersamaan dengan liberalisasi pasar. Ketimpangan pendapatan dunia mengalami peningkatan, dan sementara itu, kebijakan neoliberalisme di banyak negara ternyata menghasilkan berkembangnya ketimpangan dan kemiskinan. Selanjutnya *ketiga*, demokrasi sendiri dianggap “tong kosong” yang hanya “nyaring” bunyinya. Cakupan pembuatan keputusan yang demokratis menjadi menciut pada saat pemerintah nasional, di bawah persetujuan internasional (baca: tekanan internasional) menyerahkan kekuasaannya untuk tidak membuat rambu-rambu kebijakan dalam sektor-sektor strategis seperti perdagangan, arus uang, investasi, kesehatan dan standar lingkungan, dan pada saat pasar finansial global mengatur (baca:

menghukum) pemerintah nasional apabila mereka menyimpang dari kebijakan-kebijakan neoliberalisme. Akibatnya lebih jauh, atomisasi dan ketimpangan sosial yang terus menguat mendorong partisipasi masyarakat yang semakin apatis dan bahkan sinis terhadap institusi-institusi demokrasi yang sedang berkembang. *Keempat*, liberalisasi pasar mendorong kondisi-kondisi di negara-negara berkembang menjadi kondusif untuk mengalami ketidakstabilan sosial-politik, dan bahkan konflik-konflik horizontal maupun vertikal. Semuanya bergantung pada mekanisme pasar bebas, dan akibatnya kelompok-kelompok masyarakat yang tidak bisa terakomodasi dalam mekanisme tersebut akan melahirkan keresahan dan rasa frustrasi yang berkepanjangan. Sudah bisa diduga, kekerasan kemudian menjadi sesuatu yang akrab, dan ini bisa menjelma dalam bentuk fundamentalisme agama, chauvinistik etnik maupun populisme karismatik.

Kita masih mencatat banyak lagi akibat-akibat negatif yang muncul bagi masyarakat dan negara menyusul diberlakukannya ideologi, strategi dan kebijakan neoliberalisme. Tapi pertanyaan yang lebih penting apakah ada alternatif yang bisa ditawarkan untuk menjadi jalan keluar dari kebuntuan dan kerusakan ini? Ide-ide dan praktek sosial demokrasi adalah salah satu dari sedikit alternatif yang bisa diajukan untuk mengatasi akibat destruktif dari neoliberalisme. Tidak hanya sosial demokrasi memiliki karakter inklusif dan tertatanya institusi-institusi demokrasi yang memediasikan konflik-konflik yang berkaitan dengan masalah redistribusi, tapi juga sosial demokrasi berhubungan dengan masalah jaminan ekonomi, kohesi sosial dan kesetaraan yang diperkuat melalui mekanisme redistribusi seperti pembaharuan agraria, penciptaan lapangan kerja, pajak progresif, regulasi pasar tenaga kerja, asuransi sosial dan dana kesejahteraan.<sup>7</sup>

### Neostrukturalisme sebagai Alternatif!

Keampuhan dari rejim sosial demokrasi di Eropa, dan negara-negara lainnya, menjelaskan kebangkitan kembali ideologi dan praktek sosial demokrasi di dalam perdebatan tahun-tahun belakangan ini mengenai pembangunan alternatif terhadap ortodoksi neoliberalisme. Thomas Meyer, seorang tokoh pemikir

sosial demokrasi Jerman, dalam salah satu diskusinya di Jakarta, mengatakan bahwa memang secara organisasional, peran dan posisi sosial demokrasi mengalami penurunan dibandingkan organisasi atau partai politik pesaingnya. Tapi, masih menurutnya, ide-ide, strategi-strategi, pilihan kebijakan dan rekomendasi ekonomi dan politik sosial demokrasi, justru mengalami peningkatan dalam arti menjadi preferensi, rujukan dan bahkan pilihan kebijakan dari organisasi atau partai politik lainnya, baik liberal maupun konservatif, dan partai Hijau (*Green party*).<sup>8</sup>

Di Amerika Latin, yang juga memiliki tradisi panjang dari gerakan sosial demokrasi, sekitar 1990an telah lahir elaborasi dari model kebijakan ekonomi alternatif, yang dimotori kalangan ekonomi yang tergabung dalam *Economic Commission for Latin America and the Caribbean* (ECLAC) dengan sebutan Neostrukturalisme (*Neoliberalism*).<sup>9</sup> Secara resmi, tepatnya di tahun 1990, ECLAC menerbitkan publikasi dengan judul, *Changing Production Patterns with Social Equity*, yang mempromosikan neostrukturalisme sebagai alternatif kebijakan, yang secara bertahap menggantikan fundamentalisme pasar neoliberal, sebagai perspektif pembangunan ekonomi di wilayah Amerika Latin.<sup>10</sup> Neostrukturalisme adalah pengganti dari pendekatan strukturalisme yang pernah berjaya pada 1950an di Amerika Latin, dan pada dasarnya neostrukturalisme adalah versi teknokratik dari sosial demokrasi. Para pengusung neostrukturalisme mengklaim bahwa pendekatan mereka bisa dijadikan rujukan untuk tidak terjebak diantara jalan strategi industrialisasi substitusi impor yang proteksionis maupun doktrin pasar bebas.

Fernando Ignacio Leiva, direktur *Globalization Studies* di AS, dalam bukunya, *Latin American Neoliberalism: The Contradictions of Post-Neoliberal Development*, secara komprehensif menjelaskan apa yang dimaksud dengan neostrukturalisme.<sup>11</sup> Menurutnnya, neostrukturalisme Amerika Latin merupakan diskursus pembangunan yang secara penuh dan tegas menantang secara langsung hegemoni neoliberalisme. Bahkan, kehadirannya dengan bendera ECLAC sebelum Anthony Giddens dari Partai Buruh, Inggris, atau sosial demokrasi Eropa mempromosikan "Jalan Ketiga" (*Third Way*). Jadi kemudian, apa sebetulnya

neostukturalisme Amerika Latin? Respon atas pertanyaan ini memiliki 4 jawaban yang saling melengkapi yakni, neostukturalisme Amerika Latin beranjak dari (a) suatu visi alternatif atas dogmatis neoliberalisme; (b) strategi pembangunan yang komprehensif; (c) kerangka kebijakan yang terintegrasi; dan (d) suatu narasi besar mengenai jalan menuju modernitas yang ditawarkan Abad 21 terhadap masyarakat Amerika Latin dan Karibia. Mengartikan neostukturalisme hanya dengan menampilkan satu dari empat dimensi yang ada akan melahirkan gambaran yang tidak utuh, dan bahkan menyesatkan. Karena memang neostukturalisme bukan hanya sekedar suatu pendekatan pembangunan ekonomi, tapi ia juga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perencana kebijakan dan agensi pembangunan internasional, dan diskursus kekuatan koalisi Kiri-tengah (*center-left coalitions*) di Amerika Latin.

### Bergerak ke “Kiri-tengah”!

Kira-kira delapan belas tahun semenjak debutannya di tahun 1990, dan enam dekade semenjak pendirian ECLAC, neostukturalisme semakin memiliki pengaruh secara intelektual dan politik, dan berhasil mempromosikan dirinya bergerak dari pinggiran menuju pusat formulasi kebijakan pembangunan ekonomi. Kegagalan neoliberalisme untuk bisa mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi, apalagi pemerataan dan keadilan ekonomi, menjadi penyebab munculnya berbagai gerakan perlawanan dan bahkan mobilisasi massa yang menentang pemerintah dengan kebijakan ekonomi neoliberal. Berbagai bentuk oposisi terhadap otoritas kekuasaan ini kemudian diikuti, sebagai dampak ikutannya, kemenangan dalam politik elektoral dari kekuatan koalisi “Kiri-tengah” di beberapa negara Amerika Latin. Sebut saja misalnya, Richardo Lagos (2000) dan Michele Bachelet (2006) di Chile, Luiz Iná “Lula” da Silva (2002) di Brazil, Néstor Kirchner (2003) dan Cristina Fernández de Kirchner (2007) di Argentina, dan Tabaré Vázquez (2005) di Uruguay. Meski dengan berbagai variasi kebijakan dan gaya pemerintahannya masing-masing, para pemimpin tersebut merupakan bagian dari upaya mempromosikan alternatif jalan pembangunan

dengan basis perspektif neostukturalisme Amerika Latin. Atas munculnya fenomena politik “Kiri-tengah” di Amerika Latin ini, *Wall Street Journal* 2005, dalam salah satu artikelnya menulis bahwa “*new breed of pragmatic leftist dedicated to combining the left’s traditional warm-hearted social goals with a newfound appreciation for cold economic calculus now occupies key economic post in Latin America*”.<sup>12</sup>

Kemunculan pemerintahan “Kiri-Tengah” ini di beberapa negara Amerika Latin, dan juga kemudian faktor yang membuat mereka kemudian “bersatu” pada dasarnya bukan karena doktrin-doktrin sosialisme yang ketat, tapi ini lebih karena pandangan yang sama bahwa neoliberalisme telah gagal dan harus digantikan dengan suatu model pembangunan yang menekankan pada kebijakan yang egaliter, kesejahteraan sosial, dan adanya peran yang lebih terpusat negara dalam kehidupan ekonomi. Dengan pengecualian Hugo Chavez (Venezuela), hampir semua pemimpin Amerika latin saat ini bisa diberi label sebagai sosial demokrat yang pragmatis.<sup>13</sup>

Neostukturalisme, sebagaimana pendekatan sebelumnya, strukturalisme, menekankan pada kekhasan historis dari situasi negara-negara Amerika Latin, khususnya hambatan-hambatan struktural dalam pembangunan dan pembuatan kebijakan ekonomi. Inti dari neostukturalisme adalah melakukan definisi ulang dari tujuan model pembangunan ekonomi. Di satu sisi, neostukturalisme kelihatannya sejalan dengan pandangan neoliberalisme pada peran sentral pasar dan mempertahankan stabilitas makro ekonomi. Tapi di sisi yang lain, mereka tampaknya berbeda dalam hal memasukan pemerataan bersama pertumbuhan sebagai tujuan ganda dari kebijakan ekonomi. Pandangan neostukturalisme meyakini bahwa mempromosikan pemerataan adalah prakondisi dari pertumbuhan yang berkelanjutan, dan ini melampaui kebijakan yang hanya sekedar bantuan mengatasi kemiskinan seperti dengan pembaharuan pajak dan redistribusi kekayaan. Dalam upayanya mempromosikan pertumbuhan yang berjalan seiring dengan pemerataan, maka perlu upaya radikal dalam memperkuat peran dan posisi negara. Tapi ini bukan berarti kembali ke era 1960an dan 1970an di mana negara menjadi “octopus” yang men-



guasai sebagian besar porsi industri nasional dan mengelola mesin birokrasi negara yang besar tapi inefisien dan korup. Sebaliknya, pendekatan neostrukturalisme menerima bahwa produksi sebisa mungkin diserahkan kepada sektor swasta, dan sementara itu, negara beraliansi dan sekaligus meregulasi sektor swasta, untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi untuk menggerakannya masuk ke dalam tingkat yang lebih tinggi lagi dalam bidang teknologi dan industri, pelatihan dan juga kepedulian terhadap masyarakat, khususnya kelompok kelas bawah atau marjinal. Negara, melalui pemerintahnya, harus intervensi dalam mempromosikan redistribusi tanah, pembaharuan pajak progresif, pengembangan teknologi, aksesibilitas pendidikan, perawatan kesehatan, asuransi sosial, angkatan kerja terdidik, dan pasar ekspor. Singkat kata, upaya mempromosikan tujuan ganda pembangunan tersebut, negara dibutuhkan dalam aktivitas ekonomi sebagai 'service-provider', manajer dan regulator, tapi bukan pemilik (*owner*).<sup>14</sup>

### Neoliberalisme versus Neostrukturalisme

Untuk semakin memperjelas perbedaan kedua paradigma tersebut, yakni antara neoliberalisme dan neostrukturalisme, ada baiknya kita melihat gambarnya dalam tabel 1.

### Beberapa Kendala !

Banyak yang menganggap bahwa neostrukturalisme sebagai salah satu alternatif yang paling realistis dan bisa dijalankan dibandingkan misalnya jalan Kiri ortodoks yang sudah usang, dan bahkan bangkrut, baik secara ideologis maupun praktek politik. Meskipun demikian, bukan berarti paradigma yang satu ini bebas dari kritik atau kelemahan-kelemahan yang cukup serius dalam argumen dan pelaksanaannya.

Duncan Green sendiri yang dalam tulisannya secara baik memperlihatkan bagaimana kegagalan neoliberalisme dalam memenuhi janjinya, mempertanyakan juga keberhasilan dari paradigma neostrukturalisme di dalam realitanya. Ia misalnya menganggap bahwa tujuan ganda kebijakan ekonomi, yakni pertumbuhan

**Tabel I**  
**Paradigma Neoliberalisme dan Neostukturalime Amerika Latin**

Padigma	Neoliberalisme	Neostukturalisme
Moto	Penyesuaian Struktural	Transformasi produktif dengan pemerataan sosial
Gagasan Operasional	Keuntungan Komparatif	Daya Saing Sistemik
Tujuan	Modernisasi vis Privatisasi	Modernisasi via Internasionalisasi
Pandangan Pembangunan	Hasil alamiah kekuatan pasar dan kebebasan beroperasinya harga sebagai mekanisme alokatif	Proses deliberatif di mana energi sosial dan politik fokus dalam mendukung kekuatan ekspor dan merealisasi dinamikanya masuk dalam arus ekonomi dunia
Agen Utama Pembangunan	Pasar	Perubahan teknologi sebagai hasil dari dinamika eknomi dunia
Wilayah Daya Saing	Pasar	Masyarakat secara keseluruhan (interaksi dari pasar, institusi dan cara pikir)
Peran Negara	Menyediakan kondisi minimum untuk pasar supaya bisa berjalan: Pemilikan pribadi; Mendorong kontrak; Memelihara ketertiban; Mengumpulkan data; Menyediakan jaringan pengaman terbatas	Menghasilkan konsensus sosial dan politik; Meningkatkan daya saing ekspor (pengelompokan dan kemitraan publik-privat); Memfasilitasi penyesuaian dan peningkatan angkatan kerja; Menghasilkan kohesi sosial
Konflik Sosial	Represif untuk menghancurkan aktor-aktor kolektif sosial; Efek "Tetes Ke bawah"; Mengsubsidi target tertentu	Menyalurkan atau mensubordinasikan konflik sosial ke arah "tujuan bersama" dengan keterlibatannya dalam ekonomi dunia; Mempromosikan modal sosial; Mengkaitkan masyarakat sipil dengan dorongan ekspor
Hasil	Politik menjadi subordinasi terhadap ekonomi	Ruang politik dan budaya dibentuk melalui keniscayaan globalisasi

Sumber : modifikasi Petras dan Leiva, 1994

dan pemerataan, tidak pernah benar-benar terjadi dalam kasus negara-negara Amerika Latin, tapi ia relatif berhasil di negara-negara industri baru di Asia dan Eropa.<sup>15</sup> Mempromosikan neostukturalisme sebagai alternatif yang kokoh dan berdaya guna dalam realitasnya, menurut banyak pengamat, memang masih jauh "api dari panggang". Ia tidak lebih hanya merupakan "globalisasi dengan wajah manusiawi", atau bahkan

hanya sekedar "neoliberalisme dengan wajah manusiawi". Kelemahan utama dari paradigma ini adalah absennya analisa politik. Bagaimana menjadikan paradigma neostukturalisme berjalan dalam realitas di wilayah Amerika Latin? Fokus pemahamannya yang hanya bertumpu pada kajian-kajian ekonomi, menyebabkan pengabaian terhadap upaya pemberdayaan kelas-kelas bawah atau marjinal dalam mempromosi-

kan cara dan tujuan dalam mencapai pembangunan dan pemerataan. Tidak terlalu jelas bagaimana strategi pertumbuhan dengan pemerataan dapat tercapai dihadapan kekuasaan elit yang begitu kuat dan solid, serta menyebar.

Kendala-kendala atau hambatan-hambatan struktural dan historis yang dihadapi umumnya negara-negara Amerika Latin, menjadikan keinginan untuk mengubah wajah pembangunan dan pemerataan menjadi tidak mudah. Misalnya di tingkat internasional, para oponent terhadap neoliberalisme harus bisa meyakinkan IMF, bank Dunia dan Washington, WTO dan pasar internasional bahwa neostukturalisme dapat bekerja, dan menguntungkan lembaga-lembaga internasional tersebut. Sementara itu, di tingkat nasional, mereka berhadapan dengan tidak efisien dan korupnya mesin pemerintah dan birokrasi. Terlalu banyak kepentingan yang terlibat di dalamnya, dengan basis kepentingan klik atau kelompoknya sendiri dibandingkan kepentingan bersama atau bangsa. Mereka pun harus berhadapan dengan kalangan elit bisnis di tingkat regional untuk bisa meyakinkan mereka bahwa untuk menerima formula redistribusi kekayaan yang relatif radikal tanpa menimbulkan larinya modal besar-besaran dan munculnya krisis ekonomi. Memang tidak mudah, dan bahkan bisa jadi tidak cenderung utopis. Pada akhirnya semuanya tergantung perjuangan politik dengan melihat pada kesempatan-kesempatan dan hambatan-hambatan politik yang ada. Kebangkitan neoliberalisme tidak serta merta menghasilkan neostukturalisme. Jalan masih panjang, dan biarkan sejarah yang mencatatnya nanti atas perjuangan manusia dan kemanusiaan dalam mengatasi persoalan-persoalan ekonomi dan politik di Amerika Latin dalam dua dekade belakangan ini (nis).

### Catatan Belakang :

- 1 Penulis adalah staf pengajar Program Studi Ilmu Politik FISIP UI dan redaktur Jurnal Sosial Demokrasi.
- 2 Lihat William I. Robinson et all, *Hantu Neoliberalisme*, terjemahan (Jakarta: C-Books, 2003).
- 3 Lihat Richard Sandrook et all, *Social Democracy in the Global Periphery: Origins, Challenges and Prospects* (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), hal. 4-6.
- 4 Untuk selengkapnya lihat Joseph E. Stiglitz, *Dekade Keserakahan: Era 1990an dan awal mula Petaka Ekonomi Dunia*, terjemahan (Serpong: Marjin Kiri, 2005).
- 5 Duncan Green, "Latin America: Neoliberal failure and the Search for Alternatives", *Third World Quarterly*, Vol. 17, No. 1, 1996, hal. 110-116.
- 6 *Ibid.*, hal. 115-116.
- 7 Sandrook et all, *op.cit.*, hal. 6-10.
- 8 Diskusi bersama Thomas Meyer di kantor FES, Kemang, Juli 2011. Untuk membaca bukunya mengenai sosial demokrasi bisa lihat Thomas Meyer dan Nicole Breyer, *The Future of Social Democracy* (FES and SAMSKRITI, 2007).
- 9 Lihat Menno Vellinga (ed), *Social Democracy in Latin America* (Boulder: Westview Press, 1993).
- 10 Fernando Ignacio Leiva, "Towards a Critique of Latin American Neostukturalism", *Latin American Politics and Society*, 50: 4, 2008, hal. 1-2.
- 11 Untuk selengkapnya lihat Fernando Ignacio Leiva, *Latin American Neostukturalism: The Contradictions of Post-Neoliberal Development* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2008).
- 12 David Luhnow "Latin America's Left Takes Pragmatic Tack", *Wall Street Journal*, March 2, hal. A15
- 13 Sandrook et all, *op.cit.*, hal. 7-8.
- 14 *Ibid.*,
- 15 Green., *op.cit.*, hal. 119-120.

*Profile*



# Jalan Sunyi Musik Franky

Jika saat ini kita bertanya kepada anak muda yang lahir pada tahun akhir 80-an atau 90-an mengenai Franky Sahilatua, maka gelengan kepala dan tarikan pundak tanda tak tahu akan ditemui dalam jawaban mereka.

Dalam sebuah generasi yang sudah terbiasa didikte oleh Industri musik mainstream, tak heran Franky tak terlalu dikenal. Pada sebuah generasi yang mengenal bagus tidaknya sebuah lagu lebih kepada sering tidaknya diputar di TV, ramai dibicarakan di acara gosip, atau rupawan tidaknya di penyanyi, jelas berpulangunya Franky pada hari Rabu, 20 April 2011 lalu bukan berita yang menghebohkan.

Dia adalah “anak tiri di negerinya sendiri”, seperti ucap Garin Nugroho, sutradara dan budayawan itu. Lagu “Kemesraan” pun yang begitu terkenal pada

tengah katastrofi industri musik Indonesia saat ini.

Dan Indonesia kehilangan, bukan seorang musisi yang albumnya terjual satu juta copy dan sering tampil di layar kaca. Indonesia justru sedang kehilangan seorang musisi yang sederhana. Yang menggubah sebuah lagu bukan karena melulu ikut aliran pasar, atau sendu sendan emosi personal. Bagi Franky yang dinyanyikannya bukan hanya urusan pribadi satu orang, namun lebih kepada kegelisahan sosial yang jamak.

Mungkin kita bisa menilik lagi lagu-lagunya seperti “Orang Pinggiran”, “Terminal”, “Perahu Retak”, “Menangis”, dan “Di Bawah Tiang Bendera”, “Aku Mau Presiden Baru”, dan “Jangan pilih Mereka”. Bagi mereka yang akan mengernyitkan dahi melihat judul-judul lagu itu tanda tak suka, maka mereka harus lebih bisa menerima bahwa membuat lagu di luar tema

tema mainsteam itu mungkin dan penting. Mungkin karena jelas kreativitas kita akan dipertanyakan karena hanya bisa membuat lagu yang itu-itu melulu. Penting karena dengan musiklah banyak masalah-masalah sosial yang susah dicerna orang banyak, jadi lebih ramah didengar telinga.

Franklin Hubert Sahilatua sudah terbaring lemas semenjak Juni 2010, berjuang melawan kanker sumsum tulang belakang. Dalam kondisi yang sedemikian menyiksa, pria kelahiran 16 Agustus 1953 itu malah sempat membuat dua lagu berjudul “Anak Tiri Republik”, dan “Sirkus dan Pangan”. Mungkin seperti apa yang diucapkan Bob Dylan: “A man is a success if he gets up in the morning and gets to bed at night, and in between he does what he wants to do.” Dan bagi pria berumur 57 tahun ini, yang disenangnya adalah musik, maka dia akan terus bermain gitar dan bernyanyi (meski dalam sunyi) dan terus bernyanyi.

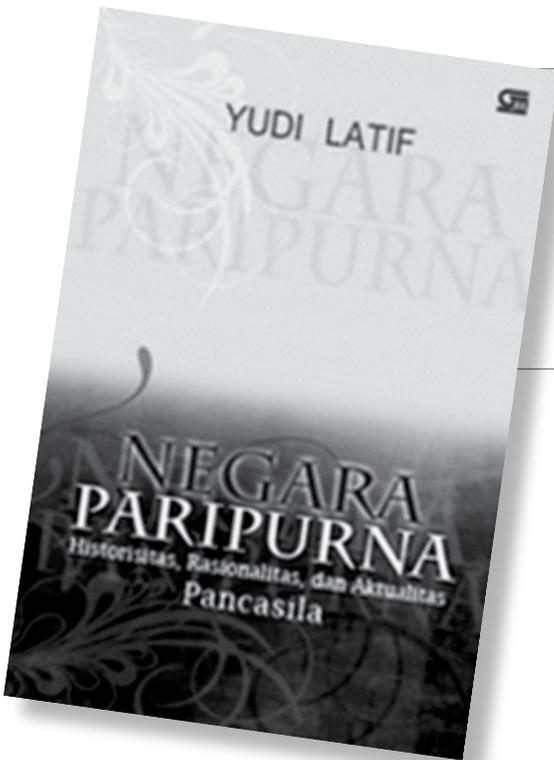
(Bramantya Basuki, Tempo Institute)

masanya, dinyanyikan disana-sini dari pengamen jalan hingga pejabat, sedikit diketahui orang bahwa itu merupakan magnum opus lagu ciptaanya.

Tahun 90-an hingga saat ini industri musik Indonesia memang tidak terlalu memberi banyak tempat bagi bagi musik Franky. Lagu-lagunya yang memang bercorak sederhana, dengan sebuah gitar sebagai instrumen andalannya, mungkin tampak membosankan bagi mereka. Namun apa yang disampaikan jelas penting, sebagai sebuah suara “yang lain”, apa lagi di



# APA SALAHNYA PANCASILA?



---

Buku : Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila  
Pengarang : Yudi Latif  
Tebal : vii + 667 halaman; 15 cm  
Penerbit : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011

---

Mata pemuda itu menatap tajam ke arah para pembicara di depan panggung. Diskusi yang mengundang narasumber seperti Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Inspektur Jenderal Polisi (Purn.) Ansyad Mbai, Wakil Kepala Kepolisian RI Jendral Nanan Soekarna dan Rektor Universitas Paramadina Anis Baswedan itu mendadak senyap. Pertanyaan yang pemuda itu ajukan dalam diskusi bertema “Mengupas Radikalisme di Sekitar Kita” itu memang sedikit mengejutkan: “Apa salahnya negara Islam?”

“Jangan lagi memakai alasan-alasan usang seperti Indonesia negara berbhineka, atau Pancasila atau apapun itu”, lanjut pemuda itu. “Tolong beri saya alasan yang jelas, apa salahnya negara Islam?”

Saya tidak berharap untuk melanjutkan reportase mengenai jalanya diskusi tersebut. Namun pertanyaan lugas itu sepertinya hendak menegaskan sesuatu, bahwa Pancasila, sebuah dasar negara yang digagas pada rapat BPUPK (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) 1 Juni 1945 kehilangan gaungnya di masa kini.

Dalam buku *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila* inilah seorang Yudi Latif berusaha untuk mengembalikan lagi gaung itu. Rumusnya sederhana, satu per satu dari 5 sila Pancasila dikupas satu persatu dengan sabar dan ditulis dalam tiap bab buku ini. Dan sebagai “hidangan pembuka” pada Bab 1 adalah historitas kelahiran Pancasila itu sendiri. Namun tidak hanya terbatas pada paparan historis semata, dalam buku ini juga menyediakan analisis menarik mengenai jalinan peristiwa tersebut.

Seperti letika secara runut dibabarkan gagasan-gagasan awal sebelum munculnya Pancasila. Dimulai dari *Indische Vereniging* atau Perhimpunan Indonesia (PI) yang merupakan kumpulan para pelajar Indonesia di negeri Belanda. Disebutkan juga bahwa para pelajar yang belajar di luar negeri itu secara langsung maupun tidak langsung belajar kesadaran pasca-revolusi Perancis. Di dalam kesadaran itu terkandung nilai-nilai seperti kebebasan, kesetaraan dan solidaritas. Nilai-nilai itu tumbuh subur di Eropa dan Belanda, namun mereka menemukan bahwa pelaksanaan di luar Eropa atau negara-negara jajahan berbeda jauh.

Tonggak lain adalah Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, saat para pemuda menembus batas-batas etno-religius dengan menawarkan imajinasi inkorporasi baru berdasarkan konspeksi kewargaan yang menjamin solidaritas atas dasar kesamaan tumpah darah, bangsa dan bahasa persatuan. Fase yang oleh penulis disebut sebagai fase pembuahan itu dilanjutkan dengan fase perumusan. Peristiwa perumusan Pancasila tak lain adalah rapat BPUPK mengenai dasar negara yang dimulai tanggal 28 Mei 1945. Dalam rapat ini Muh. Yamin, Supomo dan Soekarno mengemukakan pidato mengenai dasar negara yang nantinya akan menjadi Pancasila.

\*\*\*

Jangan harapkan dalam buku ini anda hanya akan membaca uraian panjang lebar mengenai sejarah kelahiran Pancasila semata. Dengan bahasa yang lugas dan mudah dimengerti, Yudi Latif juga menjabarkan tentang sejarah luas pemikiran-pemikiran yang mendasari terbentuknya Pancasila lewat peristiwa-peristiwa historis dunia.

Misal mengenai bab Kemanusiaan Universal, kita diajak “bertualang” dari zaman es, zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, zaman pendudukan Belanda di Indonesia hingga zaman perjuangan kemerdekaan. Di sela-sela pembabakan sejarah itu dia memberikan penjelasan mengenai dialektika gagasan, kondisi kemanusiaan serta kondisi sosial di Indonesia dan dunia.

Bisa jadi buku ini menjadi semacam ensiklopedi mengenai Pancasila itu sendiri. Semua hal yang berkaitan dengan kelahiran lima sila itu: historitasnya, perkembangan pemikirannya, gerakan sosial yang melatar belakangnya, situasi geopolitik, serta unsur-unsur antropologis masyarakat Indonesia. Dengan kata lain buku ini merupakan bacaan yang cukup tepat bagi generasi sekarang, yang seringkali ahistoris, dalam memahami Pancasila dan segala pemikiran yang menyertainya. Selain karena buku ini memang dibuat secara ringan dan mudah diikuti karena gaya penulisannya yang lebih kepada bertutur.

Namun tak ada gading yang tak retak. Di sini sekaligus saya hendak menyampaikan beberapa catatan perihal buku ini. Yang pertama mengenai judul buku ini sendiri, Negara Paripurna. Salah satu penjelasan dalam buku ini menyebutkan:

*“Demikianlah, para pendiri bangsa ini telah mewariskan kepada kita suatu dasar falsafah dan pandangan hidup negara –yang menjiwai penyusunan UUD- yang begitu visioner dan tahan banting (durable). Suatu dasar falsafah yang memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang kuat, yang jika dipahami secara mendalam, diyakini secara teguh dan diamalkan secara konsisten dapat mendekati perwujudan “Negara Paripurna”. (Hal. 47)*

Dalam bahasa sansekerta Paripurna berarti penuh atau tuntas. Kurang memudahinya pengertian mengenai Negara Paripurna sendiri membuat kita

jadi bertanya-tanya ketika hendak membaca: Seperti apa negara paripurna? Apakah itu kondisi negara yang serba final yang akan mustahil kita temui di dunia ini? Apakah hanya dengan Pancasila akan cukup mencapainya? Di luar segala polemik itu, judul ini memang bagus untuk memancing keingintahuan seseorang.

Yang kedua adalah wacana mengenai Pancasila adalah warisan dari jenius Nusantara. Sebuah catatan perlu kita sematkan bila hal ini akan berujung pada klaim mengenai keaslian Pancasila dari Indonesia. Jika kita mau jujur, sebenarnya mana dari lima sila itu lahir asli dari Tanah air Nusantara? Sila Ketuhanan yang Mahesa es berasal dari agama-agama samawi di sekitar Timur Tengah dan Asia Kecil, Sila Kemanusiaan lahir dari pemikiran Yunani Kuno dan Abad pencerahan, Sila Persatuan lahir dari gagasan Emperium-emperium di Eropa, Sila Demokrasi Mufakat lahir pada pemikiran Yunani Kuno dan Sila Keadilan Sosial pun berakar dari pemikiran Marx. Dan kita seharusnya menjadi semakin fahum, bahwa sebuah pemikiran lahir dari pundak pemikiran sebelumnya, begitu juga Pancasila. Sekedar agar kita tak lagi tetutup awan tebal nasionalisme sempit, yang kerap kali digunakan untuk menyembunyikan kebobrokan kita.

\*\*\*

Ketika proses perumusan Pancasila digambarkan di dalam buku ini, kita pun melihat dengan jelas bagaimana sebuah negara terbentuk. Dari sesuatu entitas yang tersebar di gugus kepulauan nusantara, mempunyai pengalaman bersama tertindas dalam kolonialisme, dan berikrar serta menentukan seperti apa hari esok. Sebuah negara hadir ketika manusia-manusianya sama-sama memutuskan untuk bergabung dalam proyek bersama (*common project*) dimana kepentingan publik didahulukan, kemanusiaan dijunjung, keadilan diutamakan. Karena itu disebut sebagai Republik, dan oleh karenanya ia hadir di luar logika agama (yang lebih berat pada kepentingan akhirat) dan pasar (yang lebih berat pada kepentingan *profit*).

Namun Indonesia juga adalah negara yang lahir dari pergolakan. Untuk terciptanya sebuah proyek bersama itu ternyata tidak cukup hanya dengan faktor-faktor pemersatu macam perasaan senasib karena

kolonialisme. Dari perdebatan perumusan dasar negara juga kita dapatkan kesan itu: bagaimana mungkin negara integralistik milik Soepomo (yang pada usulan lima silanya mengutamakan persatuan) bisa akur dengan gagasan lima sila Soekarno yang mengutamakan Kebangsaan dan Internasionalisme? Berbagai gagasan pembangun bangsa ini memang tidak seragam. Banyak kepentingan-kepentingan publik disalah artikan menjadi kepentingan orang banyak atau mayoritas. Salah satu contohnya adalah polemik mengenai tujuh kata dalam Piagam Jakarta (yang penyelesaiannya terkesan belum mufakat), dimana yang universal harus bertumbukan dengan yang partikular.

Prof. Jakob Sumardjo dalam tulisannya *Paradoks Pancasila* pernah berujar: "ironis, banyak negara-negara lain yang tidak memiliki Pancasila justru lebih Pancasila-lais dari kita". Mungkin dia ingin berujar, bahwa keberadaan Pancasila tidak serta merta menjadi elixir mujarab untuk semua masalah. Pada akhirnya Pancasila pun harus mendapatkan "pijakannya", ia harus turun menjadi sebuah praksis atau kita hanya akan terhanyut dalam kebanggaan mengenai "hebatnya" Pancasila sebagai dasar negara, masa lalu para pendiri bangsa dan cita-cita mereka mengenai Indonesia. Kita harus bangun, persis seperti kata Marx: "*All that is solid melts into air, all that is holy is profaned, and man is at last compelled to face with sober senses, his real conditions of life, and his relations with his kind*". Dan Pancasila harus kita pandang sebagai proyeksi bagi masa depan, bukan sekedar peninggalan masa lalu belaka. Hanya dengan itu proyek bernama Indonesia dapat terus berlanjut.

Oleh karena itu, ketika mungkin kita bertemu lagi dengan si Pemuda di awal tulisan ini, maka dengan lugas (mungkin setelah membaca buku ini) dapat menjawab: "Emang, Apa Salahnya Pancasila?"

(Bramantya Basuki, Tempo Institute)

“Sosialisme yang demokratis bukanlah sebuah konsep yang tertutup dari ide-ide baru tentang penciptaan hubungan kemasyarakatan (...). Tetapi keyakinan fundamental yang terus berkembang ini didasarkan pada suatu filsafat hidupbersama yang berasaskan kebebasan, kemanusiaan, negara hukum, dan keadilan sosial”

**Willy Brandt (1913 – 1992)**





“Kebebasan dan keadilan tidak dapat dipisahkan. Kebebasan hanya dapat berkembang dalam sistem pemerintahan yang stabil. Tugas pertama bagi mereka yang menghargai kebebasan adalah dengan melindunginya, dan bilamana ada pelanggaran, mengembalikannya.”  
**(Friedrich Ebert , 1919)**

